

**LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL OLEH PEMERINTAH
INDONESIA SETELAH MENINGKATNYA TREN INDUSTRI
OTOMOTIF BERBASIS LISTRIK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos.)
dalam Bidang Hubungan Internasional**



**Oleh:
M. ROEHMAN ZAINUR RIEDHO
NIM I72218051**

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
OKTOBER 2022**

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN
SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Roehman Zainur Riedho
NIM : I72218051
Program Studi : Hubungan Internasional
Yang berjudul : **Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Surabaya, 26 September 2022

Yang menyatakan



M. Roehman Zainur Riedho

NIM I72218051

PERSETUJUAN PEMBIMBING

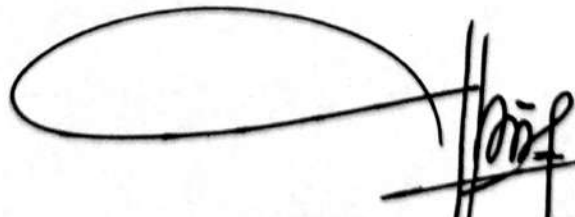
Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan yang ditulis oleh:

Nama : M. Roehman Zainur Riedho
NIM : 172218051
Program Studi : Hubungan Internasional

yang berjudul: *Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik*, saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diperbaiki dan dapat diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Ilmu Sosial dalam bidang Hubungan Internasional.

Surabaya, 26 September 2022

Pembimbing



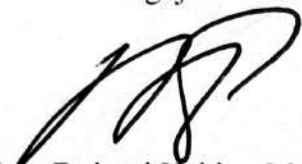
Muhammad Qobidl 'Ainul Arif, S.I.P., M.A., CIQR
NIP 198408232015031002

PENGESAHAN

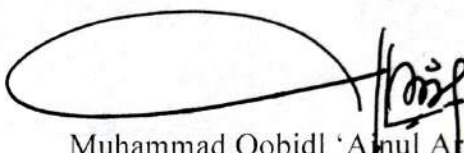
Skripsi yang disusun oleh M. Roehman Zainur Riedho dengan judul: **Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik**, telah dipertahankan dan dinyatakan lulus di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 7 Oktober 2022.

TIM PENGUJI SKRIPSI

Penguji I


Mch. Fathoni Hakim, M.Si.
NIP 198401052011011008

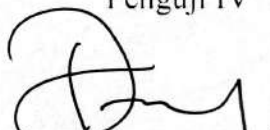
Penguji II


Muhammad Qobidl 'Anul Arif, S.I.P.,
M.A., CIQnR.
NIP 198408232015031002

Penguji III


Nur Luthfi Hidayatullah, S.IP.,
M.Hub.Int.
NIP 199104092020121012

Penguji IV


Zudan Rosyidi, S.S., M.A.
NIP 198103232009121004

Surabaya, 7 Oktober 2022

Mengesahkan,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dekan




Dr. Abdul Chalik, M.Ag.
NIP 195506272000031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Roehman Zainur Riedho
NIM : I72218051
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Hubungan Internasional
E-mail address : roehmanriedho@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah Meningkatnya

Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik

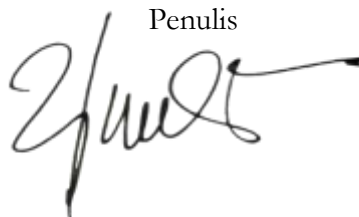
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 7 Oktober 2022

Penulis



(M. Roehman Zainur Riedho)

ABSTRACT

M. Roehman Zainur Riedho, 2022, Indonesian Government Bans Nickel Ore Exports After Increasing Trend in Electricity-Based Automotive Industry, Undergraduate Thesis of International Relations Department Faculty of Social and Political Sciences State Islamic University of Sunan Ampel Surabaya.

Keywords: Foreign Policy, Nickel Ore Export Ban, Indonesian Government, Electricity-Based Automotive Industry

This study aims to explain factors affecting the policy of banning nickel ore exports by the Government of Indonesia after the mount-up trend of the electricity-based automotive industry. This study uses qualitative research methods as an approach to the type of explanatory research. Questionnaires, focus group discussions (FGD), documentation studies, and internet-based searches became a tool for collecting data in this research. The foreign policy theory developed by Marijke Breuning is used as a theory to analyze the Indonesian Government's nickel ore export ban policy. The result of this research shows there are three factors which influence the policy of banning nickel ore exports by the Government of Indonesia. First, the individual factor of President Jokowi who has an active-positive presidential character and sees Indonesia's history during the VOC era which exploited natural resources as a personal historical basis (scheme) in making a policy of banning nickel ore exports. Second, the factor of nickel utilization by the Government of Indonesia through the Nickel Downstream Program and the Strategic Plan of the Ministry of Energy and Mineral Resources in utilizing nickel. Third, the global nickel demand factor in the electricity-based automotive industry sector and nickel derivative products which continues to increase until 2030. The response to the ban on Indonesia's nickel ore export policy is divided into four typologies, including the response of the European Union in suing Indonesia to the WTO, the increase in international nickel prices, the response of East Asian countries, and the response of fellow nickel producing countries.

ABSTRAK

M. Roehman Zainur Riedho, 2022, *Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Pemerintah Indonesia Setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik*, Skripsi Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri, Larangan Ekspor Bijih Nikel, Pemerintah Indonesia, Industri Otomotif Berbasis Listrik

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah meningkatnya tren industri otomotif berbasis listrik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai pendekatan dengan jenis penelitian eksplanatif. Angket, *focus group discussion* (FGD), studi dokumentasi, dan penelusuran berbasis internet menjadi sarana untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian ini. Teori kebijakan luar negeri yang digagas oleh Marijke Breuning dijadikan sebagai teori untuk menganalisis kebijakan larangan ekspor bijih nikel Pemerintah Indonesia. Hasil penelitian ini adalah terdapat tiga faktor yang memengaruhi kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia. *Pertama*, faktor individu Presiden Jokowi yang memiliki karakter presidensial aktif-positif dan melihat eksploitasi Sumber Daya Alam di masa VOC sebagai landasan historis pribadi (*scheme*) dalam membuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel. *Kedua*, faktor pemanfaatan nikel oleh Pemerintah Indonesia melalui Program Hilirisasi Nikel dan Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memanfaatkan nikel. *Ketiga*, faktor permintaan nikel global pada sector industri otomotif berbasis listrik dan produk turunan nikel yang terus meningkat hingga 2030. Respon atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dibagi menjadi empat tipologi, diantaranya respon Uni Eropa hingga menggugat Indonesia ke WTO, naiknya harga nikel internasional, respon negara Asia Timur, dan respon negara sesama produsen nikel.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
PENGESAHAN	III
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	IV
MOTTO	V
PERSEMBAHAN.....	VI
PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN SKRIPSI.....	VIII
ABSTRACT.....	IX
ABSTRAK.....	X
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR ISI.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XV
DAFTAR GAMBAR	XVI
DAFTAR GRAFIK.....	XVII
DAFTAR SINGKATAN	XVIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu	11
F. Argumentasi Utama	18
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II KERANGKA BERPIKIR	22
A. Definisi Konseptual.....	22
1. Larangan Ekspor Bijih Nikel	22
2. Industri Otomotif Berbasis Listrik	25
B. Teori Kebijakan Luar Negeri Menurut Marijke Breuning.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	54
C. Tingkat Analisa	55
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Teknik Analisis Data.....	59
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data	60
G. Alur Penelitian	65
BAB IV ANALISIS PADA LEVEL INDIVIDU PRESIDEN JOKO WIDODO DALAM KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL	66

A.	Faktor <i>Scheme</i> dan <i>Presidential Character</i> Presiden Joko Widodo	66
B.	Faktor <i>Operational Code</i> Presiden Joko Widodo	68
C.	Faktor <i>Leadership Trait Analysis</i> Presiden Joko Widodo.....	71
D.	Faktor <i>Advisory System</i> Presiden Joko Widodo.....	76
BAB V ANALISIS PADA LEVEL NEGARA DALAM KEBIJAKAN		
LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL		
A.	Potensi Nikel Indonesia.....	82
B.	Hilirisasi Industri Nasional	86
1.	Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi	89
2.	Perluasan Lapangan Kerja.....	91
C.	Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Meningkatkan Nilai Tambah Nikel	93
BAB VI ANALISIS PADA LEVEL SISTEM INTERNASIONAL DALAM		
KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL.....		
A.	Respon Internasional atas Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel.....	97
B.	Faktor Permintaan Global terhadap Nikel.....	108
1.	Pertumbuhan Permintaan dari Sektor Industri Kendaraan Listrik ..	108
2.	Pertumbuhan Permintaan Industri Produk Turunan Nikel Global..	114
BAB VII PENUTUP		
A.	Kesimpulan	125
B.	Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN.....		
		145



 UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Negara Produsen Nikel Tahun 2020.....	8
Tabel 2. 1 Analisis Kebijakan Luar Negeri dan Terminologi Ilmiah Sosial.....	30
Tabel 2. 2 Relevansi Antara Tingkat Analisa dan Fokus Kebijakan Luar Negeri	31
Tabel 2. 3 Pertanyaan Filosofis dan Instrumental.....	33
Tabel 5. 1 Produksi Nikel Global Tahun 2020-2021.....	83
Tabel 5. 2 Sebaran Sumber Daya dan Cadangan Nikel Per Provinsi Tahun 2021	85
Tabel 6. 1 Kontribusi Kendaraan Listrik untuk Baterai Isi Ulang Realisasi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2030.....	111
Tabel 6. 2 Konsumsi Olahan Nikel Tiongkok Tahun 2010-2021.....	118
Tabel 6. 3 Jumlah Ekspor Nikel Indonesia ke Tiongkok Tahun 2019-2021	122



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Kategorisasi Sumber Daya dan Cadangan Nikel Tahun 2020	75
Gambar 6. 1 Harga Nikel dari 1 Agustus 2019 - 29 Juli 2020.....	105
Gambar 6. 2 Total Permintaan Nikel Menurut Sektor dan Skenario Tahun 2020-2040.....	117
Gambar 6. 3 Olahan Stainles Steel Tiongkok	119



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Penggunaan Nikel Pada Pengolahan Pertama	4
Grafik 6. 1 Ekspor Nikel dan Produk Turunan Nikel Indonesia Tahun 2019-2021.....	123



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR SINGKATAN

UU	Undang-Undang
Minerba	Mineral dan Batu Bara
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
Permen	Peraturan Menteri
IUP	Izin Usaha Pertambangan
Perpres	Peraturan Presiden
LME	London Metal Exchange
IMIP	Indonesia Morowali Industrial Park
COVID-19	CoronaVirus Disease-2019
BARMM	<i>Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao</i>
WTO	<i>World Trade Organization</i>
GATT	<i>General Agreement on Tariffs and Trade</i>
SCM	<i>Subsidies and Countervailing Measures</i>
PHK	Pemutusan Hubungan Kerja
GWH	<i>Giga Watt per Hour</i>
ALSA	<i>Asian Law Students Association</i>
PDB	Produk Domestik Bruto
SDA	Sumber Daya Alam
PT	Perseroan Terbatas
MNC	<i>Multinational Corporation</i>
ASEAN	<i>Association of South East Asian Nations</i>
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan dengan letak geografis yang strategis. Indonesia terletak di antara persimpangan dua samudera dan dua benua, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, Benua Asia dan Benua Australia. Posisi yang strategis ini dapat dimaksimalkan potensi ekonomi dan politiknya untuk mempertahankan kepentingan nasional dengan sebaik mungkin. Pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang dikelola dengan tepat akan memaksimalkan potensi ekonomi Indonesia.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan pemanfaatan SDA untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kemakmuran atas kandungan tanah dan air Indonesia memiliki kekayaan melimpah yang seharusnya mampu dikelola untuk kepentingan rakyat. Tanah dan bumi Indonesia memiliki kandungan mineral yang luar biasa seperti emas, nikel, tembaga, kobalt, mangan, timah. Kandungan mineral tersebut perlu dimaksimalkan sebaik mungkin sehingga membutuhkan aktivitas pertambangan mineral.

Pertambangan mineral didefinisikan dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba sebagai pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak, dan gas bumi, serta air tanah.¹ Kegiatan eksplorasi

¹ Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. (2009). Dipetik April 18, 2021, dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.htm#:~:text=1.,dan%20penjualan%20serta%20kegiatan%20pascatambang>.

tambang mineral dapat dilakukan dengan catatan memiliki persediaan mineral yang cukup terkandung di dalamnya. Kegiatan eksplorasi mineral tersebut sekaligus dapat dilakukan pengolahan kembali untuk menghasilkan nilai tambah secara ekonomi, di antaranya adalah nikel. Indonesia tercatat memiliki persediaan nikel terbesar di dunia dengan total 21 juta metrik ton.² Sedangkan data terbaru yang dirilis oleh Badan Geologi pada 2020 menyebutkan sumber daya nikel Indonesia sekitar 11,7 miliar ton dan cadangan sekitar 4,5 miliar ton.³

Hasil pertambangan nikel Indonesia tersebut diolah menjadi feronikel (FeNi), *Ni-matte*, *mixed hydroxide precipitate* (MHP), *nickel pig iron* (NPI), *mixed sulphide precipitate* (MSP), dan baja tahan karat (*stainless steel*).⁴ Kegiatan pertambangan nikel tersebut diproyeksikan bahwa cadangan nikel Indonesia akan habis pada 2093 untuk kategori nikel hidroksida (NiOH) dan *mixed hydroxide precipitate* (MHP). Sedangkan kategori feronikel (FeNi), *Ni-matte*, dan *nickel pig iron* (NPI) akan habis pada 2047. Hasil pertambangan nikel Indonesia nantinya akan dimanfaatkan di dalam negeri dan sebagian diekspor untuk memenuhi permintaan nikel global.

² Garside, M. (2021, Februari 18). *Nickel reserves worldwide by country 2020*. Dipetik Maret 18, 2021, dari [www.statista.com](https://www.statista.com/statistics/273634/nickel-reserves-worldwide-by-country/): <https://www.statista.com/statistics/273634/nickel-reserves-worldwide-by-country/>

³ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “*Booklet Tambang Nikel 2020: Peluang Investasi Nikel di Indonesia*.” esdm.go.id. 2020. <https://www.esdm.go.id/id/booklet/booklet-tambang-nikel-2020> (diakses Maret 8, 2022).

⁴ Tiammar, Arif S. *Tentang Nikel 70% dan Hilirisasi yang Terintegrasi*. Disunting oleh Gora Kunjana. 30 September 2021. [https://investor.id/opinion/265395/tentang-nikel-70-dan-hilirisasi-yang-terintegrasi#:~:text=Saat%20ini%20ada%20beberapa%20jenis,tahan%20karat%20\(stainless%20steel\)](https://investor.id/opinion/265395/tentang-nikel-70-dan-hilirisasi-yang-terintegrasi#:~:text=Saat%20ini%20ada%20beberapa%20jenis,tahan%20karat%20(stainless%20steel).). (diakses Maret 8, 2022).

Nikel adalah salah satu bahan mineral yang ramah lingkungan. Nikel teridentifikasi sebagai sebagai salah satu unsur kimia dengan lambang (Ni) dengan nomor atom 28 yang ditemukan oleh ahli kimia asal Swedia, Axel Fredrik Cronstedt, pada 1751.⁵ Sedangkan Torbern Bergman pada 1775 telah memproduksi nikel murni dan menegaskan sifat unsur yang dimilikinya.⁶ Nikel dapat dicampur dengan berbagai logam lainnya sehingga dapat menghasilkan struktur yang tahan lama dan kuat, memiliki perawatan yang rendah, dan dapat didaur ulang.⁷ Kelebihan nikel inilah yang menjadi salah satu logam dengan sifat tahan korosi dan oksidasi bahkan di suhu yang tinggi.

Adapun produk turunan nikel dapat berupa *stainless steel* (alat makan dan medis, prasarana industri, transportasi, arsitektur, dan infrastruktur air), logam pelapis (*plating*) dapat menjadi (industri otomotif, koin, dan peralatan listrik), campuran nikel (pipa, peralatan hidrolik, kondenser), dan baterai (kendaraan listrik, baterai isi ulang, penyimpanan energi).⁸ Nikel juga menjadi bahan baku dari baterai (*lithium*) yang digunakan sebagai jantung dari kendaraan *hybrid* dan listrik. Teknologi dalam kendaraan *hybrid* menghasilkan 50% polutan lebih rendah dari kendaraan bahan bakar minyak.⁹

⁵ Nickel Institute. (t.thn.). *History of Nickel*. Dipetik Januari 28, 2022, dari [nickelinstitute.org](https://nickelinstitute.org/about-nickel-and-its-applications/history-of-nickel/): <https://nickelinstitute.org/about-nickel-and-its-applications/history-of-nickel/>

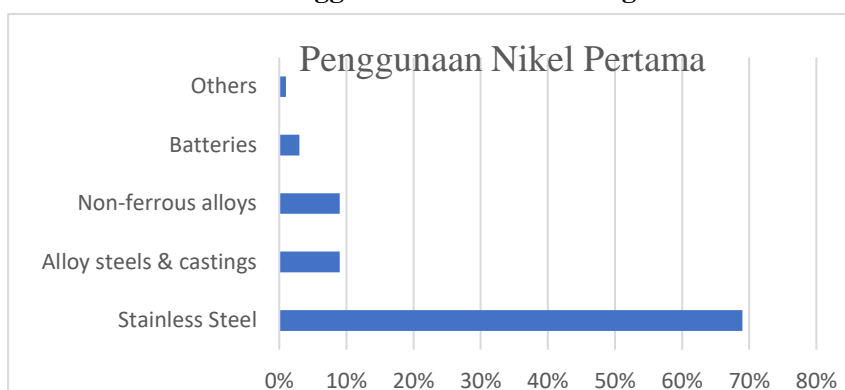
⁶ Royal Society of Chemistry. (t.thn.). *Nickel*. Dipetik Januari 28, 2022, dari www.rsc.org: <https://www.rsc.org/periodic-table/element/28/nickel>

⁷ Nickel Institute. (t.thn.). *Nickel In The European Union*. Nickel Institute. Diambil kembali dari <https://www.oma.on.ca/en/multimedialibrary/resources/NickelintheEuropeanUnionPDF.pdf>

⁸ Revindo, M. D., & Alta, A. (2020, Januari). *Trade And Industri Brief. Seri Analisis Ekonomi*, pp. 1-8.

⁹ Royal Society of Chemistry, *Nickel*.

Grafik 1. 1 Penggunaan Nikel Pada Pengolahan Pertama



Sumber: Nickel Institute. Nickel In The European Union.

Salah satu produk turunan nikel dapat digunakan untuk baterai. Tren saat ini, nikel untuk baterai dikembangkan dengan jenis nikel-kadmium yang *rechargeable* serta nikel-metal hibrida yang digunakan pada kendaraan hibrida.¹⁰ Pada tahap akhir penggunaan nikel di bidang transportasi mencapai 14% dan elektronik sekitar 11%. Hal ini akan meningkatkan penggunaan nikel pada kendaraan berbasis listrik di mana salah satu komponen utamanya adalah baterai. Variasi baterai yang menggunakan komponen penting berupa nikel di antaranya lithium-ion (*Li-ion batteries* atau LIBs) yang digunakan pada perangkat elektronik seperti *drone*, robot kecil, *smartphone*, laptop, peralatan medis, dan *battery electric vehicle* (baterai yang digunakan pada kendaraan listrik dan kendaraan hibrida).¹¹

Meningkatnya tren mobil listrik telah menjadi fenomena yang unik dimana dalam waktu satu tahun penjualan mobil listrik telah meningkat 160%. Total penjualan mobil listrik mencapai 2.6 juta unit di seluruh dunia per semester I tahun

¹⁰ Ibid.

¹¹ Sangadji, A., Ngoyo, M. F., & Ginting, P. (2020). *Nikel Baterai Kendaraan Listrik: Ketidakadilan Ekologi di Kawasan Asal Sumber Daya. Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat*. Dipetik Januari 28, 2022, dari <https://aeer.info/nikel-baterai-kendaraan-listrik-ketidakadilan-ekologi-di-kawasan-asal-sumber-daya/>

2021 dengan perbandingan semester I tahun 2020.¹² Peningkatan ini memberikan gambaran bahwa mobil listrik telah diminati secara global walau terjadi pembatasan akibat pandemi COVID-19. Sedangkan kendaraan konvensional mengalami perlambatan dan hanya tumbuh 26% secara global. Penjualan mobil listrik secara global mencapai US\$ 120 miliar mengalami peningkatan daripada tahun 2019. Tak hanya itu, peningkatan ukuran pasar kendaraan listrik (*market size*) telah dimulai pada 2017 dan fase persiapan hingga tahun 2030.

Target pasar kendaraan listrik meliputi Asia-Pasifik (Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan), Amerika Utara (Amerika Serikat dan Kanada), dan Eropa (Austria, Belanda, Denmark, Jerman, Inggris, Norwegia, Spanyol, Swiss, dan Swedia).¹³ Joanna Makris seorang analis pasar menjelaskan dalam sebuah artikel keuangan di InvestorPlace.com, pada 2020 Tiongkok telah mendominasi jalannya dengan 4,6 juta unit kendaraan listrik terbesar di Asia.¹⁴ Eropa telah menjadi pasar dengan pertumbuhan tercepat di mana sekitar 3,2 juta unit kendaraan listrik di Eropa. Jalanan di Amerika Serikat terdapat sekitar 1,3 juta kendaraan listrik di mana negara bagian California merupakan pangsa pasar kendaraan listrik tertinggi di Amerika Serikat.

¹² Jones, C., & Fitzpatrick, S. (2021, Agustus 30). *Global Electric Vehicle Sales up 160% in H1 Despite Supply Constraints*. Diambil kembali dari canalys.com: <https://www.canalys.com/newsroom/global-electric-vehicle-sales-up-160-in-h1-2021-despite-supply-constraints>

¹³ Ibid.,

¹⁴ Makris, Joanna. 2021. *Investment Opportunity Breakdown: Electric Vehicle Stocks*. 10 November. Diakses Februari 15, 2022. <https://investorplace.com/understanding-investment-opportunity-electric-vehicle-ev-stocks/>.

Minat konsumen Indonesia akan kendaraan listrik juga meningkat per semester I tahun 2021 telah terjual 1900 unit.¹⁵ Namun, penjualan ini juga memiliki tantangan yaitu harga jual mobil listrik lebih mahal daripada mobil konvensional, harga baterai setara dengan membeli mobil baru, sarana dan prasarana mobil listrik juga belum merata di Indonesia. Komponen kendaraan listrik yang begitu kompleks dan berbeda dari kendaraan konvensional pada umumnya maka diperlukan investasi juga pada komponen pendukung mobil listrik. Mengutip dari Hyundai Motor Group bahwa setidaknya terdapat lima komponen penting untuk menggerakkan mobil listrik di antaranya motor, *reducer*, baterai (termasuk *battery management sistem* dan *battery heating sistem*), *on-board charger*, dan *electric power control unit (inverter, low voltage DC-DC converter, dan vehicle control unit)*.¹⁶ Selain itu, terdapat infrastruktur pengisian daya yang perlu disediakan serta teknologi lainnya seperti *chip* atau semikonduktor.

Meningkatnya inovasi teknologi yang membutuhkan bahan baku nikel dan permintaan pasar yang begitu besar berakibat pada peningkatan produksi nikel Indonesia. Adapun produksi tahunan nikel Indonesia sebesar 853.000 metrik ton pada 2019 dan mengalami penurunan produksi menjadi 760.000 metrik ton pada

¹⁵ Damara, D. (2021, Juli 14). *Semester I/2021, Penjualan Mobil Listrik di Indonesia Capai 1.900 Unit*. Diambil kembali dari bisnis.com: <https://otomotif.bisnis.com/read/20210714/275/1417542/semester-i2021-penjualan-mobil-listrik-di-indonesia-capai-1900-unit>

¹⁶ Hyundai Motor Group. 2020. *EV A to Z Encyclopedia - 1: Understanding EV Components*. 25 Maret. Diakses Februari 15, 2022. <https://news.hyundaimotorgroup.com/Article/Understanding-EV-Components>.

2020.¹⁷ Penurunan ini disebabkan oleh aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia terkait percepatan larangan ekspor bijih nikel. Larangan ekspor tersebut dituangkan melalui Permen ESDM No. 11 Tahun 2019.¹⁸ Awalnya larangan ekspor bijih nikel ditargetkan lima tahun setelah berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tepatnya pada 2014. Undang-undang tersebut mengharuskan para perusahaan tambang untuk melakukan pemurnian dan peleburan di dalam negeri. Namun, dari sekian banyak perusahaan tambang hanya Freeport McMoran dan Newmont yang memenuhi syarat tersebut.¹⁹

Selang empat tahun kemudian, pemerintah menerbitkan aturan baru yang bertujuan untuk mencabut aturan sebelumnya melalui Permen ESDM No. 25 Tahun 2018.²⁰ Permen ESDM tersebut diterbitkan untuk memberikan izin ekspor nikel bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dengan ketentuan penjualan nikel dengan kadar kurang dari 1,7% ke luar negeri. Ketentuan atas batas kuantitas ekspor nikel tersebut berakhir pada 11 Januari 2022. Namun, rupanya pemerintah Indonesia mengubah arah kebijakan larangan ekspor tersebut. Semula batas akhir larangan ekspor bijih nikel jatuh pada 11 Januari 2022 kemudian dipercepat menjadi 1 Januari 2020. Regulasi tersebut diterbitkan oleh Kementerian

¹⁷ Garside, M. (2021, Februari 16). *Mine production of nickel in Indonesia from 2006 to 2020*. Dipetik April 18, 2021, dari www.statista.com:

<https://www.statista.com/statistics/260757/indonesian-mine-production-of-nickel-since-2006/>

¹⁸ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

¹⁹ Toledano, P., & Maennling, N. (2018). *Indonesia: Downstream Linkages*. Dipetik April 18, 2021, dari www.iisd.org: <https://www.iisd.org/sites/default/files/publikations/case-study-indonesia-downstream-linkages.pdf>

²⁰ Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

ESDM melalui Permen No. 11 Tahun 2019. Permen tersebut juga menghapus beberapa aturan tentang ketentuan ekspor nikel yang tertuang dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2018.

Menariknya, sebelum Permen ESDM No. 11 Tahun 2019 diundangkan pada 30 Agustus 2019, terdapat Peraturan Presiden yang menjelaskan mengenai komitmen pemerintah terhadap industri otomotif berbasis listrik di Indonesia. Aturan tersebut ditetapkan dan diundangkan tanggal 12 Agustus 2019 melalui Perpres No. 55 Tahun 2019.²¹ Perpres tersebut dapat memperjelas salah satu alasan implisit pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel. Adanya larangan ekspor bijih nikel tersebut memberikan dampak besar bagi suplai nikel global termasuk bergejolaknya harga nikel di London Metal Exchange (LME). Dalam waktu dua bulan harga nikel mencapai US\$ 18.000/ton di mana sebelumnya hanya US\$ 12.000/ton.²² Mengingat Indonesia dalam 10 tahun terakhir telah menjadi negara pengekspor nikel terbesar dunia bersama dengan Filipina, Rusia, Kaledonia Baru, dan Australia (**lihat Tabel 1.1**).²³

Tabel 1. 1 Daftar Negara Produsen Nikel Tahun 2020

Negara	Produksi (dalam metric ton)
Indonesia	760.000
Filipina	320.000
Rusia	280.000

²¹ Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan

²² Citradi, T. (2021, Januari 21). *Masih Mau Bukti Kalau RI Raja Nikel Dunia, Cek Data Ini!* Dipetik April 18, 2021, dari www.cnbcindonesia.com: <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210121131607-17-217775/masih-mau-bukti-kalau-ri-raja-nikel-dunia-cek-data-ini>

²³ Garside, M. 2022. *Nickel Production in Major Countries 2020*. 17 Januari. Diakses Februari 14, 2022. <https://www.statista.com/statistics/264642/nickel-mine-production-by-country/>.

Kaledonia Baru	200.000
Australia	170.000
Kanada	150.000
Tiongkok	120.000
Brazil	73.000
Kuba	49.000
Republik Dominika	47.000
Amerika Serikat	16.000

Sumber: Garside, M. 2022. *Nickel Production in Major Countries 2020*. Statista.

Perpres 55 Tahun 2019 merupakan *milestone* dari komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya-upaya mengurangi emisi dan pemanasan global.²⁴ Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah berpartisipasi dalam *Conference of Parties* tentang perubahan iklim (COP21) dan melihat peluang yang besar dari peningkatan tren penjualan kendaraan listrik global hingga 2040.²⁵ Penggunaan kendaraan listrik dinilai lebih baik dalam mengurangi emisi dan polutan. Adanya kesadaran secara global terhadap perubahan iklim yang diiringi dengan peningkatan penjualan kendaraan listrik menjadikan Pemerintah Indonesia melihat peluang di sektor industri otomotif berbasis listrik.

Latar belakang masalah tersebut menerangkan bahwa larangan kebijakan ekspor bijih nikel dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia untuk tujuan tertentu. Hal ini menarik untuk diteliti terkait penyebab dan alasan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

²⁴ Suska. *Dukungan Pemerintah untuk Kendaraan Rendah Emisi Berbasis Listrik*. Analisis, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan RI, 2019.

²⁵ Limanseto, Haryo. *Menko Airlangga Dukung Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Akselerasi Net Zero Emission*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 8 Agustus 2022. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4431/menko-airlangga-dukung-produksi-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-untuk-akselerasi-net-zero-emission> (diakses Oktober 12, 2022).

B. Fokus Penelitian

Dari pemaparan bagian latar belakang masalah, peneliti akan menggunakan fokus penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut: “Mengapa pemerintah Indonesia mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel setelah meningkatnya tren industri otomotif berbasis listrik?.”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel di tengah meningkatnya tren industri otomotif berbasis baterai. Selanjutnya, peneliti berusaha menjelaskan analisis komprehensif dari kebijakan luar negeri larangan ekspor bijih nikel oleh Presiden Joko Widodo dan segala hal yang memengaruhinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan faktor penting dari penelitian ini dilakukan, hal ini untuk melengkapi penelitian sebelumnya dan sebagai rujukan pada penelitian selanjutnya. Harapan besar penelitian ini dapat memiliki nilai manfaat secara akademis maupun praktik dengan optimal.

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi atas ide-ide baru dalam ilmu hubungan internasional serta menjadi rujukan pada penelitian berikutnya dengan aktualisasi teori-teori dan isu terkait.
- b. Penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan baru serta pemahaman pada isu-isu internasional terutama dalam fokus kajian kebijakan luar negeri dan ekonomi politik internasional.

c. Penelitian ini memberikan fokus bahasan pada pengambilan kebijakan luar negeri Presiden Joko Widodo sebagai *decision maker* kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Penggunaan kerangka teori kebijakan luar negeri Marijke Breuning dapat secara komprehensif membedah kebijakan luar negeri yang dibuat. Dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo dan yang memengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran ilmiah yang bermanfaat sebagai rujukan dalam menentukan kebijakan luar negeri oleh pemangku kebijakan. Selain itu, penelitian ini dapat mempelajari upaya-upaya pemerintah Indonesia dalam pemanfaatan nikel sebagai *bargaining power* dan komitmen mewujudkan industri otomotif berbasis listrik. Pemangku kebijakan dapat menyusun strategi untuk meningkatkan nilai tambah nikel Indonesia, serta menarik minat investor melalui kebijakan luar negeri atas komoditas bahan tambang nikel.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian yang memiliki korelasi atau keterkaitan dengan judul penelitian ini. Untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengeksplorasi informasi tentang isu terkait. Dengan tujuan penulis dapat menerima pemahaman yang cukup, universal, dan komprehensif mengenai topik yang dibahas dalam penelitian ini.

Rujukan pertama berupa jurnal yang diterbitkan oleh Asian Law Students Association (ALSA) National Chapter Indonesia dengan judul “*Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekspor Konsentrat Nikel Oleh Indonesia Pada Dispute Settlement Body World Trade Organization*”.²⁶ Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas bagaimana proses penyelesaian sengketa di *Dispute Settlement Body* Organisasi Perdagangan Dunia. Sebagai bagian dari negara yang telah menyetujui dan meratifikasi prinsip-prinsip GATT dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 maka Uni Eropa menuntut Indonesia atas Larangan Restriksi Kuantitatif sebagai respon dari larangan ekspor bijih nikel. Namun, Pasal XX dari prinsip GATT yang menjelaskan bahwa negara anggota WTO dapat mengadopsi dan mempertahankan kebijakan meski tidak sesuai dalam aturan yang termaktub dalam GATT. Pasal tersebut juga memberikan penjelasan mengenai hambatan perdagangan dengan kepentingan yang telah ditetapkan secara terbatas pada poin (g). Dengan kata lain, WTO mengizinkan negara anggotanya untuk melakukan tindakan yang bermaksud untuk melindungi lingkungan serta kekayaan alam yang dimiliki. Penelitian tersebut memberikan arti lebih sebagai pengantar untuk memahami bagaimana penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Uni Eropa yang berlangsung di WTO. Penelitian tersebut juga menjelaskan alasan-alasan hukum terkait pemanfaatan SDA berdasarkan pada GATT. Serta implementasi kebijakan yang sepatutnya dimanfaatkan untuk mendapat nilai tambah nikel tersebut. Dengan

²⁶ Ruma, N. B., Adawiyah, R. T., Rizqianda, R., Angelica, B., & Mubarak, M. R. (2021). *Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekspor Konsentrat Nikel Oleh Indonesia Pada Dispute Settlement Body World Trade Organization*. Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum. D.I. Yogyakarta: ALSA Indonesia National Chapter Indonesia. Dipetik April 18, 2021, dari https://issuu.com/alsaindonesia/docs/9._

demikian, analisa penelitian ALSA Indonesia yang cenderung menggunakan pendekatan hukum, maka penelitian ini lebih ingin mengeksplorasi kebijakan luar negeri yang menyebabkan gugatan Uni Eropa atas larangan ekspor nikel Indonesia.

Referensi kedua merupakan skripsi Ash Shiddiq dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta diterbitkan pada 2018 dengan judul "*Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Protes Pemerintah Jepang Terkait Penerapan UU Mineral dan Batubara Periode 2014*".²⁷ Penelitian tersebut memberikan analisa kebijakan luar negeri dengan Model Proses Organisasi (*Organization Process Model*). Terdapat kesamaan dalam beberapa hal sebagai respon dari dikeluarkannya aturan tentang pelarangan ekspor nikel ini. Seperti halnya Uni Eropa, Jepang merespon melalui upaya diplomasi dan negosiasi baik dilakukan secara bilateral dan multilateral. Dengan power yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Sumber Daya Alam yang diekspor ke Jepang untuk memasok mineral mentah dan batu bara. Posisi Indonesia sebagai pengeksport mineral mentah dan batu bara ke Jepang belum bisa tergantikan. Hal ini yang menyebabkan Jepang terancam kepentingan nasionalnya atas industri vital Jepang.

Indonesia juga beranggapan bahwa dikeluarkannya UU Minerba juga sebagai bagian dari agenda kepentingan nasional dan sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33. Hingga akhirnya Indonesia memberikan ruang diplomasi untuk negosiasi tentang pelaksanaan UU Minerba, hingga dukungan dan peran Jepang untuk berinvestasi dan membangun smelter di

²⁷ Shiddiq, A. (2015). *Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Protes Pemerintah Jepang*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Hubungan Internasional. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Indonesia. Namun, perbedaan yang nampak dari penelitian yang akan disusun yaitu pemanfaatan larangan ekspor nikel untuk kepentingan nasional Indonesia melalui industri otomotif berbasis listrik. Kebermanfaatan penelitian tersebut untuk penelitian ini adalah bahwa UU Minerba menjadi landasan larangan ekspor mentah barang tambang dengan pemenuhan syarat pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Tujuan lain dari UU Minerba adalah untuk pengembangan program Hilirisasi Industri pertambangan mineral, penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan negara.

Rujukan berikutnya yaitu berjudul "*Kebijakan Pemerintah Indonesia Mengurangi Ekspor Mineral Mentah Ke Jepang Setelah Pemberlakuan Undang-Undang Minerba No 4 Tahun 2009*" yang ditulis oleh Fitri Sanjaya dari Universitas Riau. Penelitian tersebut memberikan pemaparan yang jelas mengenai UU Minerba dan implikasinya terhadap Jepang. Analisa yang dilakukan menggunakan kacamata Richard Snyder yang mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi persepsi, sikap, *judgement*, dan tujuan para pembuat kebijakan. Dapat dipahami bahwa kebijakan tersebut muncul dari banyak faktor hingga direspon juga oleh dari internal maupun eksternal dalam hal ini adalah Jepang. Untuk itu, kebijakan pengurangan ekspor ini melalui UU Minerba dengan pertimbangan faktor internal dan eksternal secara implisit sebagai upaya peningkatan kepentingan nasional Indonesia. Penelitian tersebut dapat memberikan konsep dalam memahami faktor-faktor sebagai pemicu kebijakan larangan ekspor bijih nikel baik secara domestik maupun faktor internasional.

Jurnal berjudul “*Kebijakan Ketahanan Energi berbasis Energi Listrik Pada Bidang Transportasi Guna Mendukung Pertahanan Negara Di Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual*” ditulis oleh Diska Resha Putra, dkk.²⁸ Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai kontribusi energi listrik dibidang transportasi dapat turut andil mendukung pertahanan di Indonesia. Konsep yang dijelaskan dalam penelitian tersebut menggunakan ketahanan energi yang beririsan langsung dengan kepentingan dan pengoptimalan kekuatan nasional Indonesia. Penjelasan merinci mengenai dukungan pemerintah Indonesia dalam pengembangan industri otomotif berbasis listrik memberikan kemudahan bagi penyusunan penelitian ini. Di antaranya, untuk memahami komitmen pemerintah Indonesia atas larangan ekspor nikel dan usaha pengembangan industri otomotif berbasis listrik.

Penelitian selanjutnya yang dapat menjadi rujukan untuk penelitian ini berjudul “*Studi Analisis Perkembangan Teknologi dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik*” karya Aziz, dkk dalam jurnal teknik elektro.²⁹ Penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi penelitian ini dalam meningkatkan pemahaman mengenai mobil listrik secara teknis. Perkembangan mobil listrik global dan kelemahan dari mobil listrik juga dijelaskan walau tidak secara rinci dibahas. Tak hanya itu, penelitian tersebut juga memuat aspek dasar dukungan-dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong

²⁸ Putra, D. R., Yoegiantoro, D., & Thamrin, S. (2020). *Kebijakan Ketahanan Energi berbasis Energi Listrik Pada Bidang Transportasi Guna Mendukung Pertahanan Negara Di Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual*. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 7(3), 658-672. doi:10.31604/jips.v7i3.2020.658-672

²⁹ Aziz, M., Marcellino, Y., Rizki, I. A., Ikhwannuddin, S. A., & Simatupang, J. W. (2020, Maret). *Studi Analisis Perkembangan Teknologi dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik*. TESLA: Jurnal Teknik Elektro, 22(1), 45-55. doi:10.24912/tesla.v22i1.7898

pengembangan mobil listrik di Indonesia melalui kebijakan yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan penelitian tersebut berasal dari Program Studi Teknik Elektro aspek-aspek kebijakan dan pengaruh dari kebijakan ekspor nikel Indonesia tidak dibahas dan hanya berfokus pada kebijakan domestik.

Penelitian selanjutnya berjudul “*Kajian Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia: Prospek dan Hambatannya*” hasil penelitian Victor T.P. Sidabuntar.³⁰ Penelitian ini membahas potensi kendaraan listrik di Indonesia dalam perspektif *Five Forces Model* yang merupakan suatu cara analisa industri untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan industri tersebut dengan lima indikator. Indikator tersebut terdiri dari hambatan pemain baru, daya tawar pembeli, daya tawar pemasok, hambatan bagi produk pengganti, dan persaingan bisnis. Adapun kesimpulan dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa mahalnya produksi kendaraan listrik terutama komponen baterai. Kebijakan mengenai standar mengenai kendaraan listrik yang belum sesuai. Adanya hambatan dari pasokan listrik nasional yang melonjak dengan kehadiran kendaraan listrik justru akan menambah beban listrik nasional. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk kendaraan listrik. Belum adanya paket kebijakan atau insentif untuk menarik investor. Dan kurangnya pengembangan dan riset mengenai kendaraan listrik baik di Indonesia maupun di ASEAN. Dengan dinamika perkembangan politik di tanah air, bahwa terdapat beberapa poin kesimpulan yang telah berubah sebagai bentuk upaya mendorong

³⁰ Sidabuntar, V. T. (2020). *Kajian Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia: Prospek dan Hambatannya*. Jurnal Paradigma Ekonomika, 15(1), 21-38. Diambil kembali dari <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/9217/10136>

kehadiran kendaraan listrik di Indonesia. Penelitian tersebut juga memberikan analisis yang mendalam terkait perkembangan kendaraan listrik di dunia.

Penelitian yang cukup relevan dengan pembahasan ini berjudul *“Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence of Announcement Effect”* karya Byungkwon Lim, Hyeon Sook Kim, dan Jaehwan Park yang diterbitkan di jurnal *Risks*.³¹ Penelitian tersebut berfokus pada dampak dari pengumuman larangan ekspor nikel dari Pemerintah Indonesia pada 2014 yang berpengaruh pada guncangan harga nikel di London Metal Exchange. Lim dkk percaya bahwa larangan ekspor nikel ini menjadi yang pertama yang memberikan efek tak terduga di pasar dibandingkan pengumuman larangan ekspor pada 2019. Penelitian Lim dkk menggunakan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian naratif serta hipotesis yang digunakan ialah *“larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia terkait dengan kenaikan harga nikel”*. Penelitian tersebut bermanfaat sebagai salah satu rujukan penelitian ini untuk menjelaskan dampak dari larangan ekspor nikel terhadap harga nikel.

Penelitian yang juga relevan dengan pembahasan ini berjudul *“The Emerging Electric Vehicle and Battery Industri in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and SWOT Analysis”* yang disusun oleh Andante Hadi Pandyaswargo, Alan Dwi Wibowo, Meilinda Fitriani Nur Maghfiroh, Arlavinda Rezqita, dan Hiroshi Onoda yang diterbitkan di jurnal *Batteries*.³² Penelitian

³¹ Lim, Byungkwon, Hyeon Sook Kim, dan Jaehwan Par. 2021. *“Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence from the Announcement Effect”* Disunting oleh Mogens Steffensen. *Risks* (MDPI) 9: 93. doi: <https://doi.org/10.3390/risks9050093>.

³² Pandyaswargo, Andante Hadi, Alan Dwi Wibowo, Meilinda Fitriani Nur Maghfiroh, Arlavinda Rezqita, dan Hiroshi Onoda. 2021. *“The Emerging Electric Vehicle and Battery Industri*

tersebut berhasil melakukan analisa *strengths*, *weaknesses*, *opportunities*, dan *threats* (SWOT) industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia. Penelitian tersebut berusaha memadukan berbagai tinjauan untuk mengetahui kronologi larangan ekspor nikel dari media, peraturan pemerintah, dan tinjauan literatur. Dilain sisi pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan seminar yang dihadiri oleh ahli dan aktor industri baterai. Hasil dari penelitian tersebut berupa rangkuman berupa enam faktor utama yang menjelaskan ambisi Indonesia menjadi pemain regional untuk kendaraan listrik. Adapun faktor tersebut di antaranya harga, teknologi, kebijakan, investasi, infrastruktur, dan kepatuhan pada standar keberlanjutan. Namun penelitian tersebut tidak menjelaskan analisis kebijakan luar negeri terkait larangan ekspor nikel Indonesia. Untuk itu, analisis kebijakan luar negeri larangan ekspor nikel dan kaitannya dengan peningkatan tren industri otomotif berbasis listrik akan menjadi fokus penelitian ini.

F. Argumentasi Utama

Dalam penelitian ini penulis berargumentasi mengenai topik penelitian yang akan dibahas, yaitu pemanfaatan nikel dan komitmen Pemerintah Indonesia mewujudkan industri otomotif berbasis listrik. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tambang nikel. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti personalitas *decision maker* (Presiden Joko Widodo), upaya-upaya pemanfaatan

in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis.” Disunting oleh Pascal Venet. Batteries (MDPI) 7: 1-22. doi:<https://doi.org/10.3390/batteries7040080>.

nikel oleh *stakeholders* (Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian), dan permintaan global terhadap nikel. Kebijakan yang dibuat semata-mata untuk kepentingan nasional Indonesia yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi nikel, mempersiapkan industri nasional, serta meningkatkan perekonomian dan pendapatan negara.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini yang berjudul “Larangan Ekspor Bijih Nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik” akan menggunakan sistematika penulisan yang disusun dalam enam bab. Adapun penyusunan penelitian ini terdiri dari:

Bab I sebagai bagian awal dari penelitian ini yang akan memaparkan informasi awal yang disebut dengan pendahuluan. Pada bab ini akan mengandung tentang rencana penelitian yang terdiri dari: A) Latar Belakang; B) Rumusan Masalah; C) Tujuan Penelitian; D) Manfaat Penelitian; E) Tinjauan Pustaka; F) Definisi Konseptual; G) Argumentasi Utama; dan H) Sistematika Pembahasan. Latar belakang masalah merupakan *starting point* pada bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar maupun gambaran atas permasalahan dan isu yang akan diteliti. Setelah pemaparan latar belakang, peneliti akan menemukan pertanyaan penelitian yang akan diteliti dan akan dijawab di Bab IV – VI. Kemudian peneliti akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang akan diteliti. Langkah selanjutnya ialah pemaparan tinjauan pustaka yang berisi rujukan dari penelitian terdahulu sebagai acuan dasar dalam menyusun penelitian ini. Terakhir, argumentasi utama menjadi sub-bab yang akan memuat gagasan

untuk memperkuat alasan dari penelitian ini. Sedangkan sistematika pembahasan akan memuat susunan gambaran penelitian yang terdiri dari lima bab ini.

Bab II berisi penjelasan mengenai definisi konseptual dan landasan teoritis untuk mempermudah penulis dalam mengkaji topik dan isu terkait. Definisi konseptual akan berisi uraian tentang variabel-variabel yang menjadi fokus pada penelitian ini. Landasan teoritis penulis menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri yang dikembangkan oleh Marijke Breuning dengan mengkaji instrumen *decisions*, *behaviour*, dan *outcomes*. Tingkat analisa yang digunakan yakni individu, *nation-state*, dan *system* sebagai landasan teoritis dalam menyusun penelitian ini.

Bab III akan berisi menjelaskan metode penelitian yang digunakan tersusun atas: A) Pendekatan dan Jenis Penelitian; B) Lokasi dan Waktu Penelitian; C) Tingkat Analisis; D) Teknik Pengumpulan Data; E) Teknik Analisis Data; F) Teknik Pengujian Keabsahan Data; dan G) Alur Penelitian.

Bab IV - Bab VI akan memuat paparan pokok penelitian ini yang akan berisi faktor-faktor yang dianalisa berdasarkan tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini. Bab IV akan memaparkan faktor personalitas Presiden Jokowi sebagai *decision maker* larangan ekspor bijih nikel. Bab V akan memaparkan analisis *behavior* atau faktor domestik kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Bab VI akan memaparkan analisis faktor sistem yang berpengaruh dalam kebijakan larangan ekspor bijih nikel serta analisis dampak dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Data yang disajikan berupa narasi serta data penjelas lainnya seperti gambar, grafik, dan tabel. Hasil dari data maupun temuan penelitian akan dielaborasi secara urut dan runtut melalui sub-bab agar dapat menjadi substansi

untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Analisis pada bab-bab ini dihubungkan dengan teori Kebijakan Luar Negeri Marijke Breuning menyesuaikan dengan tingkat analisa yang digunakan.

Bab VII menjadi bagian penutup dalam penelitian ini yang akan berisi kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus memuat saran mengenai topik dan isu terkait. Kesimpulan akan menjadi paparan singkat tentang inti penelitian yang ditemukan serta saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat mempermudah pembaca untuk memahami topik terkait dan dapat dipertimbangkan sebagai rujukan penelitian di masa depan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KERANGKA BERPIKIR

A. Definisi Konseptual

1. Larangan Ekspor Bijih Nikel

Aktivitas perekonomian global yang berkembang pesat pascakesepakatan *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) pada 14 April 1994 telah memberikan dampak interdependensi ekonomi antar negara. GATT telah memberikan keterbukaan ekonomi, kemudahan investasi dan perdagangan, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang muncul dalam perdagangan. Namun, dalam praktik perdagangan internasional banyak sekali aspek-aspek yang memengaruhi pelaksanaan GATT tersebut. Di antaranya adalah hambatan dengan alasan untuk meningkatkan industri domestik dan konservasi sumber daya alam, pemberian subsidi, dan pembatasan kuota ekspor-impor.

GATT telah mengamanatkan satu pasal tentang penghapusan umum pembatasan kuantitatif pada Pasal XI. Pasal XI ini menyebutkan bahwa larangan atau pembatasan dalam perdagangan hanya berupa bea, pajak atau pungutan yang sesuai aturan, kuota, maupun lisensi atas ekspor maupun impor.³³ Secara harfiah, definisi pembatasan ekspor adalah tindakan pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah. Regulasi tersebut secara eksplisit menyatakan untuk membatasi

³³ World Trade Organization. “*The General Agreement on Tariffs and Trade.*” *wto.org*. 1994. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf (diakses Maret 12, 2022).

jumlah ekspor yang diizinkan sebelumnya. Pembatasan tersebut dapat berupa biaya atau pajak yang ditetapkan pemerintah atas ekspor produk yang telah dikalkulasi untuk membatasi jumlah ekspor.³⁴

Pengenaan pembatasan ekspor atau yang lebih tepatnya larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia yakni dengan penggunaan bea keluar. Hal ini didasarkan Pasal 47 Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 bahwa ekspor nikel menggunakan skema Pos Tarif/HS (*Harmonized Sistem*).³⁵ Adapun bea keluar yang ditetapkan untuk ekspor nikel sejak 2020 adalah 10%.³⁶ Namun, pengenaan bea keluar tersebut hanya diberikan kepada pemegang IUP/K yang belum memiliki fasilitas pemurnian. Sedangkan, pemegang IUP/K yang telah memiliki fasilitas pemurnian diberikan bea keluar melalui kriteria sebagai berikut:

- a. Tahap I bahwa progres pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai 30% dari rencana pembangunan;

³⁴ Kim, Jeonghoi. *Recent Trends in Export Restrictions*. OECD Trade Policy Papers No. 101, Paris: OECD Publishing, 2010.

³⁵ *Harmonized Sistem* (HS) adalah standar internasional yang ditetapkan oleh *World Custom Organization* (WCO) untuk memberikan pelabelan dan pengangkaan dalam mengklasifikasikan produk perdagangan dan turunannya. Fungsi HS yakni berupa penetapan atas tarif bea cukai, *rules of origin* (aturan asal), himpunan pajak domestik, tarif atas transportasi dan statistik, kontrol dan prosedur bea cukai, pemantauan atas barang, dan negosiasi perdagangan. HS terdiri dari kode-kode untuk mengidentifikasi kegiatan ekspor-impor, diantaranya Bea Masuk (BM), Bea Keluar (BK), Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) Dan Bea Masuk Tindak Pengaman (BMTP), pajak impor, pemberitahuan pabean, dll.

³⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar." 23 Oktober 2020. <https://api.insw.go.id/assets/upload/intr/1641461179363.pdf> (diakses Maret 13, 2022).

- b. Tahap II bahwa progres pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai 30%-50% dari rencana pembangunan;
- c. Tahap III bahwa progres pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai 50% -75% dari rencana pembangunan;
- d. Tahap IV bahwa progres pembangunan fasilitas pemurnian telah mencapai lebih dari 75% dari rencana pembangunan.

Dari kriteria tersebut, bea keluar dari masing-masing tahap pembangunan fasilitas pemurnian akan berbeda. Pada tahap I diberikan tarif bea keluar sebesar 5% dan tahap II mendapatkan tarif bea keluar sebesar 2,5%. Sedangkan tahap III dan IV diberikan nol (0%) tarif bea keluar yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pengenaan bea keluar nikel ini berpengaruh positif pada penerimaan negara tahun 2019. Penerimaan bea keluar nikel telah melonjak 127.25% dari tahun 2018 hanya Rp 659 miliar sedangkan per Oktober 2019 telah mencapai Rp 1.1 triliun.^{37 38} Hal ini diakibatkan oleh percepatan moratorium pelarangan ekspor bijih nikel yang disebut pada 1 Januari 2020, di mana sebelumnya ditetapkan pada 11 Januari 2022. Sehingga banyak perusahaan IUP/K yang mempercepat ekspor nikel sebelum regulasi tersebut berlaku.

³⁷ Kementerian Keuangan. “*Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2019.*” 2020. <https://www.kemenkeu.go.id/media/15865/laporan-keuangan-2019.pdf> (diakses Maret 13, 2022).

³⁸ Fajrian, Happy. *Bea Keluar Nikel Melonjak Tajam Setelah Larangan Ekspor Dipercepat.* 2019 November 2019. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a4c5648cc1/bea-keluar-nikel-melonjak-tajam-setelah-larangan-ekspor-dipercepat> (diakses Maret 13, 2022).

2. Industri Otomotif Berbasis Listrik

Berkembangnya inovasi pada industri otomotif telah memberikan dampak besar bagi rantai pasok global. Industri otomotif global telah berevolusi menuju kendaraan berbasis listrik yang akan memenuhi jalanan di kawasan urban. Kendaraan listrik adalah kendaraan yang ditenagai oleh listrik baik sebagian maupun keseluruhan. Pada tahap pengembangannya beberapa kendaraan listrik tidak sepenuhnya menggunakan listrik melainkan juga menggunakan bahan bakar fosil. Adapun jenis-jenis kendaraan listrik berdasarkan sumber tenaga kelistrikannya, yakni:

- a. Kendaraan listrik hibrida yakni kendaraan listrik yang ditenagai oleh listrik dan bahan bakar konvensional. Fungsi baterai *onboard* akan membantu efisiensi bahan bakar, selagi bahan bakar mengisi ulang baterai.
- b. Kendaraan listrik adalah kendaraan listrik yang hanya ditenagai oleh listrik dan tidak memiliki sumber bahan bakar cadangan.
- c. *Extended-Range Electric Vehicles* (EREVs) adalah kendaraan yang memiliki baterai sebagai sumber tenaga untuk jarak tertentu. Sedangkan bensin untuk menggerakkan generator listrik pada saat kendaraan melakukan perjalanan jauh.
- d. *Plug-In Hybrids* (PHEVs) adalah bagian dari himpunan hibrida di mana baterai dapat diisi ulang dengan mencolokkan ke sumber listrik

eksternal. PEV juga dapat beroperasi pada kombinasi listrik dan bensin tergantung pada konfigurasi kendaraan dan kebutuhan daya.³⁹

Peningkatan tren kendaraan listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya permintaan perjalanan dengan emisi yang rendah, dukungan pemerintah atas kehadiran kendaraan listrik jarak jauh, zero emisi yang dilakukan melalui subsidi, dan potongan pajak. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan produsen kendaraan listrik bersiap memproduksi secara massal.⁴⁰ Tak hanya itu, rantai pasok industri otomotif global akan melakukan transisi untuk memenuhi kebutuhan komponen kendaraan listrik. Komponen tersebut terdiri dari sel dan paket baterai, biaya *on-board*, penggerak (motor), peredam, *fuel stack*, sistem manajemen baterai, *fuel processor*, *power control unit*, kondisioner daya, *air compressor*, dan *humidifier*.

Semakin cepatnya perkembangan teknologi dan inovasi kendaraan listrik termasuk sarana pendukung lainnya akan menyebabkan penurunan harga baterai. Target harga baterai global pada tahun 2030 akan menjadi USD 60/kWh di mana sebelumnya USD 1.100/kWh pada 2010. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga bahan katoda serta meningkatnya volume

³⁹ Todd, J., Chen, J., & Clogston, F. (2013). *Creating the Clean Energy Economy: Analysis of the Electric Vehicle Industri*. Rockefeller Brothers Fund. Washington, DC: International Economic Development Council. Dipetik Januari 28, 2022, dari

https://www.iedconline.org/clientuploads/Downloads/edrp/IEDC_Electric_Vehicle_Industri.pdf

⁴⁰ Markets and Markets. (2021, Mei). *Electric Vehicle Market by Component, Vehicle (Passenger Cars, CV), Propulsion (BEV, PHEV, FCEV), Vehicle Drive Type (FWD, RWD, AWD), Vehicle Top Speed (<125 mph, >125 mph), Charging Point, Vehicle Class, V2G, Region-Global Forecast 2030*. Dipetik Januari 22, 2022, dari [marketsandmarkets.com](https://www.marketsandmarkets.com/):

<https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-vehicle-market-209371461.html>

produksi baterai. Namun, di tengah bersinarnya industri kendaraan listrik terdapat beberapa tantangan dan hambatan dari sarana pendukung serta standarisasi kendaraan listrik. Kurangnya infrastruktur pengisian kendaraan listrik menjadi salah satu pertimbangan pengguna untuk membeli kendaraan listrik. Di mana permintaan akan kendaraan akan meningkat ketika jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik berkembang dengan baik dan merata. Standarisasi kendaraan listrik dan penyesuaiannya dengan stasiun pengisian kendaraan listrik perlu dilakukan penyeragaman pada jenis tegangan tertentu. Ketidaksesuaian ini akan berakibat pada cepat atau lambatnya pengisian listrik ke kendaraan.

B. Teori Kebijakan Luar Negeri Menurut Marijke Breuning

Penelitian ini akan menggunakan landasan teori sebagai upaya mengkaji antara fakta data penelitian dengan teori yang relevan untuk membatasi identifikasi kajian. Adapun penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh Marijke Breuning. Kebijakan luar negeri merupakan faktor umum dalam interaksi internasional untuk menjalankan dan mencapai kepentingan nasional. Dalam artian kebijakan luar negeri memiliki hubungan yang bersifat kausalitas (sebab-akibat). Kebijakan luar negeri menurut Breuning adalah untuk memahami tindakan maupun perilaku negara terhadap negara lain dan lingkungan internasional (di luar batas negara pembuat kebijakan).⁴¹ Untuk itu, kebijakan luar negeri yang dibuat

⁴¹ Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan. Hal 5.

adalah pilihan rasional para pembuat kebijakan untuk memperoleh hasil yang terbaik dari kebijakan yang dibuat untuk negaranya. Breuning dalam bukunya yang bertajuk *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* memberikan tiga indikator untuk memahami proses kebijakan luar negeri dirumuskan, antara lain:

1. *Decisions*, merupakan aspek utama untuk membedah keputusan yang dipilih dari beberapa opsi kebijakan yang tersedia sebelumnya. Di mana setiap opsi-opsi kebijakan yang tersedia memiliki *output* yang berbeda. Pembuat kebijakan akan memilih satu opsi kebijakan yang rasional dan terbaik untuk memaksimalkan tujuan dari rencana kebijakan tersebut dibuat. Dalam memutuskan kebijakan luar negeri terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pembuat kebijakan melakukan hal tersebut. Sistem penasihat menjadi salah satu pengaruh yang dapat memberikan alasan-alasan pendukung mengenai mengapa harus memilih kebijakan tersebut. Pengaruh selanjutnya berupa konstituen dalam negeri yang memiliki atensi atas urusan luar negeri. Dari semua hal tersebut, adanya reaksi/respon dari luar batas negara juga dapat memengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Di lain sisi, kekuatan relatif sebuah negara dapat menjadi pertimbangan pembuatan kebijakan luar negeri.

2. *Behavior*, merupakan aksi dari upaya untuk menjalankan kebijakan luar negeri yang dipilih. Implementasi kebijakan ini turut memobilisasi lembaga negara untuk menarik simpati aktor eksternal. Implementasi tersebut juga untuk mengamankan nilai tambah kebijakan tersebut dalam kerangka kepentingan nasional mereka. Pada tahap ini, respon

lembaga terkait terkadang berbeda dengan maksud kebijakan tersebut sehingga dapat menimbulkan mispersepsi terutama dari negara lain. Untuk itu, aspek penting lainnya adalah memahami reaksi internasional yang ditimbulkan dari kebijakan luar negeri yang dibuat sebagai bahan pertimbangan untuk tetap mempertahankan atau mengubah arah kebijakan.

3. *Outcomes*, merupakan abstraksi respon maupun dampak dari kebijakan luar negeri. Adapun respon atau dampak dari kebijakan luar negeri ini tidak hanya menjelaskan hubungan sebab-akibat dari dua negara namun juga dapat berpengaruh secara sistemik. Dengan arti pembuat kebijakan tidak dapat mencegah reaksi internasional atas kebijakan yang dibuat, namun dapat melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan kebijakan tersebut atau mengubahnya. Sehingga kebijakan luar negeri yang baik adalah dengan memprediksi konsekuensi/*cost* yang akan diterima atau dikeluarkan sebagai bagian dari implementasi kebijakan maupun reaksi internasional.

Sebelum memahami tingkat analisa, maka perlu untuk memahami terminologi sebab-akibat dalam analisis kebijakan luar negeri. Terminologi ini menjelaskan mengenai variabel-variabel penyusun dalam menganalisa kebijakan luar negeri. Variabel penyebab didefinisikan sebagai faktor-faktor pendukung atas opsi-opsi yang dipertimbangkan dalam siklus pengambilan keputusan. Variabel penyebab diidentifikasi atas suatu kondisi yang memaksa (perilaku) pengambil kebijakan memilih opsi terbaik. Variabel penyebab disebut juga sebagai variabel independen. Variabel akibat menjadi suatu upaya dalam menjelaskan opsi, kebijakan, perilaku, dan hasil. Variabel akibat disebut

sebagai variabel dependen (terikat). Variabel dependen tidak akan memposisikan dirinya ada jika variabel independen tidak tersedia. Variabel dependen dapat bersifat kondisional tergantung pada ada atau tidaknya variabel independen yang lain dan variabel bebas juga bergantung pada posisi penjelasnya.⁴²

Tabel 2. 1 Analisis Kebijakan Luar Negeri dan Terminologi Ilmiah Sosial

Faktor-faktor yang berkontribusi terjadinya kebijakan luar negeri (<i>decision, behavior, dan outcomes</i>).	→	Kebijakan luar negeri <i>decisions, behavior, dan outcome</i> (hal-hal yang berusaha untuk dijelaskan).
<i>causes</i>	→	<i>effect</i>
Variabel independen	→	Variabel dependen

Sumber: Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan. Hal 19.

Setelah memahami terminologi sebab-akibat untuk memudahkan dalam menganalisis kebijakan luar negeri, Marijke Breuning menjelaskan tentang adanya tingkat analisa. Tingkat analisa menurut Breuning di antaranya tingkat analisa individu, *state* (negara), dan *sistem* (regional dan internasional). Operasionalisasi analisis masing-masing tingkat analisa dilakukan setingkat dengan indikator dalam memahami perumusan kebijakan luar negeri. Seperti halnya tingkat analisis individu akan mudah dioperasionalisasikan pada indikator *decisions*. Pada indikator *decisions* lebih menekankan pada peran personalitas individu pengambil kebijakan dengan segala faktor yang mempengaruhinya. Tingkat analisa *state* memahami seluruh faktor dan respon

⁴² Ibid, hal 18.

internal dalam suatu negara yang dapat berpengaruh pada *input* dan *output* kebijakan. Pada tingkat analisa *state* senada dengan indikator *behavior* yang berusaha memahami lembaga negara bergerak dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dipilih oleh *decision maker*. Tingkat analisa sistem senada dengan indikator *outcomes* yang berusaha memahami respon sistem internasional, baik regional, multilateral, dan internasional.

Tabel 2. 2 Relevansi Antara Tingkat Analisa dan Fokus Kebijakan Luar Negeri

Tingkat analisa	Fokus Kebijakan Luar Negeri
Individu	<i>Options/Decisions</i>
<i>State</i>	<i>Behaviors</i>
Sistem	<i>Outcomes</i>

Sumber: Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction* (1st ed.). New York: Palgrave Macmillan. Hal 12.

Tingkat individu, memberikan penekanan pada analisis ditingkat individu sebagai pembuat keputusan kebijakan luar negeri. Pemimpin atau pembuat keputusan adalah aktor/individu utama yang rasional sehingga sangat dominan dalam memengaruhi kebijakan luar negeri yang dibuat. Untuk memahami keputusan maupun perilaku kebijakan luar negeri, membutuhkan pemahaman terkait karakter maupun kepribadian seorang pemimpin termasuk persepsi dan motivasi.⁴³ Secara lebih spesifik, kepribadian seorang pemimpin akan dianalisa melalui personalitas pemimpin untuk mengetahui nilai filosofis dan keyakinan pemimpin, sifat kepemimpinan, emosi, dan motivasi.

⁴³ Ibid, hal 11.

Dalam memahami seorang pemimpin diperlukan pengenalan terhadap kepribadian pemimpin untuk melihat seberapa minat/tertarik dalam menjalankan tanggungjawabnya. Hal ini dilakukan untuk mempelajari kepribadian pemimpin yang semestinya dapat berpengaruh dalam politik global melalui keputusan yang dibuat. Parameter yang digunakan untuk menganalisa seorang pemimpin yakni melalui dua pertanyaan. Pertama, “seberapa aktif atau pasif seorang pemimpin tersebut?”, maksud dari hal ini adalah berapa banyak energi yang dikeluarkan oleh pemimpin tersebut di kantor politiknya. Kedua, “apakah pemimpin tersebut memandang kehidupan politik dapat memuaskan dirinya secara positif atau memandang negatif dalam menjalankan kewajibannya?”.⁴⁴ Pertanyaan tersebut dapat dipadupadankan untuk melihat persinggungan dari dua pertanyaan tersebut. Kategori jenis personalitas pemimpin dalam menjalankan tugasnya dan memandang kehidupan politik dibagi menjadi empat, yakni:

1. *Active-positive*, jenis ini menggambarkan pemimpin yang menginvestasikan energi dan mendapatkan kepuasan dari tugasnya;
2. *Active-negative*, pemimpin dengan karakter ini telah menginvestasikan energi yang cukup namun pekerjaannya hanya dianggap sebagai tugas. Pada jenis ini, pemimpin memiliki kecenderungan untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaannya bahkan dengan tindakan *abuse of power*;

⁴⁴ Ibid, hal 39.

3. *Passive-positive*, pada jenis ini kurang optimal dalam mengerahkan energinya namun puas dengan pekerjaan yang dilakukannya;

4. *Passive-negative*, pemimpin dengan jenis ini menganggap pekerjaan yang dilakukan hanya sebagai kewajiban semata kepada negara.

Selanjutnya, upaya untuk memahami personalitas dari seorang pemimpin dapat memahami faktor psikologis dalam melihat dunia yang dilihat dari beberapa kode analisa. Breuning menjelaskan kode operasional bagian dari upaya analis untuk menggambarkan keyakinan fundamental yang memberikan norma, standar, dan pedoman dalam pengambilan keputusan.⁴⁵ Analis harus berusaha memasuki alam pikiran seorang pemimpin dan memberikan pandangan mengenai persepsi dan evaluasi atas keputusan yang dibuat. Pada saat yang sama, analis juga perlu memahami kalkulasi pemimpin dalam mempertimbangkan asas manfaat dan risiko dari kebijakan tersebut. Untuk memahami hal tersebut, kode operasional ini didapatkan melalui pernyataan lisan maupun tulisan pemimpin dimana analis harus memiliki pemahaman bahasa yang baik. Dalam mengoperasionalisasi kode operasional dibutuhkan beberapa indikator yang menentukan keyakinan filosofis dan instrumental pemimpin dalam memandang kehidupan dan tujuan politik.

Tabel 2. 3 Pertanyaan Filosofis dan Instrumental

Pertanyaan Filosofis	1.	Apakah yang paling penting dari kehidupan politik?; bagaimana pandangan pemimpin tentang politik, harmoni
----------------------	----	---

⁴⁵ Ibid, hal 38.

		atau konflik?; apa karakter mendasar dari lawan politik?. ⁴⁶
	2.	Bagaimana prospek realisasi nilai dan aspirasi politik fundamental seseorang? Haruskah bersikap optimis atau pesimis? Dalam hal apa?.
	3.	Apakah masa depan politik dapat diprediksi? Dalam arti apa dan sejauh mana?.
	4.	Berapa banyak "kontrol" atau "penguasaan" seseorang atas perkembangan sejarah? Apa peran seseorang dalam "menggerakkan" dan "membentuk" sejarah ke arah yang diinginkan?.
	5.	Apa peran 'kebetulan' dalam urusan manusia dan dalam perkembangan sejarah?
Pertanyaan Instrumental	6.	Apa pendekatan terbaik untuk memilih tujuan politik atau tujuan tindakan?
	7.	Bagaimana tujuan dikejar dengan tindakan yang paling efektif?
	8.	Bagaimana risiko tindakan politik dihitung, dikendalikan, dan diterima?
	9.	Apa 'waktu' tindakan terbaik untuk memajukan kepentingan seseorang?
	10.	Apa kegunaan dan peran berbagai cara untuk memajukan kepentingan seseorang?

Sumber: Breuning, M. (2007). *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction (1st ed.)*. New York: Palgrave Macmillan. Hal 42.

⁴⁶ Objek "lawan politik" selalu bersifat dinamis berdasarkan konteks kebijakan yang dibuat. Lawan politik dalam analisis kebijakan luar negeri Marijke Breuning adalah persepsi pemimpin untuk memahami pihak lainnya yang perlu dikontrol. Lawan politik dalam kebijakan luar negeri dapat dimaksudkan sebagai pemimpin negara lain atau aktor dalam hubungan internasional yang berpengaruh dalam objek pengambilan kebijakan luar negeri.

Selain melakukan analisa terhadap kode operasional, diperlukan analisis sifat atau gaya kepemimpinan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Analisis sifat kepemimpinan ini dilakukan melalui serangkaian pertanyaan untuk menyelidiki karakter pribadi dan hal ini berbeda dengan pertanyaan kode operasional. Analisis sifat kepemimpinan lebih fokus pada pengaruh internal dan eksternal terhadap manajemen pengambilan keputusan. Untuk mengetahui analisis sifat kepemimpinan diperlukan analisis terhadap isi teks tertulis yang sistematis, tanggapan dalam sesi wawancara, maupun pidato para pemimpin. Analisis konten ini dilakukan dengan melihat frekuensi penggunaan atau pengucapan kata-kata yang memiliki nilai kompleksitas konseptual tinggi maupun rendah. Kompleksitas konseptual tinggi seperti penggunaan kata *possibly*, *perhaps*, *sometimes*, dan *maybe*. Kompleksitas konseptual yang tinggi mengindikasikan pemimpin telah masuk kepada fase keterbukaan informasi yang lebih besar dan penggunaan informasi terbaru. Sedangkan kata *certain*, *always*, *undoubtedly*, dan *indisputable* dikategorikan sebagai kompleksitas konseptual yang rendah. Indikasi pemimpin yang menggunakan kata-kata dengan nilai kompleksitas konseptual yang rendah, mereka cenderung lebih konfliktual dalam membuat kebijakan dan kurang berharap pada hasil akhir diplomasi.

Analisis sifat kepemimpinan ini mencakup sikap terhadap kendala yakni: Pertama, keyakinan atas kemampuan pribadi dalam mengendalikan suatu peristiwa. Maksud hal tersebut adalah persepsi pemimpin yang telah mempertimbangkan *cost* atau *benefit* dalam membuat kebijakan dan mengerti

untuk mengarahkan sumber daya yang dimiliki. Kedua, kebutuhan atas kekuasaan dan pengaruh dengan tujuan untuk membangun, mempertahankan atau memulihkan pengaruh. Parameter kedua ini lebih kepada upaya pemimpin untuk mengakomodasi kepentingannya sendiri dalam hal ini kekuasaan.

Pengaruh internal dan eksternal akan memberikan pandangan terbuka atas segala informasi yang diterima. Pemimpin akan memiliki diferensiasi untuk mengimajinasikan, menggambarkan, atau mendiskusikan mengenai tempat, kebijakan, ide, dan hal lainnya atau yang disebut dengan kompleksitas konseptual. Perbedaan cara pandang pemimpin dalam menerima informasi akan menjadi parameter percaya diri mereka dalam menerima informasi. Parameter rasa percaya diri pemimpin yang tinggi dalam membuat keputusan akan sangat berpengaruh walaupun telah menerima pendapat dari penasihatnya. Memahami sikap pemimpin dalam menghadapi kendala serta keterbukaan atas informasi akan memunculkan motivasi dari kebijakan yang akan dibuat.

Motivasi pemimpin dapat diukur dari hubungan tugas versus hubungan interpersonal, ketidakpercayaan terhadap orang lain, dan bias dalam kelompok. Tugas versus hubungan interpersonal berfokus pada substansi kebijakan sebagai *problem solving* versus hubungan interpersonal atau kerja tim. Sedangkan ketidakpercayaan pada orang lain diartikan sebagai kecenderungan persepsi untuk mencurigai dan meragukan motif orang lain. Persepsi pemimpin akan memandang negatif lawan politiknya dalam hal ini bisa pemimpin negara lain, negara, kelompok negara, atau aktor dalam hubungan internasional lainnya.

Rasa ketidakpercayaan yang tinggi terhadap lawan politiknya maka pemimpin akan merasakan ancaman yang ditimbulkan. Persepsi ini akan meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman yang akan datang dari lawan politiknya. Selanjutnya, bias dalam kelompok adalah cara pandang orang-orang dalam lingkaran pembuat kebijakan memandang dunia. Bias ini akan menjelaskan perbedaan pandangan dari orang-orang di sekitar pengambil kebijakan dalam memahami faktor-faktor kebijakan tersebut dibuat.

Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin yang identik dengan penggunaan rasionalitas namun hal tersebut tidak dapat menghindari intervensi emosi dalam pengambilan kebijakan. Dua kerangka yang menjelaskan analisis sifat kepemimpinan dan kode operasional menyiratkan kandungan egoisme pemimpin. Seperti halnya optimisme dan pesimisme dalam kode operasional tentang realisasi dan nilai aspirasi politik seseorang yang dapat berubah kapan saja tergantung pada perjalanan politik pemimpin. Kemudian, keterbukaan informasi dan ketidakpercayaan pada orang lain juga mengandung makna emosi yang mempengaruhinya. Emosi terdiri dari komponen psikologis dan fisik, komponen psikologis (mental) diidentifikasi sebagai perasaan seseorang kepada orang lain dan komponen ini dapat mengubah fisik seseorang.⁴⁷ Emosi juga dapat berupa reaksi spontan dalam merespon sesuatu. Dalam pengambilan kebijakan aspek emosi akan menjadi faktor berpengaruh bagi pemimpin untuk dapat berpikir jernih atau spontan. Faktor stres terlalu berat akan meningkatkan emosi sehingga memperburuk kinerja, sedangkan sedikit stres akan

⁴⁷ Ibid, hal 47.

berpengaruh positif. Pemimpin dengan suasana hati atau *mood* yang positif dapat menginterpretasi kebijakan berdasarkan pengetahuan umum dan stereotip. Suasana hati yang negatif, pemimpin akan cenderung lebih detail untuk menganalisa dan berhati-hati dalam menentukan langkah-langkah. Hal ini juga termasuk persepsi pemimpin tentang negara lain dan pemimpin mereka yang telah melekat sebelumnya.

Tingkat analisa *nation-state*, merupakan pertautan dari unsur-unsur internal sebuah negara yang mengharuskan untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri. Di mana analisis ini akan melihat tautan antar lembaga negara (birokrasi maupun sistem pemerintahan), publik (menganalisa kelompok yang memiliki kepentingan hingga merujuk pada opini publik), kondisi ekonomi, sejarah, maupun sosial-budaya negara tersebut. Penekanannya adalah kausalitas unsur-unsur negara dalam menjalankan kebijakan luar negeri dengan tindakan-tindakan rasional yang nantinya mendapat atensi negara lain. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh Breuning yang menyebutkan bahwa kebijakan luar negeri tidak hanya diputuskan oleh individu melainkan adanya peran aktor kesatuan (*unitary actor*).⁴⁸ Untuk mengetahui langkah awal tersebut, perlu dilakukan kajian bahwa kebijakan luar negeri yang dibuat diputuskan sendiri atau bersama-sama. Keputusan yang dibuat secara bersama-sama juga perlu dilihat mereka yang terlibat mengambil keuntungan dari peluang yang tersedia atau bertindak secara terbatas. Asumsi tersebut akan memuncak kepada teori rasionalitas yang menjadi ujung tombak pembuatan kebijakan.

⁴⁸ Ibid, hal 59.

Teori rasionalitas terbagi menjadi dua, yakni rasionalitas normatif dan rasionalitas empiris. Rasionalitas normatif memberikan model untuk perilaku rasional dan menilai secara aktual berdasarkan model yang telah dibuat.⁴⁹ Model rasionalitas normatif dimulai dari situasi atau kondisi yang membutuhkan kebijakan. Kebijakan yang dibuat dapat ditinjau melalui beberapa pertanyaan, di antaranya: 1) apa tujuan kebijakan luar negeri yang relevan?; 2) apa saja opsi-opsi yang tersedia?; 3) apa saja *cost and benefit* dari setiap opsi?; 4) membuat kebijakan dengan memiliki *cost* yang paling rendah dan manfaat paling tinggi. Proses tersebut diakhiri dengan kebijakan yang telah diputuskan dan proses pembuatan kebijakan dijadikan sebagai standar untuk menilai hasil akhir tersebut berjalan sesuai harapan.

Rasionalitas empiris dimulai situasi dan kondisi yang sama-sama membutuhkan kebijakan. Proses pembuatan kebijakan tersebut dievaluasi melalui pertanyaan sebagai berikut: 1) siapa pembuat keputusan yang relevan?; 2) apa dan kapan mereka mengetahui pra-kondisi yang membutuhkan kebijakan?; 3) bagaimana mereka menginterpretasi informasi tersebut?; 4) Opsi atau pilihan apa saja yang dianggap paling realistis?; 5) bagaimana mereka mengevaluasi pilihan tersebut?. Hasil akhir evaluasi tersebut juga sama yakni sebuah kebijakan dan proses pengambilan kebijakan merupakan subjek yang dianalisa. Asumsi dari rasionalitas empiris adalah kualitas dalam proses pengambilan kebijakan juga menentukan kualitas kebijakan.

⁴⁹ Ibid.

Implementasi rasionalitas normatif dan rasionalitas empiris dapat digabungkan menjadi poliheuristik. Poliheuristik akan menjelaskan bahwa pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dilakukan dalam dua tahap dan pada tiap tahap menggunakan pendekatan yang berbeda. Pada tahap pertama, pengambil kebijakan akan memanfaatkan prinsip non-kompensasi dalam memilih satu opsi terbaik menjadi sebuah kebijakan. Prinsip non-kompensasi adalah proses evaluasi dari berbagai opsi dan mengabaikan opsi-opsi yang dianggap merugikan (*cost* lebih besar) dan hanya memilih satu opsi terbaik. Pada tahap kedua, satu opsi terbaik yang dipilih akan dianalisa dengan cermat atas *cost and benefit* menggunakan prinsip *minimum threshold of acceptability* atau ambang batas minimum penerimaan. Opsi terbaik dalam prinsip *minimum threshold of acceptability* akan mempertimbangkan penerimaan politik dari kebijakan yang akan dibuat. Pembuat kebijakan dengan sadar juga perlu mempertimbangkan hal tersebut selain *cost and benefit* untuk kepentingan nasional dan sebagai pertanggungjawaban kepada konstituen.

Scheme atau skema juga menjadi bagian untuk menganalisis kebijakan luar negeri. Para pembuat kebijakan akan mengingat (analogi) sejarah yang memiliki kejadian yang serupa dan dapat mempertimbangkannya dalam proses pembuatan kebijakan. Skema adalah konsep psikologis yang didefinisikan sebagai representasi mental atas pengetahuan umum seseorang tentang suatu konsep atau situasi.⁵⁰ Penggunaan skema juga dipengaruhi oleh kepribadian pembuat kebijakan, tinggi-rendahnya kompleksitas konseptual pembuat

⁵⁰ Ibid, hal 73.

kebijakan akan berpengaruh pada pola pikir dan penggunaan analogi mereka. Penggunaan analogi dapat dilihat ketika para pemimpin sedang berkomunikasi dengan audiens atau pidato publik yang berkaitan dengan kebijakan yang telah dibuat.

Beberapa unsur yang menjelaskan tingkat analisa *nation-state* masih membahas faktor-faktor yang memengaruhi pemimpin dalam membuat kebijakan. Namun, pada praktiknya pemimpin tidak membuat kebijakan seorang diri. Pemimpin juga memerlukan kelompok kecil sebagai penasihat maupun lembaga negara (birokrasi) sebagai pelaksana kebijakan. Kelompok kecil yang menjadi sistem penasihat pemimpin bersifat *invisible* yang amat sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan.

Proses pembuatan kebijakan dalam birokrasi, lembaga pemerintahan, maupun kelompok kecil yang berperan sebagai penasihat pemimpin menggunakan dua pendekatan, yakni formalistik, kompetitif, dan kolegal. Pendekatan formalistik cenderung lebih kaku dengan menghormati hierarki jabatan dan memiliki rantai komando yang jelas. Alur penyampaian informasi dalam rangka pengambilan kebijakan ini dimulai dari tiap individu yang bekerja di setiap departemen, tiap kepala departemen menyampaikan kepada para eksekutif, dan eksekutif yang akan membuat kebijakan. Keuntungan penyampaian informasi dengan rantai komando memberikan aspirasi dari tiap individu di setiap departemen dapat didengar atau dipertimbangkan oleh eksekutif. Tak hanya itu, Konflik interpersonal dan substansi dalam rantai komando dapat dihindari. Namun, kelemahan sistem ini adalah adanya distorsi

informasi hingga pucuk rantai komando. Respon yang lambat dalam proses pengambilan kebijakan dan hanya fokus pada solusi terbaik. Selain bertindak lambat dalam merespon, terburu-buru dalam mengambil keputusan terutama saat krisis akan berisiko salah langkah.

Pendekatan kompetitif memberikan ruang lebih kepada setiap orang untuk menyampaikan ide atau pendapatnya agar didengar oleh pengambil kebijakan. Dengan praktik eksekutif yang memiliki segala akses informasi, biasanya semua orang akan bersaing agar pendapatnya didengar oleh pimpinan. Mereka berusaha untuk menyampaikan informasi aktual dengan cara paling baik. Penyampaian ini berusaha meningkatkan citra diri atau departemennya baik dengan *framing* maupun representasi atas solusi untuk membuat kebijakan. Risiko penyampaian dengan cara kompetitif ini adalah informasi yang parsial atau tidak lengkap bahkan dapat menimbulkan bias. Namun, pemimpin tetap dapat mempertimbangkan setiap sudut pandang yang masuk hingga terbentuk pandangan baru yang lengkap dan seimbang. Distorsi informasi yang diterima pemimpin sangat rendah karena adanya presentasi atau debat terbuka untuk mempertahankan ide, gagasan, maupun pandangan. Dengan demikian, pendekatan kompetitif lebih kepada solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan kompetitif akan sangat bergantung pada kemampuan pemimpin mengelola sumber daya manusia dan keterlibatannya dalam tukar pandangan. Namun, konflik interpersonal dan substansi permasalahan akan cukup tinggi jika beberapa pihak tidak sepakat bahkan mereka akan mementingkan diri sendiri daripada loyalitas dan pelayanan.

Pendekatan kolegial adalah keberagaman pandangan yang diterima oleh pemimpin dengan tetap berusaha menumbuhkan semangat kerja tim dan menyingkirkan sifat kompetisi satu sama lainnya. Setiap individu dapat menyampaikan pandangannya dalam satu forum untuk saling bertukar pandangan dan saling memperdebatkan solusi yang terbaik. Di mana pemimpin dapat terlibat langsung serta menghasilkan proposal kebijakan yang tepat. Pendekatan kolegial memiliki kesulitan untuk membuat keseimbangan pandangan dari perbedaan pendapat, perlu menengahi perbedaan, dan mengembalikan semangat kerja tim. Hal ini juga bergantung bagaimana pemimpin mampu mengatur hubungan interpersonal/antarindividu dalam tim tersebut. Kelebihan pendekatan kolegial adalah distorsi informasi yang rendah serta beragamnya perspektif yang dipresentasikan dan diperdebatkan menjadi satu solusi yang disepakati bersama. Namun, konflik substansi akan menjadi sangat tinggi berdasarkan perbedaan pendapat antarindividu yang menyampaikan gagasannya sedangkan konflik interpersonal dapat dihindari.

Selanjutnya adalah bagaimana intensi para pemangku kebijakan menerima informasi terkait kebijakan yang akan diputuskan. Terdapat tiga model intensi yang melatarbelakangi pengambilan keputusan, di antaranya rasional, organisasional, dan politburo. Model kebijakan rasional berusaha menganalisa bahwa kebijakan yang dibuat oleh satu pembuat keputusan yang rasional. Satu pembuat keputusan yang tunggal ini digambarkan sebagai pemerintah yang bertindak secara rasional berdasarkan kepentingan nasional. Proses pemilihan kebijakan dilakukan dengan mengelaborasi opsi-opsi yang

tersedia, menganalisa konsekuensi dari setiap opsi, dan memilih satu opsi dengan *cost* lebih rendah serta *benefit* lebih besar.

Model proses organisasi digambarkan sebagai kumpulan organisasi dengan kapabilitas dan keahlian masing-masing yang dikoordinasikan secara terkonsentrasi di atas. Setiap organisasi maupun pusat akan memiliki standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman menjalankan organisasi. Kunci dari model proses organisasi adalah pemerintah diibaratkan sebagai konglomerasi dari kumpulan-kumpulan organisasi baik secara sendiri maupun bersama-sama mencapai tujuan (kebijakan) yang akan dijalankan. Secara singkat, model proses organisasi dimulai dari penyampaian pendapat dari setiap organisasi yang memiliki keahlian khusus yang telah mengadaptasi SOP hingga menentukan kebijakan yang layak dipilih.

Model politburo lebih menekankan kepada peran individu dalam lingkaran pemerintah yang berfungsi sebagai penasihat. Peran individu penasihat ini bertanggungjawab mengatur badan atau departemen dengan mandat yang telah diberikan. Setiap badan atau departemen memiliki kepentingan kebijakan yang akan memberikan multiperspektif dari setiap individu dalam instansi tersebut. Individu penasihat juga dapat ditempatkan pada struktur hierarki lembaga atau departemen tersebut. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi pemimpin instansi yang bergantung pada penasihat untuk memberikan informasi, analisis, dan rekomendasi kebijakan. Penasihat dalam model politburo akan membentuk persepsi dan prioritas kebijakan dari organisasi yang dibawah dengan konflik kepentingan pribadi. Untuk itu,

kebijakan akhir yang dibuat adalah hasil kompromi dari setiap hierarki maupun horizontal jabatan dalam organisasi.

Setelah mengetahui interaksi penyampaian informasi dengan tiga model, yakni rasional, organisasional, dan politburo, maka tiap anggota organisasi memiliki interaksi untuk mencapai kesepakatan dalam menentukan kebijakan. Interaksi tersebut berupa model di antaranya: *bargaining* (terdiri dari integratif dan subset), *concurrency*, *deadlock*, dan melakukan persuasi. Model *bargaining* adalah proses tawar-menawar (kompromi) dalam membuat keputusan dengan memberikan pendapat kita dan menerima pendapat orang lain sebagai preferensi pembuatan kebijakan. Model *bargaining* memberikan solusi kompromi atau solusi integratif di mana kebijakan yang dibuat merupakan akomodasi dari seluruh preferensi anggota kelompok. Ciri khas solusi integratif adalah lebih mudah dilakukan dalam suatu kelompok kecil. Hal ini memudahkan negosiasi atau kompromi dalam setiap pembuatan kebijakan. Kelompok yang lebih besar akan cenderung lebih sulit untuk mengakomodasi setiap preferensi anggota kelompok apabila memiliki stratifikasi yang berbeda. Solusi untuk hal tersebut yakni menggunakan subset. Subset terjadi ketika kelompok besar lebih dominan atas preferensi tertentu yang mengharuskan kelompok minoritas setidaknya menyetujui keputusan kelompok.

Concurrency atau persetujuan terjadi ketika semua pihak anggota kelompok menyetujui secara mutlak suatu kebijakan tanpa adanya perdebatan yang berarti. *Concurrency* berlaku dengan tiga alasan yakni: pertama, adanya

solusi yang telah memenuhi prinsip non-kompensasi. Kedua, urgensi kebijakan yang dibuat tidak menyinggung kepentingan nasional. Ketiga, persetujuan terjadi sebagai hasil pemikiran kelompok untuk mengakhiri pencarian opsi terbaik kebijakan. Opsi kebijakan yang dinegosiasikan tidak selalu mencapai persetujuan mutlak namun juga bisa tidak mencapai kesepakatan. Kegagalan kesepakatan dalam membuat kebijakan disebut dengan *deadlock*. *Deadlock* terjadi ketika kegagalan dalam merepresentasikan masalah bersama dengan berbagai opsi-opsi yang tersedia. Bahwa setiap anggota kelompok perlu mempertimbangkan hal lain ketika terjadi *deadlock*. Kegagalan juga dapat terjadi ketika kohesi kelompok minoritas gagal menyediakan alternatif perspektif. Tak hanya itu, kegagalan juga disebabkan adanya distorsi informasi yang disampaikan sehingga gagal merepresentasikan masalah secara akurat.

Kebuntuan atau kegagalan dalam mencapai kesepakatan pembuatan kebijakan perlu untuk mencari solusi alternatif. Solusi alternatifnya adalah kembali kepada opsi *threshold acceptability* rendah dengan melakukan persuasi kepada kelompok yang menolak opsi tersebut. Tujuan akhir dari persuasi kebijakan tidak harus meyakinkan pihak yang menolak bahwa opsi tersebut sebagai yang terbaik. Melainkan persuasi dilakukan agar pihak yang menolak menerima proposal kebijakan.

Tingkat analisa *nation-state* juga menjelaskan jenis-jenis agensi (organisasi) yang memiliki tanggungjawab dalam membuat dan melaksanakan kebijakan. Setiap organisasi dalam birokrasi memiliki pengaruh kausalitas untuk menyampaikan ide-ide kebijakan di luar batas wilayah wewenangnya.

Di antaranya adalah *insulated agency* yang berarti entitas otonom atau independen dalam kerangka birokrasi pemerintah dengan sumber daya dan struktur tersendiri.⁵¹ *Insulated agency* memiliki wewenang untuk mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi dan staf sendiri. Jenis organisasi selanjutnya, yakni *embedded agency* adalah organisasi dengan mandat yang jelas sebagai bagian dari subunit dari entitas organisasi yang lebih besar. *Embedded agency* tidak memiliki sumber daya dan struktur organisasi yang dikelola sendiri sehingga menggantungkan kapabilitas mereka kepada induk organisasi. Konsekuensi dari hal tersebut adalah otonomi yang lebih kecil dan tidak dapat mengembangkan nilai dan budaya organisasi tersendiri.

Tingkat analisa yang ketiga yakni analisis sistem yang berfokus pada komparasi atas reaksi sistem (regional dan internasional) sesuai dengan kekuatan atau sumber daya yang mereka miliki dan bersifat relatif. Kemampuan relatif yang bersifat dinamis tergantung dari upaya mereka mempertahankan kekuatan nasional yang dimiliki agar dipandang dalam sistem internasional. Kemampuan relatif ini lebih dominan pada penguasaan ekonomi, militer, dan teknologi. Barang siapa negara yang memiliki dominasi pada tiga aspek tersebut maka kebijakan luar negerinya akan semakin berpengaruh. Adapun indikator untuk menganalisis sistem internasional yakni perlu mengukur kekuatan (*power*) suatu negara berdasarkan geografis dan populasi.

⁵¹ Ibid, hal 118.

Kekuatan suatu negara dikategorikan sebagai negara super power adalah negara yang dapat memproyeksi kekuatannya secara global. Istilah ini telah menjadi diskursus yang menjelaskan bahwa bukan hanya kekuatan yang menjadi faktor dominan. Namun, kelemahan pun dapat menjadi penting ketika mampu secara substansial untuk diproyeksikan secara global. Selanjutnya, *emerging power* adalah negara yang diproyeksi dapat menjadi rival negara super power. Serta, *developing country* yang berarti memiliki power yang cukup namun belum bisa menyamai kekuatan negara super power dan *emerging power*. *Developing country* umumnya memiliki kelemahan dalam penelitian dan pengembangan teknologi atau industri yang memadai.

Kemampuan atas penguasaan teknologi dan sumber daya ekonomi yang kuat akan memberikan dampak pada alokasi belanja militer suatu negara. Pada tahap ini perlu untuk melihat kemampuan militer suatu negara yang diukur sebagai kemampuan relatif. Kemampuan relatif ini diukur dengan melihat jumlah personil angkatan bersenjata. Selanjutnya, perlu mengidentifikasi anggaran belanja militer dan persenjataan yang dimiliki seperti tank, rudal, pesawat, kapal, dan artileri.⁵² Proporsi atas persenjataan dan alokasi anggaran belanja militer berbeda antarnegara yang telah dipertimbangkan berdasarkan kondisi geografis mereka. Breuning menyebutkan bahwa proporsi ekonomi suatu negara juga berpengaruh dalam alokasi belanja militer.⁵³ Walaupun pemimpin negara tersebut berkuasa

⁵² Ibid, hal 146.

⁵³ Ibid.

menentukan proporsi yang lebih kecil dari ukuran kekayaan ekonomi mereka. Bagi pemimpin negara yang memiliki ukuran ekonomi miskin dan berkembang perlu mengatur strategi untuk mengamankan kepentingan negara mereka. Hal ini perlu dimaksimalkan walau memiliki kemampuan yang terbatas.

Selanjutnya, analisis dilakukan tidak hanya dilakukan dengan mengklasifikasikan negara berdasarkan geografis, populasi, dan militer suatu negara. Analisis juga dilakukan dengan membagi negara yakni negara lemah, negara gagal, *small states*, negara *middle power*, dan negara *great power*. Negara lemah didefinisikan sebagai negara kecil dengan tata kelola pemerintahan dan politik tidak efektif sehingga menjadi lemah. Sedangkan negara gagal adalah negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyat, politik, dan pemerintahannya. *Small states* atau negara kecil didefinisikan sebagai negara dengan kemampuan agak terbatas untuk memberikan pengaruh kepada negara lainnya.⁵⁴ Mereka perlu *survive* dengan memanfaatkan diplomasi dan organisasi internasional di mana mereka akan lebih efektif dalam memaksimalkan sumber daya yang dimiliki. Melalui organisasi internasional mereka akan memberikan pengaruh yang setara untuk kepentingan nasional mereka.

Negara *great power* adalah negara yang berpengaruh secara politik global. Definisi ini terlalu pesimistik untuk menjelaskan negara *great power* yang begitu kompleks atas kekuatan politik, ekonomi, teknologi, dan militer yang memiliki pengaruh secara global. Kehadiran China dan India dianggap

⁵⁴ Ibid, hal 151.

Breuning sebagai *emerging power* dengan geografis yang besar, populasi yang padat, dan cepatnya pertumbuhan ekonomi kedua negara pun belum bisa menyaingi *great power*.⁵⁵ Negara *middle power* adalah negara yang dapat memengaruhi (persuasi) negara lain baik secara bilateral maupun multilateral dan cenderung tidak menggunakan kekuatan militer. *Middle power* memproyeksikan dirinya untuk berkomitmen dalam mengupayakan perdamaian, mengurangi ketidaksetaraan ekonomi, advokasi bantuan kepada negara miskin, dan mempromosikan *sustainable developments*. Negara *middle power* tidak hanya memiliki pengaruh secara internasional namun tentu beberapa dari mereka diperhitungkan pengaruhnya di lingkungan regionalnya. Satu indikator analisis yang menjelaskan suatu negara yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan berpengaruh secara regional disebut *regional power*. Seperti halnya Afrika Selatan, Brazil, Indonesia, India, Iran, Turki, dan Nigeria.⁵⁶ Kedudukan mereka bersifat dinamis tergantung pada pemimpin yang mencitrakan negara mereka sedemikian rupa.

Pendefinisian kekuatan suatu negara cukup rumit untuk dijabarkan dan berisiko menciptakan analisis yang bias atas kekuatan suatu negara. Hal ini terjadi karena beberapa negara memiliki kemampuan yang terbatas dalam memproyeksikan kekuatan atau sumber daya mereka di dunia internasional. Negara-negara tersebut akan merespon berbeda kebijakan luar negeri atau fenomena yang terjadi secara global berdasarkan kekuatan relatif mereka.

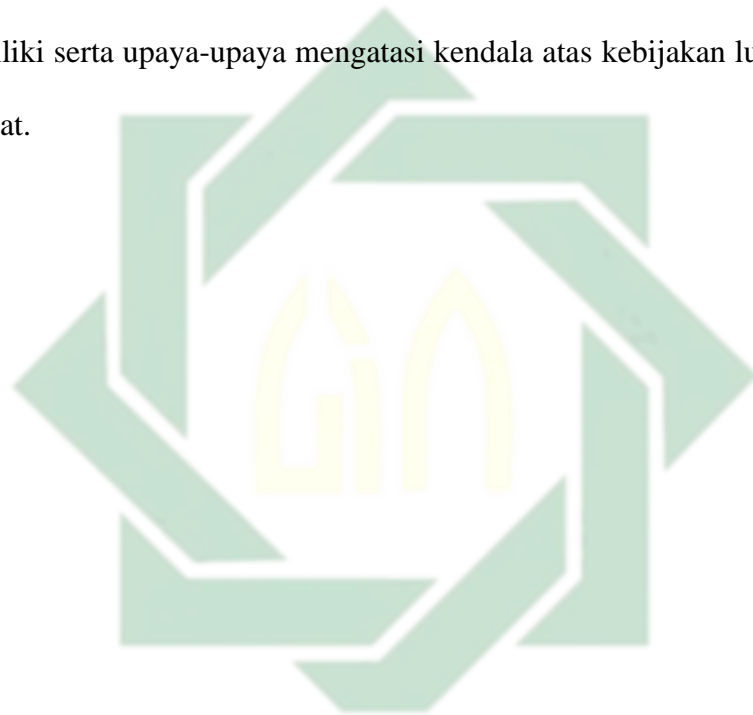
⁵⁵ Ibid, hal 149.

⁵⁶ Ibid.

Kerjasama dilakukan untuk menutupi kelemahan mereka. Kerjasama tersebut dapat berupa aliansi, bantuan, maupun kesepakatan bilateral atau multilateral yang akan berpengaruh kepada independensi mereka. Kebiasaan inilah yang secara tidak sadar dan menjadi lumrah ketika mereka sudah menjadi ketergantungan kepada kekuatan yang lebih besar. Ketergantungan mereka kepada kekuatan yang lebih besar juga akan merembet kepada independensi mereka dalam menentukan arah kebijakan luar negeri.

Ketergantungan atau keterpaksaan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri dapat dikategorikan menjadi empat orientasi arah kebijakan. Pertama, *consensus-oriented* adalah negara yang pemimpinnya cenderung mengikuti kebijakan luar negeri negara besar secara sukarela. Kedua, *compliant foreign policy* adalah negara yang membuat kebijakan luar negeri dipengaruhi oleh kekuatan negara yang lebih besar dan mereka mengikuti alurnya (patuh). Kekuatan yang lebih besar dapat menekan pemimpin negara kecil untuk menyelaraskan kebijakan luar negeri mereka dengan negara besar. Hal ini dapat memiliki preseden buruk ketika pemimpin negara tersebut enggan menyelaraskan kebijakan mereka dengan negara yang memiliki kekuatan lebih besar. Pada tahap ini perlu mengetahui apa latar belakang kepatuhan atas pengaruh kebijakan luar negeri terjadi. Ketiga, *counter-dependent foreign policy* adalah pemimpin negara yang melakukan penolakan terhadap tekanan negara besar dan berusaha mengurangi ketergantungan pada kekuatan yang lebih besar. Keempat, *compensation foreign policy* adalah perbedaan keinginan dengan negara besar untuk tujuan mendapatkan simpati *domestik audience*

dengan cara bertindak melawan pemimpin negara yang lebih kuat. Pemimpin negara-negara dengan orientasi kebijakan luar negeri tersebut akan memiliki tuntutan dan dukungan yang berbeda. Mereka juga akan menghadapi tekanan-tekanan dari negara yang memiliki kekuatan lebih besar. Namun, mereka dapat menentukan pilihan secara rasional untuk menghadapi kemampuan relatif yang dimiliki serta upaya-upaya mengatasi kendala atas kebijakan luar negeri yang dibuat.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

Bab ini akan memaparkan metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini agar membentuk penelitian ilmiah yang sistematis. Metode penelitian adalah instrumen logis dan sistematis dalam melakukan penelitian ilmiah. Tujuan lain dari penggunaan metode penelitian adalah menjawab fokus penelitian atau rumusan masalah dengan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data. Penggunaan teori dan konsep dalam metode penelitian dapat diaplikasikan untuk mendukung penyusunan penelitian yang sistematis. Dengan begitu peneliti mampu memahami topik yang diteliti secara komprehensif.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami makna dari sebuah fenomena/peristiwa dari isu-isu sosial.⁵⁷ Nanang Martono menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bersifat subjektif atau bebas nilai yang disusun melalui interpretasi individu atas realitas sosial yang terjadi untuk menciptakan teori baru melalui himpunan data-data berupa narasi.⁵⁸ Penelitian kualitatif akan memudahkan pembaca untuk memahami argumentasi, maksud, atau motif suatu fenomena sosial yang terjadi. Upaya untuk memahami maksud tersebut dilakukan dengan mengumpulkan informasi-informasi atau yang disebut dengan

⁵⁷ Cresswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication, Inc.

⁵⁸ Martono, N. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (2 ed.). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal 22-25

data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara, *focus group discussion* (FGD), angket, pengamatan, analisis kepustakaan, dan studi kasus.

Penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan penelitian eksplanatif yang berusaha menjelaskan mengapa fenomena sosial dapat terjadi.⁵⁹ Penelitian eksplanatif berusaha untuk mengasosiasikan variabel dalam penelitian sehingga menimbulkan hubungan kausalitas (sebab-akibat). Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif-eksplanatif senada dengan upaya untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel setelah meningkatnya tren industri otomotif berbasis listrik.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokus penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya, Jawa Timur dimana seluruh tahapan penelitian dilakukan dengan *work from home* atau *study from home* akibat dari pandemi COVID-19. Waktu pengerjaan penelitian ini dimulai sejak pascapendaftaran seminar proposal skripsi pada 28 Januari 2022 dan pelaksanaan seminar proposal skripsi pada 14 Februari 2022. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan data primer dan sekunder yang dikumpulkan dari aktivitas penelusuran internet. Angket dan *focus group discussion* (FGD) dengan narasumber dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah terbaru terkait pandemi COVID-19 serta fleksibilitas narasumber dalam menentukan metode angket dan FGD yang akan digunakan baik luring dan daring.

⁵⁹ Ibid, hal 17

C. Tingkat Analisa

Penelitian dalam hubungan internasional mengkaji banyak unsur seperti hubungan negara-negara, bangsa, supranasional, transnasional, dan subnasional yang membentuk tatanan politik dunia. Seiring berjalannya waktu, penelitian hubungan internasional mengalami friksi terkait siapa aktor-aktor dalam penelitian hubungan internasional. Aktor utama hubungan internasional dalam pandangan negara-sentris hanya negara semata. Sedangkan pandangan transnasionalis mengakomodasi aktor-aktor non-negara yang juga berpengaruh dalam hubungan internasional.

Dengan banyaknya aktor dalam hubungan internasional, peneliti memerlukan tingkat analisa untuk memahami lebih lanjut cakupan penelitian yang dilakukan. Mohtar Mas' oed mendefinisikan tingkat analisa adalah upaya penulis untuk menentukan unit analisa (variabel dependen) yang nantinya akan digambarkan, dijelaskan, maupun diramalkan, serta unit eksplanasi (variabel independen) yang dapat memberikan dampak terhadap unit analisa yang diamati.⁶⁰ Tingkat analisa dalam hubungan internasional dalam pandangan Mohtar Mas' oed, yakni memahami tindakan individu, kelompok, *nation-state*, kategorisasi negara, dan sistem internasional. Pada tingkat analisa individu berusaha menjelaskan perilaku pembuat kebijakan seperti halnya kepala negara, kepala pemerintahan, maupun setingkat menteri. Tingkat analisa kelompok akan menjelaskan interaksi

⁶⁰ Mas' oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990. Hal, 40.

tuntutan dan dukungan yang diterima serta upaya mengakomodasi berbagai kepentingan dalam mengambil keputusan.

Pada level *nation-state* menjelaskan keseluruhan unsur-unsur negara yang memengaruhi pengambilan kebijakan. Hal ini memiliki korelasi dalam pandangan negara-sentris yang menyebutkan bahwa negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional. Dengan demikian hubungan internasional adalah keseluruhan unsur-unsur negara yang berinteraksi satu sama lainnya. Unsur-unsur negara berupa rakyat (merupakan kesatuan kelompok-kelompok masyarakat), pemerintahan (lembaga-lembaga negara), wilayah, dan pengakuan. Namun, fokus utama dalam tingkat analisa ini adalah lembaga negara yang menjalankan pemerintahan suatu negara. Selain lembaga negara, analisa juga dilakukan dengan mengamati sistem politik, birokrasi, ekonomi, sejarah, opini publik, dan kondisi sosial-budaya.

Level analisa kategorisasi negara merupakan upaya memahami reaksi berdasarkan pengelompokan negara-negara dengan keunikan tertentu. Misalnya, letak geografis, sejarah/budaya/etnisitas, ekonomi, ideologi, dan aliansi yang saling berpengaruh. Sedangkan level analisa sistem internasional adalah upaya memahami reaksi sistemik pada tatanan global yang interdependen. Pada analisa ini setiap aktor akan saling terpengaruh oleh suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi dan berdampak secara global.

Setelah memahami tingkat analisa dalam penelitian hubungan internasional, penelitian ini akan menggunakan tiga tingkat analisa untuk memahami kebijakan pemerintah Indonesia terkait larangan ekspor bijih nikel setelah meningkatnya tren

industri otomotif berbasis listrik. Tiga tingkat analisa tersebut adalah individu, *nation-state*, dan sistem. Sebelum melangkah melakukan elaborasi dari tiga tingkat analisa dalam penelitian ini, perlu memahami terlebih dahulu subyek penelitian, unit eksplanasi, dan unit analisa. Subjek penelitian adalah spektrum koherensi sumber informasi yang akan memberikan data sesuai fokus penelitian. Subjek penelitian merupakan intensitas bahasan yang dapat meliputi beberapa aktor seperti manusia, benda, maupun institusi di mana pada realita tersebut akan diteliti. Dari pengertian tersebut, subyek penelitian dan unit analisa dalam penelitian ini adalah pemerintah Indonesia dan Presiden Jokowi. Presiden Jokowi sebagai *decision maker* dalam kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dianalisis pada tingkat individu.

Unit eksplanasi adalah unit yang diakui sebagai variabel independen dan segala perilaku atau tindakannya akan diamati.⁶¹ Adanya kehadiran variabel independen maka unit analisa yang akan diamati disebut dengan variabel dependen. Dengan begitu, kebijakan larangan ekspor bijih nikel pemerintah Indonesia sebagai unit eksplanasi. Pemerintah Republik Indonesia, kementerian terkait, dan Presiden Jokowi sebagai unit analisa dalam penelitian ini. Tingkat analisa individu dalam penelitian ini akan difokuskan kepada Presiden Jokowi sebagai *decision maker* larangan ekspor bijih nikel. Tingkat analisa *nation-state* akan memaparkan upaya Pemerintah Indonesia dalam hal ini adalah kementerian terkait yang memiliki peran untuk pemanfaatan nikel nasional. Tingkat analisa pada sistem internasional akan menjelaskan segala hal faktor yang memengaruhi kebijakan dan respon

⁶¹ Ibid, hal 43.

internasional terhadap larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu bagian penting dalam melakukan penelitian yakni pengumpulan data-data yang akan menjawab fokus penelitian. Pengumpulan data pada jenis penelitian kualitatif bersifat fleksibel dan sikap terbuka untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru sesuai realitas lapangan.⁶² Namun, hal tersebut juga berpengaruh pada hasil penelitian di akhir, untuk itu peneliti perlu memiliki sikap kritis dan memahami dinamika isu yang dikaji.

Pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan studi pustaka, data-data daring, angket, dan *focus group discussion* (FGD). Studi pustaka adalah teknik menghimpun data dari berbagai sumber literatur atau kesusastaan, seperti buku, e-book, esai, *commentaries*, kolom, jurnal ilmiah dengan kualifikasi nasional dan internasional, dokumen pendukung, karya ilmiah, artikel, berita, dan laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencarian studi pustaka dapat dilakukan dengan pencarian kata kunci, subjek, artikel ilmiah, *tracking* kutipan dalam sumber ilmiah, bibliografi, indeks, bantuan orang, dan melakukan penyelidikan secara sistematis dari setiap sumber. Sumber-sumber studi pustaka harus berkaitan dengan topik yang diteliti dapat berupa fisik maupun daring. Penggunaan media daring dalam penelitian ini dapat berupa laman berita daring baik nasional dan internasional maupun laman resmi pemerintah Republik Indonesia.

⁶² Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.

Penelitian ini juga akan menggunakan data primer yakni dengan memberikan angket kepada narasumber yang berkompeten. Angket diberikan kepada bapak Sukono, S.H., M.H. selaku Kepala Sub Bidang Mineral dan Batubara Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup pada Kedeputian Bidang Kemaritiman dan Investasi Sekretariat Kabinet RI. Selain itu, data primer juga dihimpun dengan metode FGD bersama ibu Wisnu Wardani, S.H., M.H. selaku Perancang Undang-Undang Muda, ibu Iko Desy Anggraeny, S.H. selaku Sub Koordinator Informasi Hukum dan Humas, bapak Dr. Muhammad Anis, S.T., M.T. selaku Analis Kebijakan Muda, dan ibu Esti Rahayu, S.Sos. selaku Pranata Humas Muda, di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Data sekunder didapatkan dari tautan artikel, berita, keterangan pers, laporan, dan *e-book* yang diberikan oleh Kementerian ESDM.

E. Teknik Analisis Data

Penggunaan teknik analisis data dalam penelitian yang berjudul “Larangan Ekspor Biji Nikel oleh Pemerintah Indonesia setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik” yakni menggunakan teknik analisis data yang diinisiasi oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman memberikan tiga komponen analisis data dalam teknik Model Analisis Interaktif-nya yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tiga komponen tersebut perlu terus dijaga kohesinya dengan topik penelitian beserta komparasinya untuk menentukan preskripsi simpulan penelitian.

Implementasi Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman dalam penelitian ini dimulai sejak tahap kondensasi data. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian seperti buku, e-book, esai, *commentaries*, kolom, jurnal ilmiah dengan kualifikasi nasional dan internasional, dokumen pendukung, karya ilmiah, artikel, berita, dan laman resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Data yang telah terkumpul akan direduksi atau disederhanakan dengan membuat catatan ringkas (memo) dan pengkodean. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyisihkan data yang kurang relevan. Jika data yang terkumpul dirasa belum memperkuat penelitian maka diperbolehkan untuk mencari data sepanjang penelitian tersebut dalam penulisan laporan. Data-data yang dianggap cukup/memadai tersebut dapat ditulis/dilaporkan dalam bentuk narasi untuk dapat membuat simpulan akhir penelitian. Penarikan kesimpulan dalam Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman sebagai jawaban dari rumusan masalah atau fokus penelitian yang tertulis di Bab I.

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk memverifikasi ulang data-data yang telah dikumpulkan agar lebih valid. Data-data yang valid tersebut juga memerlukan evaluasi kredibilitas data sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian ilmiah. Subroto menjelaskan bahwa kredibilitas data dapat dilihat dari tingkat kesahihan (*validitas*) dan keajegan (*reliabilitas*) data tersebut.⁶³ Artinya penelitian ilmiah dikatakan baik, benar, dan dapat

⁶³ Subroto, Edi. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 1992. Dalam Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014. hal 113.

dipertanggungjawabkan. Data tersebut yang akan menjadi unsur pembangun penelitian tersebut valid dan *reliable* untuk dapat diuji dengan teknik yang berbeda. Untuk itu, pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan validitas dan reliabilitas.

1. Validitas

Dalam uji validitas data maka akan digunakan teknik pemeriksaan, di antaranya:

a. Ekstensi Waktu Keterlibatan Peneliti

Hal ini dilakukan apabila peneliti masih memiliki keraguan akan data-data pendukung penelitian belum kuat sehingga peneliti dapat melakukan perpanjangan waktu penelitian. Perpanjangan waktu penelitian tersebut dilakukan secara kolateral sesuai dengan teknik analisis data hingga penulisan laporan penelitian.

b. Memaksimalkan Ketekunan Peneliti

Penelitian kualitatif pada bidang sosial memiliki konsekuensi atas dinamika data yang luas dan berkembang. Peneliti perlu meningkatkan ketekunan dalam pencarian data yang aktual, relevan, dan holistik untuk dapat ditafsirkan menjadi simpulan akhir penelitian. Tak hanya itu, peneliti perlu mawas diri dalam menginterpretasi data dan menghindari subjektivitas peneliti yang nantinya akan berdampak pada objektivitas penelitian.⁶⁴

⁶⁴ Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017. Hal 395.

c. Triangulasi Data

Triangulasi menjadi teknik yang paling umum dalam uji keabsahan data penelitian. Moleong mendefinisikan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data yang bersangkutan.⁶⁵ Sedangkan Subroto berpendapat triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel.⁶⁶ Jenis-jenis triangulasi data sebagai penguji keabsahan data yakni triangulasi sumber, metode, peneliti, dan teori. Dengan begitu, penelitian ini akan menggunakan triangulasi sumber.

Triangulasi sumber adalah upaya peneliti untuk mengumpulkan data dari seluruh sumber yang tersedia dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang berbeda namun relevan. Hal ini bisa dilakukan dengan komparasi hasil studi pustaka dengan wawancara. Kemudian, komparasi pernyataan yang disampaikan di hadapan publik maupun personal. Dan, komparasi atas kondisi, pernyataan, dan perspektif seseorang secara sekuensial.

⁶⁵ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1990. Dalam Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014. Hal

⁶⁶ Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, hal 395.

d. Peninjauan Informan

Peninjauan informan dilakukan untuk mendapatkan harmonisasi pemahaman antara peneliti dan informan/narasumber. Jadi, tahap ini dilakukan ketika peneliti telah memiliki data yang cukup dan akan menyusun laporan penelitian. Peneliti akan mendiskusikan dan berkonsultasi dengan narasumber terkait sublaporan yang sedang disusun. Hal ini bertujuan untuk memberikan validasi dan persetujuan bahwa apa yang ditulis oleh peneliti tidak diragukan lagi keabsahan datanya. Tahap akhir setelah disetujui oleh narasumber yakni peneliti dapat menjadikan hal tersebut sebagai pedoman untuk menarik simpulan penelitian.

e. Totalitas Referensi

Totalitas referensi adalah ketepatan bahan yang digunakan untuk menyesuaikan dan mengevaluasi data-data yang dimiliki. Ini dapat dilakukan dengan berbagai jenis bahan seperti file, dokumen, video YouTube, transkripsi, rekaman, dan tangkapan layar yang berfungsi untuk membandingkan data-data. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber yang ditulis atau dibuat oleh ahli dalam bidangnya. Tujuan akhir dari totalitas referensi adalah bahan yang tersimpan dan terekam tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan analisis dan penafsiran data.

f. Pemeriksaan dan Konsultasi oleh Ahli/Sejawat

Pemeriksaan dan konsultasi oleh ahli/sejawat dilakukan dengan diskusi analitik untuk memperoleh standar keabsahan data. Pemeriksaan dan konsultasi ini berguna untuk peneliti untuk tetap berpegang teguh pada argumentasi utama, bersikap terbuka, dan jujur. Jika terdapat penyelewengan dalam pelaksanaan penelitian, maka peneliti akan memperoleh masukan sebagai eksplanasi dan elaborasi penafsiran.

2. Reliabilitas Data

Reliabilitas data diimplementasikan untuk mendapatkan hasil interpretasi yang sama. Fungsi reliabilitas data adalah untuk meminimalisir kealpaan (*error*) dan anomali (*bias*) baik sebelum, saat, dan setelah penelitian dilakukan. Untuk itu, penelitian diupayakan semaksimal mungkin untuk tetap objektif dengan menghindari bias. Reliabilitas data dapat dilakukan dengan penyusunan *database* dan uraian merinci yang digunakan dalam penelitian.

a. Database

Data-data yang telah terkumpul baik berupa file, hasil rekaman, video YouTube, transkripsi, dokumen, foto, tangkapan layar, gambar, maupun sketsa tetap disimpan hingga kurun waktu tertentu. Ini dilakukan untuk memudahkan verifikasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Adapun *database* yang dimiliki oleh peneliti dapat *dire-check* untuk melihat bias dalam penelitian yang disusun.

b. Uraian Merinci

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diuraikan secara akurat dan jelas mengenai deskripsi konteks berdasarkan lokus dan fenomena dalam penelitian. Maksudnya adalah pelaporan hasil penelitian yang ditulis peneliti benar-benar menyoroti temuan-temuan yang nyata dan sesuai konteks. Syarat melakukan hal ini adalah peneliti perlu memiliki pengetahuan, kemampuan, dan minat yang cukup terkait pembahasan yang dikajinya.

G. Alur Penelitian

Awal perencanaan pelaksanaan penelitian ini bermula dari tahap penyelesaian proposal skripsi. Proposal skripsi direncanakan dan disusun melalui konsultasi bersama dengan dosen wali studi hingga mendapat persetujuan. Persetujuan proposal skripsi digunakan sebagai syarat untuk melakukan seminar proposal sekaligus menguji perencanaan penelitian skripsi. Seminar proposal dilakukan bersama dengan dosen pembimbing dan dosen penguji.

Setelah seminar proposal dilakukan, revisi, dan masukan dari dosen penguji akan menjadi tahap awal pematangan perencanaan pelaksanaan skripsi. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh penulis diiringi dengan pengembangan narasi pada Bab I hingga Bab VII. Tahapan selanjutnya adalah proses pengumpulan data dari beberapa sumber data yang tersedia dan relevan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data yang terkumpul akan diolah, diinterpretasi, dan dirilis dalam bentuk narasi eksplanatif. Hingga tahap akhir penelitian ini yakni konklusi akhir penelitian dan pertanggungjawaban dalam sidang skripsi.

BAB IV

ANALISIS PADA LEVEL INDIVIDU PRESIDEN JOKO

WIDODO DALAM KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH

NIKEL

A. Faktor *Scheme* dan *Presidential Character* Presiden Joko Widodo

Presiden Jokowi merupakan *decision maker* dalam kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Sepanjang tahun 2019 hingga 2022, Presiden Jokowi 35 kali menyampaikan komitmennya untuk menyetop ekspor nikel, hilirisasi industri, dan upaya meningkatkan nilai tambah komoditas tambang. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut diberbagai kesempatan baik forum politik, forum ekonomi, forum pendidikan, dan peresmian pabrik kendaraan listrik serta pengolahan nikel. Presiden Jokowi memberikan gambaran kebiasaan ekspor bahan mentah sama halnya seperti eksploitasi SDA di masa VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*). Hal ini merupakan aspek *scheme* Presiden Jokowi atau representasi masa lalu yang dijadikan acuan untuk melakukan kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan upaya meningkatkan nilai tambah bahan mentah.

“Artinya, yang sejak zaman VOC 400 tahun yang lalu, kita mengirim bahan-bahan mentah, yang kita kirim bahan mentah sampai sekarang bahan mentah, itu yang harus kita setop. Setop, setop, enggak bisa lagi, kita enggak dapat apa-apa.... Oleh sebab itu, 2020 saya sudah sampaikan setop nikel. Enggak boleh ekspor lagi nikel, *nickel ore*, bahan mentah nikel enggak, setop.”⁶⁷

⁶⁷ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Provinsi DKI Jakarta, 1 Maret 2022*. 1 Maret 2022. <https://setkab.go.id/pembukaan- Rapat-pimpinan-tni-dan-polri-tahun-2022-di-mabes-tni-cilangkap-provinsi-dki-jakarta-1-maret-2022/> (diakses Agustus 9, 2022).

Repetisi atas penyampaian kebijakan larangan ekspor bijih nikel di berbagai forum publik oleh Presiden Jokowi hingga 35 kali sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2022 memberikan pemaknaan tersendiri atas kebijakan yang dibuatnya. Repetisi yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan upaya unjuk keberanian dalam membuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Secara eksplisit Presiden Jokowi juga tidak gentar atas upaya pihak-pihak yang menghalangi keberlangsungan kebijakan tersebut. Repetisi ini juga dapat diartikan sebagai membangun persepsi publik terkait larangan ekspor bijih nikel. Presiden Jokowi memberikan isyarat atas kesuksesannya dalam membuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan merasa puas dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang telah berkontribusi positif bagi neraca ekspor Indonesia. Dengan demikian, upaya Presiden Jokowi untuk memberikan perhatian yang besar terhadap larangan ekspor bijih nikel dan merasa puas karena telah memberikan nilai tambah bagi komoditas tambang nikel. Untuk itu, Presiden Jokowi memiliki *presidential character* yang bersifat aktif-positif, maksudnya adalah seorang pemimpin yang telah memberikan perhatian besar atas kebijakan yang dibuatnya dan puas terhadap hasilnya.

“Saya berikan contoh, nikel. Kita ekspor bertahun-tahun nilainya saya ingat 2014 itu USD1,1 *billion*, kira-kira Rp15-an triliun per tahun ekspor bahan mentah. Begitu kita setop, 2017 setop nikel, ekspor di 2021 mencapai Rp300 triliun lebih. Dari Rp15 triliun melompat menjadi Rp300 triliun, itu baru satu komoditi. Tapi kita digugat di WTO oleh Uni Eropa, dibawa ke WTO, digugat. Saya sampaikan kepada mereka, (Silakan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi.)”⁶⁸

⁶⁸ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Pembukaan Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Conference Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 5 Agustus 2022*. 5 Agustus 2022. <https://setkab.go.id/pembukaan-silaturahmi-nasional-persatuan-purnawirawan-tni-ad-ppad-tahun-2022-di-sentul-international->

B. Faktor *Operational Code* Presiden Joko Widodo

Pada aspek kode operasional dengan beberapa pertanyaan yang dapat mengidentifikasi keyakinan fundamental dan filosofis Presiden Jokowi atas kebijakan larangan ekspor yang dibuatnya. Pada aspek pertanyaan “Apa pendekatan terbaik untuk memilih tujuan politik atau tujuan tindakan?”, Presiden Jokowi menginginkan adanya kerjasama dari upaya meminimalisir dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel bagi negara lain. Dimana Presiden Jokowi tetap tegas untuk melarang ekspor bijih nikel, dan Indonesia terbuka untuk bekerjasama dalam meningkatkan nilai tambah dari nikel dengan negara manapun. Harapan Presiden Jokowi dengan kerjasama tersebut dapat memperoleh skema *win-win solutions*.

“Memang kemarin waktu di G20, banyak negara-negara yang menyampaikan kepada saya mengenai nikel itu. Saya sampaikan lho, kita ingin membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di Indonesia, kalau saya buka nikel dan saya kirim *raw material* kita kirim *raw material* dari Indonesia ke Eropa, ke negara-negara lain, yang buka lapangan kerja mereka dong, kita enggak dapat apa-apa. Tapi kalau mau kerja sama, ayo. Kerja sama setengah jadi di Indonesia enggak apa-apa, nanti setengah jadi dikirim ke negaramu, jadikan barang jadi, enggak apa-apa kok, kita terbuka, tapi bikin di sini, invest di sini. Jadi kita enggak menutup diri kok, kita terbuka, kalau kita disuruh kirim bahan mentah terus *ndak, ndak, ndak*, setop. Jangan berpikir Indonesia akan kirimkan barang mentah.”⁶⁹

Aspek kode operasional dengan pertanyaan “Bagaimana tujuan dikejar dengan tindakan yang paling efektif?”. Berdasarkan pernyataan Presiden Jokowi

conference-center-kabupaten-bogor-provinsi-jawa-barat-5-agustus-2022/ (diakses Agustus 12, 2022).

⁶⁹ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Kompas100 CEO Forum 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 18 November 2021*. 18 November 2021. <https://setkab.go.id/kompas100-ceo-forum-2021-dari-istana-negara-provinsi-dki-jakarta-18-november-2021/> (diakses Agustus 12, 2022).

upaya kebijakan larangan ekspor bijih nikel bertujuan untuk membangun *lithium battery* dan industri mobil listrik. Tindakan ini cukup efektif ketika diketahui bahwa potensi nikel Indonesia layak untuk ditingkatkan nilai tambahnya. Peningkatan nilai tambah produk nikel akan dijadikan sebagai *lithium battery* sebagai komponen pendukung kendaraan listrik. Opsi-opsi lain yang dapat akan dilakukan oleh Presiden jika tidak memilih kebijakan larangan ekspor bijih nikel adalah dengan melakukan Program Hilirisasi Industri dengan hanya mengurangi ekspor bahan mentah untuk meningkatkan nilai tambah di sektor industri. Peningkatan nilai tambah dari bijih nikel ini diharapkan menjadi produk Ferronickel adalah 14 kali, dan bila menjadi *billet stainless steel* mencapai 10 kali.⁷⁰

“Misalnya nikel, sudah setop. Kita harus pindahkan ke barang-barang setengah jadi atau barang jadi..... Arahnya ke sana. Karena kita memiliki nikel, ada kobalt, mangan, dan bahan baku lainnya yang bisa dipakai oleh industri dalam rangka membangun *lithium battery*. Dan kita tahu Indonesia adalah memiliki cadangan nikel yang terbesar di dunia, nomor satu di dunia. Ini strategi ini harus kita pakai dalam rangka membangun industri mobil listrik di negara kita. Kita sudah kirim menteri mendekati industri-industri besar mobil di Jepang, di Korea, di Jerman dalam rangka kita mengembangkan *lithium battery*.”⁷¹

Pertanyaan “Apa 'waktu' tindakan terbaik untuk memajukan kepentingan seseorang?” memberikan pemaknaan dari “kapan waktu terbaik dalam membuat keputusan untuk kepentingan nasional?.” Kaitannya dengan kebijakan larangan

⁷⁰ Jawaban kuisisioner yang diisi oleh Sukono, S.H., M.H. tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Pemerintah Indonesia Setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik (29 Juni 2022).

⁷¹ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Peresmian Pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2019, 28 November 2019, di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Provinsi DKI Jakarta*. 2019 November 2019. <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-kompas-100-ceo-forum-tahun-2019-28-november-2019-di-grand-ballroom-hotel-ritz-carlton-kuningan-provinsi-dki-jakarta/> (diakses Agustus 12, 2022).

ekspor adalah kebijakan tersebut dibuat selayaknya untuk kepentingan nasional Indonesia. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel sebagai pemicu dari pembangunan industri baterai listrik dan kendaraan listrik di Indonesia.

“Yang pertama, kita memiliki sumber daya alam yang sangat besar yang bisa kita pakai untuk memicu industrialisasi. Sebagai contoh, yang sekarang sedang dikerjakan misalnya nikel yang akan nantinya dijadikan pemicu untuk industri baterai yang akan digunakan dalam pembangunan industri mobil listrik.”⁷²

Presiden Jokowi memandang perlunya kontinuitas kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini. Bahwa setiap hambatan dalam kebijakan ini masih dapat dinegosiasikan namun dengan tidak mengurangi substansi kebijakan dan kerugian bagi Indonesia sendiri. Seperti halnya gugatan UE ke Indonesia di WTO dilakukan setelah jalan mediasi tidak memberikan solusi dan Presiden Jokowi memberikan instruksi untuk melawan gugatan tersebut. Dalam hal ini, Presiden Jokowi tetap memberikan ruang negosiasi dan diplomasi (harmoni) namun tidak menutup kemungkinan untuk bertindak dengan konfliktual. Sebelum kebijakan larangan ekspor dibuat, Presiden Jokowi telah melakukan kalkulasi terhadap *cost and benefit* kebijakan tersebut. Maka dari itu, *scheme* Presiden Jokowi dengan gambaran eksploitasi VOC menjadikan peran sentral seseorang untuk mengambil keputusan dan menjadi kontrol atas kebijakan yang dibuat.

⁷² Humas Sekretariat Kabinet RI. *Rapat Terbatas mengenai Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 31 Oktober 2019, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta*. 31 Oktober 2019. <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-penyampaian-program-dan-kegiatan-di-bidang-pembangunan-manusia-dan-kebudayaan-31-oktober-2019-di-kantor-presiden-provinsi-dki-jakarta/> (diakses Agustus 14, 2022).

C. Faktor *Leadership Trait Analysis* Presiden Joko Widodo

Pada aspek analisis sifat kepemimpinan di antaranya sikap pemimpin dalam menghadapi hambatan dengan parameter pertama yakni keyakinan atau kemampuan pribadi dalam mengendalikan peristiwa. Presiden Jokowi meyakini bahwa kendali dirinya atas kebijakan yang dibuat adalah tepat. Presiden Jokowi menggunakan kalimat “saya yakin...” dan “saya meyakini...” untuk menggambarkan kendalinya atas kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Maksudnya adalah kebijakan larangan ekspor bijih nikel benar-benar dapat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun defisit transaksi berjalan, dan benar-benar dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas nikel.

“Negara kita Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, dengan potensi yang luar biasa itu **saya yakin** dalam tiga sampai empat tahun ke depan melalui manajemen yang baik, manajemen pengelolaan yang baik, Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel, seperti baterai lithium, baterai listrik, baterai kendaraan listrik.”⁷³

“**Saya meyakini** hanya urusan nikel saja sekarang ini yang dulu kita defisit dengan Tiongkok, **saya yakin** karena nikel dalam tiga tahun ini ekspor kita melompat kurang lebih hampir 280 triliun, melompatnya 280 triliun”⁷⁴

“**Saya meyakini** kalau ini kita lakukan sampai 2023-2024 setop, *gross domestic product* (GDP) kita di tahun 2030 sudah naik tiga kali lipat.”⁷⁵

⁷³ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Groundbreaking Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT. HKML Battery Indonesia, 15 September 2021, di Karawang New Industrial City, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. 15 September 2021.* <https://setkab.go.id/groundbreaking-pabrik-industri-baterai-kendaraan-listrik-pt-hkml-battery-indonesia-15-september-2021-di-karawang-new-industrial-city-kabupaten-karawang-provinsi-jawa-barat/> (diakses Agustus 15, 2022).

⁷⁴ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Peringatan HUT Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tahun 2021, di the Ballroom Djakarta Theater Building, Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 2021. 22 Desember 2021.* <https://setkab.go.id/peringatan-hut-partai-solidaritas-indonesia-psi-tahun-2021-di-the-ballroom-djakarta-theater-building-provinsi-dki-jakarta-22-desember-2021/> (diakses Agustus 15, 2022).

⁷⁵ Ibid.

“Karena sudah milik kita sendiri, mayoritas milik kita, langsung dibangun di Gresik. Nanti kita lihat dari tembaga ini akan di-*smelting* ini akan dapat berapa miliar, kita belum tahu. **Tapi saya meyakini** bisa lipat juga sama, 20 kali yang biasanya kita kirim.”⁷⁶

Parameter kedua, yakni *power* untuk mempertahankan atau memulihkan pengaruh dari pihak lain. Hal ini dapat diinterpretasikan dari sikap kukuh Presiden Jokowi walaupun kebijakan larangan ekspor bijih nikel digugat oleh UE ke WTO. Alat *bargaining power* yang digunakan Presiden Jokowi ialah potensi nikel Indonesia sebagai yang terbesar di dunia. Menjadikan Presiden Jokowi dapat melakukan perlawanan dengan instruksi “.... *Silakan digugat, akan saya hadapi. Indonesia akan hadapi.*”⁷⁷ Selain itu, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa gugatan tersebut bukan suatu masalah “*Meskipun kita memang digugat di WTO, enggak masalah.*”⁷⁸

Indikator kedua dengan melakukan analisis terhadap keterbukaan maupun penerimaan atas informasi yang diterima. Indikator ini terdiri dari kompleksitas konseptual dan *in group bias*. Kompleksitas konseptual adalah distingsi pemimpin dalam mengimajinasikan, menggambarkan, maupun mendiskusikan tempat, kebijakan, dan ide.⁷⁹ Presiden Jokowi memiliki pandangan berbeda dari cara berpikir pemimpin global lainnya dan berpegang teguh padanya. Ketika pemimpin dunia yang lain berusaha untuk membentuk sistem *global supply chains* terkait

⁷⁶ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Pembukaan Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Conference Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 5 Agustus 2022.*

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021, di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, 24 November 2021.* 24 November 2021. <https://setkab.go.id/pertemuan-tahunan-bank-indonesia-tahun-2021-di-grand-ballroom-hotel-fairmont-jakarta-pusat-24-november-2021/> (diakses Agustus 15, 2022).

⁷⁹ Breuning, hal 44.

bahan mentah, Presiden Jokowi tetap berpegang teguh untuk tidak melakukan ekspor bahan mentah. Perbedaan cara pandang Presiden Jokowi dengan pemimpin negara G20 menggambarkan adanya *in group bias* dan rasa tidak percaya kepada pihak lain. Faktor tersebut terjadi akibat adanya anggapan bahwa *global supply chains* yang akan ditandatangani bersama dapat bermanfaat untuk Indonesia. Namun, pertimbangan Presiden Jokowi menolak menandatangani kesepakatan tersebut dikarenakan mengharuskan Indonesia kembali mengekspor bahan mentah. Keteguhan Presiden Jokowi untuk tidak menandatangani kesepakatan terkait *global supply chains* menjelaskan adanya sesuatu yang ditahan untuk kepentingan nasional Indonesia, yakni tetap melarang ekspor bijih nikel dan meningkatkan nilai tambah bahan mentah.

“Kemarin kita di G20, 16 negara sudah kumpul untuk tanda tangan mengenai *global supply chains*. Saya pikir ini apa? Bagus, kita ikut, kita ikut. Begitu baca, waduh ini kita disuruh ekspor bahan mentah lagi ini. Begitu mau masuk ke ruangan, *ndak, ndak, ndak*, kita enggak ikut. Semuanya bubar enggak jadi yang namanya ini. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, semuanya jadi buyar lagi. Karena saya tahu juga ini yang diincar sebenarnya hanya kita saja.”⁸⁰

Dengan berbagai dinamika politik domestik dan internasional yang berpengaruh kepada kebijakan larangan ekspor bijih nikel, Presiden Jokowi tetap konsisten dalam melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang telah direncanakan dengan berbagai program selanjutnya akan diimplementasikan oleh sistem politik di Indonesia. Kebijakan larangan ekspor

⁸⁰ Humas Sekretariat Kabinet RI. *Peringatan HUT Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tahun 2021, di the Ballroom Djakarta Theater Building, Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 2021*. 22 Desember 2021. <https://setkab.go.id/peringatan-hut-partai-solidaritas-indonesia-psi-tahun-2021-di-the-ballroom-djakarta-theater-building-provinsi-dki-jakarta-22-desember-2021/> (diakses Agustus 15, 2022).

bijih nikel akan melewati serangkaian proses politik dan pengambilan kebijakan baik dari level presiden, kementerian, hingga unit kerja di masing-masing kementerian.

Kebijakan yang telah dibuat akan mencapai tahap implementasi ketika seluruh aspek telah dipertimbangkan dengan baik. Aspek-aspek tersebut akan dikalkulasikan *cost and benefit*-nya bagi kepentingan nasional suatu negara. Kepentingan nasional yang dibuat oleh *decision maker* akan selalu bertindak secara rasional. Breuning dengan teori rasionalitas normatif memberikan model untuk menganalisa perilaku pembuat kebijakan yang bertindak secara rasional dan menilai perilaku tersebut (*judgment*).⁸¹ Teori rasionalitas normatif dimulai dari kondisi atau situasi yang dihadapi oleh pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan. Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dilatarbelakangi oleh kewajiban untuk meningkatkan nilai tambah dari kegiatan pertambangan seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, UU No. 11 Tahun 1967, UU No. 4 Tahun 2009, dan kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁸²

Latar belakang lainnya adalah Presiden mengetahui bahwa adanya keterbatasan ketahanan umur cadangan nikel.⁸³ Ketersediaan cadangan nikel yang terbukti yakni berkisar di 0,64 miliar ton biji basah dengan kadar < 1,7% sedangkan

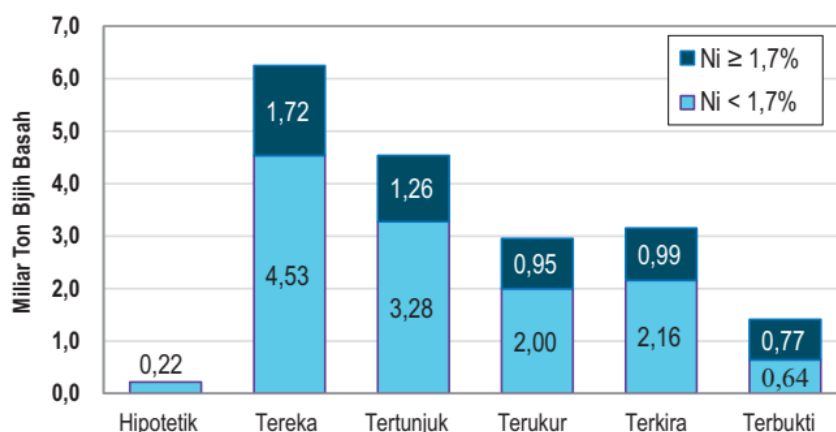
⁸¹ Breuning, hal 59.

⁸² Jawaban kuisisioner yang diisi oleh Sukono, S.H., M.H. tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Pemerintah Indonesia Setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik (29 Juni 2022).

⁸³ Ibid.

kadar nikel $\geq 1,7\%$ yakni sekitar 0,77 miliar ton bijih basah pada data tahun 2020.⁸⁴ Dalam hal larangan ekspor bijih nikel yang berlaku, pemerintah berupaya untuk menjaga umur cadangan nikel serta tetap mempertimbangkan nilai ekonomi dari fasilitas pemurnian. Opsi lainnya adalah terus berupaya melakukan inovasi teknologi dan ToT (*transfer of technology*) pengelolaan nikel dengan kadar rendah. Nikel dengan kadar rendah tersebut akan menjadi cadangan nikel untuk dapat dimurnikan di dalam negeri serta sebagai bahan baku baterai.⁸⁵

Gambar 4. 1 Kategorisasi Sumber Daya dan Cadangan Nikel Tahun 2020



Sumber: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2020.

Tidak hanya itu, opsi lainnya yakni hilirisasi nikel. Tercapainya hilirisasi nikel di Indonesia juga perlu mengingat bahwa cadangan bijih nikel yang diproduksi hanya memiliki umur sekitar 10-15 tahun. Untuk itu, seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas bersama Menteri

⁸⁴ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. “*Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pembangunan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara menuju Indonesia Maju.*” 2021. <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf> (diakses Juli 2022, 1). hal 39.

⁸⁵ Ibid.

Kabinet Indonesia Maju dan memberikan arahan kepada Menteri ESDM untuk melakukan larangan ekspor bijih nikel.

“Kebijakan terkait penerapan setop ekspor untuk sejumlah komoditas agar didesain terlebih dahulu dengan saksama. Jangan sampai pemerintah menghentikan ekspor *ore* nikel yang jumlahnya banyak, tetapi belum memiliki produk lain sebagai pengganti ekspor *ore* nikel yang disetop. Desain tersebut penting agar pemerintah dapat mengantisipasi dampak yang ditimbulkan dari kebijakan setop ekspor tersebut, termasuk harus mencari pengganti berupa FDI yang masuk ke Indonesia agar CAD tidak semakin memburuk sebagaimana disampaikan oleh Menteri Keuangan. Pengganti nilai ekspor yang hilang tersebut sangat penting karena kebijakan setop ekspor tanpa memastikan pengganti berupa FDI yang masuk akan berbahaya bagi CAD”.⁸⁶

Seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel perlu dilakukan berbagai kalkulasi mengenai dampak kebijakan. Tentunya kalkulasi tersebut bertujuan untuk mengetahui *cost and benefit* dari kebijakan yang dibuat.

D. Faktor *Advisory System* Presiden Joko Widodo

Masukan-masukan dari orang di sekeliling Presiden Jokowi tidak menutup kemungkinan akan memengaruhi Presiden atas suatu kebijakan yang dipilihnya. Breuning juga menjelaskan sistem penasihat berpengaruh dalam pengambilan kebijakan luar negeri yakni perseorangan, kelompok, maupun lembaga.⁸⁷ Kesamaan dan cara pandang akan memberikan interpretasi yang sama dalam mendefinisikan suatu masalah. Beberapa pemimpin memiliki gaya tersendiri dalam menerima informasi terkait pengambilan kebijakan. Di antaranya pemimpin dapat

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Breuning, hal 12.

secara independen atau pun mendengar masukan dan wawasan dari penasihat kepercayaan dalam menangani masalah.

Sama halnya dengan Presiden Jokowi yang sering mengandalkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Panjaitan di berbagai urusan termasuk nikel. Menteri Luhut pasang badan Ketika kebijakan karangan ekspor bijih nikel Indonesia digugur oleh Uni Eropa ke WTO. Menteri Luhut menyampaikan bahwa “*Jangan pernah (biarkan) negara mana pun mendikte kebijakan Indonesia.*”⁸⁸ Dalam rangka menyukseskan hilirisasi nikel Indonesia, Menteri Luhut juga diutus oleh Presiden Jokowi untuk bertemu CEO Tesla, Elon Musk. Tujuannya adalah Tesla dapat membeli nikel Indonesia untuk digunakan sebagai pendukung baterai lithium.⁸⁹

Dalam kanal YouTube siniar Deddy Corbuzier, Menteri Luhut memberikan masukan terkait untung dan rugi dari opsi kebijakan.⁹⁰ Namun, keputusan terakhir berada di tangan Presiden Jokowi. Dalam siniar tersebut, Menteri Luhut juga memberikan beberapa saran kepada Presiden Jokowi terkait penanganan COVID-19. Hal ini membuktikan bahwa adanya kedekatan antara Menteri Luhut dengan Presiden Jokowi. Menteri Luhut juga mengklaim bahwa permintaan saran dan masukan Presiden kepada dirinya kemungkinan karena lebih senior dari segi usia dan pengalaman.

⁸⁸ Iswara, Made Anthony. *Luhut defends nickel export ban amid EU complaints*. 18 Desember 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/18/luhut-defends-nickel-export-ban-amid-eu-complaints.html> (diakses September 12, 2022).

⁸⁹ CNN Indonesia. *Luhut Klaim Tesla Tekan Kontrak Pembelian Nikel RI Senilai Rp74,5 T. 8 Agustus 2022*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220808141017-92-831731/luhut-klaim-tesla-tekan-kontrak-pembelian-nikel-ri-senilai-rp745-t> (diakses September 12, 2022).

⁹⁰ Panjaitan, Luhut B., wawancara oleh Deddy Corbuzier. *JOKOWI 3 PERIODE!?! GIMANA KOMEN KALIAN?.. Luhut Binsar Pandjaitan - Deddy Corbuzier Podcast* (11 Maret 2022).

Ben Bland menyebutkan bahwa kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Luhut telah terjalin sejak 2007 ketika keduanya mendirikan perusahaan pengolahan kayu.⁹¹ Menteri Luhut diberi kepercayaan penuh oleh Presiden Jokowi dengan berbagai jabatan publik yang diembannya. Setidaknya Menteri Luhut menjabat 13 posisi sebagai ketua maupun wakil ketua berbagai lembaga pemerintah serta Menteri Ad Interim atas perintah presiden.⁹² Bahkan Presiden Jokowi rela mengeluarkan Perpres untuk menambahkan wewenang kementerian yang dijabatnya.

Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres yang diterbitkan pada 2019 dengan nomor 92 tentang Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi. Bahwa wewenang investasi yang lekat dengan perekonomian disandangkan oleh Presiden Jokowi kepada Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman yang dijabat oleh Menteri Luhut. Berdasarkan banyaknya jabatan yang diemban oleh Menteri Luhut dan kesediaan Presiden untuk menerbitkan Perpres tersebut. Hal ini mengindikasikan kepercayaan presiden kepada Menteri Luhut begitu besar dengan artian pengaruh Menteri Luhut dapat mengalahkan posisi dan pengaruh Wakil Presiden.

Sebagai kepercayaan Presiden Jokowi, Menteri Luhut juga sering mendampingi Presiden Jokowi baik di dalam dan luar negeri. Menteri Luhut juga

⁹¹ Bland, Ben. *Man of contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia*. Pertama. Australia: Penguin Random House Australia, 2021.

⁹² Wibisono, Gunawan. *Sangat Dipercaya, Luhut Pandjaitan Pegang 14 Jabatan Selama Era Jokowi*. Disunting oleh Ilham Safutra. 9 April 2022. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/04/2022/sangat-dipercaya-luhut-pandjaitan-pegang-14-jabatan-selama-era-jokowi/> (diakses Juli 10, 2022).

melakukan diplomasi dengan berbagai tokoh penting dunia untuk menarik investasi mereka ke Indonesia. Menteri Luhut menemui Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 2020 atas perintah Presiden Jokowi untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan.⁹³ Pertemuan Menteri Luhut dengan Presiden Trump didampingi oleh Duta Besar Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi. Pertemuan tersebut menjadikannya sebagai Menteri Indonesia pertama yang mengunjungi *White House* empat kali dalam kurun waktu tiga hari. Menteri Luhut juga bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pembukaan *China International Import Expo (CIIE)* pada 2019.⁹⁴ Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luhut meminta kepada Xi Jinping untuk menghapus bea masuk baja Indonesia ke Tiongkok.

Selain itu, dalam kanal YouTube siniar Deddy Corbuzier, Menteri Luhut juga mengakui kedekatan personal dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammad bin Salman (MBS). Kedekatan personal Menteri Luhut dengan MBS dilakukan tanpa perlu melakukan pertemuan diplomatik. Kedekatan tersebut bahkan dilakukan melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. MBS menganggap Menteri Luhut sebagai “*you are a true friend to Saudi Arabia and to me personally.*”⁹⁵ Dalam siniar tersebut, Menteri Luhut juga mengakui kedekatannya bersama Presiden Persatuan Emirat Arab (UEA) Mohammed bin Zayed Al Nahyan

⁹³ Arbar, Thea Fathanah. *Cerita Misi Menko Luhut ke AS: Ketemu Trump, Bawa Rp 10,5 T.* 19 November 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201119121112-4-203013/cerita-misi-menko-luhut-ke-as-ketemu-trump-bawa-rp-105-t> (diakses Juli 11, 2022).

⁹⁴ Iskana, Febrina Ratna. *Bertemu Xi Jinping, Luhut Minta Tiongkok Hapus Bea Masuk Produk Baja.* 6 November 2019. <https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5e9a4e555be93/bertemu-xi-jinping-luhut-minta-tiongkok-hapus-bea-masuk-produk-baja> (diakses Juli 11, 2022).

⁹⁵ Panjaitan, Luhut B., wawancara oleh Deddy Corbuzier.

termasuk juga Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Penunjukan Menteri Luhut untuk bertemu dengan berbagai tokoh penting dunia menunjukkan kepercayaan yang tinggi Presiden Jokowi sebagai utusan presiden. Pertemuan-pertemuan tersebut yang seharusnya dapat dijalankan oleh menteri urusan luar negeri atau perekonomian.

Noto Suoneto dalam artikelnya di *The Diplomat* menyampaikan bahwa kehadiran Menteri Luhut yang selalu ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjalankan diplomasi ekonomi.⁹⁶ Setidaknya terdapat tiga Menteri kepercayaan Presiden Jokowi dalam melaksanakan politik luar negeri dan diplomasi Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menkomarves Luhut dipercaya presiden untuk menjalankan diplomasi ekonomi, sedangkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjalankan diplomasi pertahanan. Ketiga menteri tersebut membantu Presiden Jokowi dalam mengelola diplomasi Indonesia untuk mendapat atensi internasional dan memuluskan kepentingan nasional Indonesia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁹⁶ Suoneto, Noto. *How Prabowo Subianto Has Helped Shape Indonesia's Foreign Policy*. 10 Desember 2021. <https://thediplomat.com/2021/12/how-prabowo-subianto-has-helped-shape-indonesias-foreign-policy/> (diakses September 12, 2022).

BAB V

ANALISIS PADA LEVEL NEGARA DALAM KEBIJAKAN

LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL

Latar belakang larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia merupakan amanat konstitusi yang mengharuskan pengolahan dan pemurnian dilakukan di dalam negeri. Kementerian ESDM RI mengkonfirmasi bahwa seluruh larangan ekspor *raw materials* bahan tambang berakar pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.⁹⁷ Setelah lima dekade dan berbagai regulasi dikeluarkan seperti UU No. 4 Tahun 2009, UU No. 3 Tahun 2020, serta berbagai peraturan menteri, pada 1 Januari 2020 larangan ekspor terhadap bijih nikel diberlakukan.

Strategi pemerintah dalam memanfaatkan larangan ekspor bijih nikel juga dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. RPJMN sendiri dipandang perlu dalam mengimplementasikan strategi pembangunan yang memiliki nilai kebermanfaatannya secara nasional, termasuk hilirisasi sumber daya mineral. Pemerintah Indonesia melalui RPJMN 2020-2024 menjadikan nikel sebagai proyek prioritas investasi BUMN untuk merealisasikan Prioritas Nasional I. Nikel masuk ke dalam *major project* Kawasan Industri Prioritas dan Smelter dengan melakukan pembangunan smelter (RKEF) dan

⁹⁷ Wardani, Wisnu, Iko Desy Anggraeni, Muhammad Anis, dan Esti Rahayu, FGD bersama Penulis. Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Pemerintah Indonesia (22 Agustus 2022).

pengolahan pemurnian nikel dan kobalt (HPAL).⁹⁸ Pemerintah juga menetapkan pembangunan kawasan industri terintegrasi untuk kendaraan listrik di Batang, Jawa Tengah sebagai program prioritas nasional.⁹⁹

Larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia pada saat meningkatnya tren industri otomotif berbasis listrik telah menjadi problema tersendiri dalam rantai pasok global. Padahal Indonesia harusnya mampu memanfaatkan tren tersebut untuk meningkatkan ekspornya ke negara yang membutuhkan nikel. Namun, pemerintah Indonesia memiliki faktor tersendiri untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Peneliti akan menjelaskan beberapa faktor yang berkaitan dengan intensi pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

A. Potensi Nikel Indonesia

Indonesia memiliki sumber daya nikel sebesar 143 juta ton dan cadangan nikel sebesar 49 juta ton, menjadi yang terbesar di dunia. Perhitungan cadangan nikel Indonesia menambahkan nikel lamonite atau nikel berkadar rendah sehingga mampu menambah jumlah cadangan nikel Indonesia. Nikel di Indonesia rata-rata memiliki material logam ikutan seperti halnya besi, kobalt, serta material logam ikutan lainnya yang terlapor sebesar 25%. Hal ini menjadi nilai tambah komoditas mineral Indonesia jika ditambah dengan mineral ikutan lainnya. Sementara itu, cadangan nikel dunia berkisar 139.4 juta ton sementara cadangan nikel Indonesia

⁹⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022: Batang Tubuh dan Lampiran I*. Jakarta, 2021. Hal 76.

⁹⁹ Ibid.

memiliki persentase paling besar yakni sekitar 52%. Selain memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, Indonesia juga memegang rekor produksi tahunan dengan estimasi mencapai 1 juta ton di tahun 2021.

Tabel 5. 1 Produksi Nikel Global Tahun 2020-2021

Negara	Produksi		Cadangan
	2020	2021	
Australia	169.000	160.000	21.000.000
Brazil	77.100	100.000	16.000.000
Kanada	167.000	130.000	2.000.000
China	120.000	120.000	2.800.000
Indonesia	771.000	1.000.000	21.000.000
New Caledonia	200.000	190.000	N/A
Filipina	334.000	370.000	4.800.000
Rusia	283.000	250.000	7.500.000
Amerika Serikat	16.700	18.000	340.000
Negara lain	373.000	410.000	20.000.000
Total	2.510.000	2.700.000	>95.000.000

Sumber: U.S. Geological Survey. *Mineral Commodity Summaries*. Commodity Statistics and Information, National Minerals Information Center, Virginia: U.S. Geological Survey, 2022, 202.

Potensi pemanfaatan nikel yang begitu besar menjadikan pemerintah Indonesia melalui Kementerian ESDM memberikan KK/IUP/IUPK kepada badan usaha untuk melakukan eksplorasi nikel. Tercatat pertahun 2021, badan usaha yang melakukan eksplorasi tambang nikel di Indonesia sekitar 337 KK/IUP/IUPK yang menjadikan nikel sebagai bahan tambang paling banyak dikelola setelah timah.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. “*Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2021*.” Disunting oleh Koordinator Mineral, Koordinator Batubara, dan Koordinator Panas Bumi. Januari 2022.

Sebaran KK/IUP/IUPK dan sumber daya nikel beserta cadangannya ini tersebar di beberapa daerah di Aceh, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua (**Lihat Tabel 5.2**). Namun, pulau Sulawesi menjadi yang terbanyak KK/IUP/IUPK karena memiliki sumber daya nikel terbesar di Indonesia.

Terdapat 240 IUP – Operasi Produksi pertahun 2020 yang beroperasi mengolah nikel di Pulau Sulawesi terdiri dari 81 IUP di Sulawesi Tengah, 155 IUP di Sulawesi Tenggara, dan 4 IUP di Sulawesi Selatan.¹⁰¹ Di provinsi Maluku dan Maluku Utara masing-masing terdiri dari 2 dan 43 IUP sedangkan di pulau Papua terdiri dari 4 IUP di Papua Barat dan 1 IUP di provinsi Papua. Selain itu, fasilitas pemurnian nikel di Indonesia terdiri 11 smelter serta 4 kawasan industri. Adapun jenis pabrik pengolahan dan pemurnian nikel yang beroperasi di Indonesia didominasi oleh 27 pabrik berteknologi piromelurgi dan 2 pabrik yang menggunakan teknologi hidrometalurgi dengan sistem produksi berupa HPAL (*High Pressure Acid Leaching*).¹⁰²

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

<http://psdg.geologi.esdm.go.id/images/stories/2022/Buku%20Neraca%202021%2007-04-2022.pdf> (diakses Mei 27, 2022).

¹⁰¹ Lelono, Eko Budi. “*Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia.*” Badan Geologi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Potensi Nikel Indonesia*. Bandung, 2020.

¹⁰² Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. Hal 36.

Tabel 5. 2 Sebaran Sumber Daya dan Cadangan Nikel Per Provinsi Tahun 2021

PROVINSI	JUMLAH LOKASI	SUMBER DAYA (TON)								CADANGAN (TON)				TOTAL SUMBER DAYA (TON)		TOTAL CADANGAN (TON)	
		HIPOTETIK		TEREKA		TERTUNJUK		TERUKUR		TERKIRA		TERBUKTI					
		BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM	BIJIH	LOGAM
Aceh	1	0	0	8.295.040	2.058.299	0	0	0	0	0	0	0	0	8.295.040	2.058.299	0	0
Lampung	3	2.413.437	295,023	8,000	5,819	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	5,819	0	0
Jawa Barat	1	0	0	500,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	225,000	0	0
Kalimantan Selatan	12	0	0	212.523.157	13.329.043	186.498.137	60.384.781	185.925.533	69.724.502	136.338.391	55.467.929	153.841.144	51.174.724	584.946.827	143.438.326	290.179.535	106.642.652
Sulawesi Selatan	6	0	0	390.525.544	187.948.110	17.969.023	4.993.626	4.540.625	685,307	2.565.339	582,586	2.900.156	605,316	413.035.192	193.627.044	5.465.495	1.187.902
Sulawesi Tenggara	45	110.300.000	19.752.943	546.320.119	80.602.435	437.872.106	82.439.823	707.982.489	152.479.683	150.038.225	25.520.909	68.025.143	12.440.665	1.692.174.714	315.521.941	218.063.368	37.961.574
Sulawesi Tengah	26	0	0	209.205.043	32.793.145	163.601.970	28.522.383	142.010.630	21.160.872	92.240.362	13.952.824	98.131.966	15.504.710	514.817.644	82.476.400	190.372.328	29.457.534
Maluku Utara	25	0	0	870.020.628	147.849.341	530.464.830	97.966.954	682.227.496	122.932.650	350.448.926	44.979.136	260.175.832	36.716.126	2.082.712.954	368.748.945	610.624.758	81.695.262
Maluku	1	0	0	833.703.503	0	694.752.919	0	365.659.431	0	123.694.640	51.989.180	24.125.130	7.674.428	1.894.115.853	0	147.819.770	59.663.607
Papua Barat	13	0	0	352.130.000	33.368.941	91.680.000	1.344.151	71.388.000	12.618.763	58.930.000	786,024	10.740.000	138,325	515.198.000	47.331.855	69.670.000	924,349
Papua	5	0	0	0	0	0	0	40733000	1075770,1	0	0	0	0	40.733.000	10.757.770	0	0
Total	138	112.713.437	20.047.966	3.423.231.034	498.180.134	2.122.838.985	275.651.718	2.200.467.204	390.359.548	914.255.883	193.278.588	617.939.371	124.254.292	7.746.537.224	1.164.191.400	1.532.195.254	317.532.880

Sumber: Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. "Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2021." Disunting oleh Koordinator Mineral, Koordinator Batubara dan Koordinator Panas Bumi. Januari 2022. <http://psdg.geologi.esdm.go.id/images/stories/2022/Buku%20Neraca%202021%2007-04-2022.pdf> (diakses Mei 27, 2022).

B. Hilirisasi Industri Nasional

Undang-Undang tentang minerba dan RPJMN tahun 2020-2024 menjadi landasan pemerintah dalam melakukan hilirisasi mineral. Hal tersebut kemudian menjadi rancangan teknokratik kebijakan larangan ekspor bijih nikel untuk memperoleh nilai tambah. Larangan ekspor ini menjadi tujuan untuk menyiapkan bahan baku industri dan berusaha mengamankan ketersediaan cadangan bijih nikel.¹⁰³ Tujuan tersebut nantinya menjadi satu kesatuan rantai pasok dalam memenuhi kebutuhan industri nasional. Pemanfaatan bahan mentah mineral akan menjadi prioritas utama pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah melalui program Hilirisasi Industri Nasional.

Hilirisasi Industri Nasional telah menjadi program pemerintah sejak tahun 2010. Hilirisasi Industri Nasional adalah strategi dalam menciptakan nilai tambah bahan baku atau komoditas yang biasanya diekspor mentah tanpa diolah.¹⁰⁴ Dengan adanya program ini, bahan baku tersebut tidak akan diekspor keseluruhan melainkan diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Program Hilirisasi Industri Nasional merupakan implementasi dari Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara industrial yang tangguh, kuat, berkeadilan, sehat, memiliki daya saing, dan berbasis inovasi

¹⁰³ Wardani, Wisnu, Iko Desy Anggraeni, Muhammad Anis, dan Esti Rahayu, FGD bersama Penulis. Larangan Ekspor Bijih Nikel Oleh Pemerintah Indonesia (22 Agustus 2022).

¹⁰⁴ Kementerian Investasi/BKPM. *Pemerintah Genjot Investasi untuk Memperkuat Hilirisasi Industri*. 2022. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/pemerintah-genjot-investasi-untuk-memperkuat-hilirisasi-industri> (diakses Juli 19, 2022).

dan teknologi.¹⁰⁵ Tujuan tersebut diarahkan untuk dapat tercapai pada tahun 2035 dan dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Arah dari Pembangunan Industri Nasional adalah untuk meningkatkan kontribusi industri pada PDB hingga 30% pada tahun 2035. Dominasi pasar domestik, meningkatkan ekspor, dan mengurangi pada dependensi impor bahan baku, bahan substitusi, dan modal. Pembangunan Industri Nasional dengan pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi. Pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi yang mampu menyerap tenaga kerja berkompeten pada sektor industri. Pembentukan industrialisasi atas industri hulu dan industri antara berbasis SDA guna pemerataan industri nasional dan tidak bersifat Jawa-sentris. Pemerataan industri yang berdampak pada gairah industri kecil akan turut berkontribusi pada pertumbuhan industri nasional.¹⁰⁶

Arah Pembangunan Industri Nasional dilakukan secara bertahap pada 10 sektor industri prioritas. Industri prioritas tersebut dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yakni industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Industri andalan merupakan payung dari sektor industri pangan, farmasi, kosmetik, alat kesehatan, tekstil, kulit, alas kaki, aneka, alat transportasi, elektronika, telematika, dan pembangkit energi.¹⁰⁷ Industri barang modal, komponen, bahan substitusi dan jasa industri merupakan turunan dari industri pendukung.¹⁰⁸ Industri hulu agro, logam dasar, bahan galian bukan logam, dan

¹⁰⁵ Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian RI. *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035*. Jakarta: Kementerian Perindustrian RI, 2015.

¹⁰⁶ Ibid, hal 19.

¹⁰⁷ Ibid, hal 25.

¹⁰⁸ Ibid.

kimia dasar seperti migas dan batubara merupakan turunan dari industri hulu.¹⁰⁹ Industri hulu diimplementasikan dalam Tahap I pada rentang tahun 2015-2019 melalui upaya meningkatkan *value-added* SDA. Tahap II diimplementasikan pada rentang tahun 2020-2024 melalui pencapaian atas keunggulan kompetitif dengan penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi. Fase terakhir dengan rentang waktu 10 tahun, Tahap III dari tahun 2025 hingga 2035 merupakan implementasi akhir dari tujuan mewujudkan Indonesia sebagai negara industri tangguh.¹¹⁰

Salah satu realisasi hilirisasi industri adalah menciptakan nilai tambah atas barang tambang nikel. Sebagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam mewujudkan program tersebut, maka pemerintah melakukan pengendalian atas ekspor bahan mentah dan sumber energi.¹¹¹ Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan *input* dua aspek tersebut bagi industri nasional. Program tersebut dicanangkan oleh pemerintah akan menyerap produksi nikel nasional. Nikel tersebut akan diolah pada sektor industri baja tahan karat dengan kapasitas produksi hingga mencapai 2,62 juta ton baja (seri-300) dan 60 ribu ton baja (seri-200).¹¹²

Dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035, komoditas barang tambang nikel akan akan dikembangkan melalui tiga

¹⁰⁹ Ibid.

¹¹⁰ Ibid, hal 20.

¹¹¹ Ibid, hal 18.

¹¹² Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. “*Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pembangunan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara menuju Indonesia Maju.*” Hal 3.

tahap.¹¹³ Tahap pertama pada tahun 2015-2019 yang akan dikembangkan ke dalam industri pengolahan dan pemurnian Nikel Hidroksida, FeNi sponge, Luppen FeNi, dan Nugget FeNi. Tahap kedua pada tahun 2020-2024 nikel akan dikembangkan ke industri *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP), *Mixed Sulfide Precipitate* (MSP), dan logam nikel. Dan tahap ketiga tahun 2025-2035 nikel dikembangkan ke dalam industri Nikel Elektrolit, Nikel Sulfat, dan Nikel Klorida. Pemenuhan kebutuhan baku industri nasional diproyeksikan untuk bahan tambang nikel sekitar 17 juta ton/tahun pada 2025-2035. Namun, kapasitas produksi tahunan pada 2025-2035 hanya 0,30 juta ton/tahun.

Program Hilirisasi Industri Nasional terutama pada sektor pertambangan juga turut serta berkontribusi dalam perekonomian nasional. Kegiatan di hulu dan hilir industri pertambangan akan memberikan *multiplier effect* secara langsung dan tidak langsung bagi ditingkat makro dan mikro ekonomi. Di antaranya adalah meningkatnya penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi nasional akibat dari hilirisasi industri. Pajak yang diterima diantaranya PPh, PPn, bea ekspor, hingga Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pertumbuhan ekonomi yang diterima akibat dari adanya *capital inflow* investasi dalam negeri dengan hasil meningkatnya nilai tambah dan nilai rantai pasok produksi.

1. Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Ekonomi

Selain menciptakan nilai tambah pada bahan baku, program Hilirisasi Industri Nasional turut berkontribusi dalam sumbangan

¹¹³ Ibid, hal 45.

penerimaan negara. Sumbangan tersebut dipungut melalui pajak, bea, iuran tetap (*land rent*), dan royalti. Pajak yang diterima dari industri pada 2017 mencapai Rp224,95 triliun dengan rincian kontribusi terbesar dari sektor perdagangan yang mencapai Rp134,74 triliun.¹¹⁴ Industri yang dibangun memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan industri tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melainkan pajak yang diterima oleh negara meningkat. Industri memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional dalam setiap pergerakan produksi, distribusi, hingga menuju konsumen.

Dengan adanya Program Hilirisasi Industri Nasional, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan industri non-migas 10,5 % pada tahun 2035. Nantinya, pertumbuhan sektor industri nonmigas diharapkan mampu berkontribusi kepada Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% pada tahun 2035.¹¹⁵ Pascapandemi COVID-19 kontribusi industri terhadap PDB meningkat pesat dari Rp 2.760,43 triliun menjadi Rp 2.946,9 triliun.¹¹⁶ Dengan begitu konsistensi dan peningkatan kontribusi industri kepada PDB perlu tetap diperhatikan hingga target pada tahun

¹¹⁴ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Selain Kontributor Terbesar PDB, Industri Jadi Penyector Pajak Tertinggi*. 29 Oktober 2017. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18341/Selain-Kontributor-Terbesar-PDB,-Industri-Jadi-Penyector-Pajak-Tertinggi> (diakses Agustus 1, 2022).

¹¹⁵ Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian RI, *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035*. hal 19.

¹¹⁶ Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Industri Manufaktur Indonesia Semakin Ekspansif*. 10 Februari 2022. <https://kemenperin.go.id/artikel/23125/Industri-Manufaktur-Indonesia-Semakin-Ekspansif#:~:text=Sejak%202010%2C%20sektor%20industri%20terus,Rp2.760%2C43%20Triliun.> (diakses Agustus 2, 2022).

2035 tercapai. Kontribusi kepada PDB dari sektor industri akan nihil tercapai jika kuantitas ekspor masih rendah.

Kontribusi hilirisasi industri terhadap PDB akan dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan dua langkah, yakni meningkatkan ekspor dan menurunkan kuantitas impor. Pemerintah Indonesia menargetkan ekspor industri tahun 2035 mencapai 78,4% dari berbagai sektor. Ekspor tersebut akan berkontribusi positif kepada perekonomian dan Neraca Perdagangan Indonesia. Per tahun 2021 ekspor manufaktur telah berkontribusi sebesar 76,49% dari total ekspor nasional.¹¹⁷ Upaya lainnya adalah menurunkan impor bahan baku hingga 20% pada tahun 2035. Dua langkah ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan devisa negara akibat dari surplus neraca perdagangan

2. Perluasan Lapangan Kerja

Program Hilirisasi Industri Nasional juga akan menciptakan lapangan kerja baru. Hal ini diakibatkan kebutuhan perusahaan akan pekerja dalam menjalankan aktivitas produksi pada produk turunan nikel. Data 2015 menunjukkan pada produk turunan logam termasuk nikel memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi mencapai 6,53%.¹¹⁸ Hal ini juga diiringi dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang bergerak pada industri logam. Peningkatan tersebut berkontribusi dalam terserapnya

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian. “*Laporan Utama: Mewujudkan Hilirisasi Industri Berbasis SDA.*” Dalam *Mewujudkan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam*, 7. Jakarta: Kementerian Perindustrian, 2016.

430.000 tenaga kerja pada 2015 yang meningkat daripada tahun sebelumnya yang berjumlah 342.000 orang.

Tidak hanya itu, lapangan pekerjaan dari pengolahan dan pemurnian nikel turut menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Tenaga kerja profesional telah terserap sebesar 21.266 orang dalam pembangunan smelter nikel dengan komposisi Tenaga Kerja Asing (TKA) mencapai 13% pada 2019.¹¹⁹ Indonesia masih memiliki ketersediaan atas lulusan dari berbagai program studi yang berkaitan dengan pertambangan. Di antaranya Teknik Pertambangan, Teknik Metalurgi, Material & Kimia, Teknik Geofisika, dan Teknik Geologi dengan jumlah lulusan sebanyak 23.202 berdasarkan data Ristekdikti tahun 2019.¹²⁰ Terserapnya para pekerja juga berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran nasional.

Proyeksi penyerapan tenaga kerja pada pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Sulawesi Tenggara mencapai 65.440 pada 2017. Penyerapan tersebut dirincikan dengan pembagian atas 34.375 orang pada bekerja pada smelter dan 31.065 orang pada sektor pertambangan.¹²¹ Pada 2017 tercatat 32 proyek smelter di Indonesia turut mendukung program Hilirisasi Industri Nasional. Provinsi Sulawesi Tengah dengan

¹¹⁹ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. “*Booklet Tambang Nikel 2020: Peluang Investasi Nikel di Indonesia.*”

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ Prasetyo, Bambang Edi, et al. *Dampak Pembangunan Smelter di Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tenggara*. 1. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015.

KEK yang dikelola oleh PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP) akan membangun industri hilir. Industri hilir yang mengolah turunan produk nikel seperti baja tahan karat yang terintegrasi dengan smelter nikel di KEK tersebut. Hadirnya KEK di provinsi Sulawesi Tengah melalui PT IMIP mampu menyerap 12.000 tenaga kerja lokal dan 2.000 TKA.¹²² Pada sektor industri baja tahan karat dapat menyerap 31.000 tenaga kerja lokal.¹²³ Hal tersebut juga berkontribusi pada pembukaan lapangan kerja tidak langsung (penunjang) di sekitar kawasan industri.

C. Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Meningkatkan Nilai Tambah Nikel

Berdasarkan potensi nikel dan program Hilirisasi Industri Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengusulkan empat program pengembangan dan pemanfaatan barang tambang. Nantinya, nikel yang ditambang diharapkan dapat memperoleh nilai tambah ekonomi. Pertama, upaya meningkatkan ketahanan cadangan dan mengoptimalkan produksi bahan baku industri.¹²⁴ Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketahanan cadangan nikel dengan memastikan ketersediaan cadangan, aksesibilitas kebutuhan konsumsi industri, dan keberlanjutan umur dan ketahanan cadangan nikel. Kementerian ESDM nantinya akan melakukan peningkatan konversi sumber daya menjadi cadangan untuk

¹²² Hariyadi, Didit. *32 Proyek Smelter Serap 28 Ribu Tenaga Kerja*. Disunting oleh Dewi Rina Cahyani. 3 Maret 2017. <https://bisnis.tempo.co/read/852091/32-proyek-smelter-serap-28-ribu-tenaga-kerja> (diakses Juli 19, 2022).

¹²³ Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. “*Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pembangunan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara menuju Indonesia Maju.*” hal 59.

¹²⁴ Ibid, hal 79.

meningkatkan umur cadangan bijih nikel. Kementerian ESDM memperkirakan cadangan bijih Ni > 1,7% akan habis di tahun 2031 dan bijih Ni > 1,5% akan habis pada tahun 2036.¹²⁵ Asumsi ini berlaku jika tidak ada penemuan baru atas cadangan nikel dan konsumsi bijih yang konstan serta asumsi seluruh sarana peleburan yang direncanakan seluruhnya telah terbangun maka cadangan bijih saprolite akan habis pada 2036. Sementara itu, nikel limonite dengan kadar nikel rendah masih relatif aman dengan umur cadangan bijih hingga 2055.¹²⁶

Kedua, peningkatan, optimalisasi, dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian.¹²⁷ Pada rencana ini, Kementerian ESDM akan mengembangkan nikel ke arah industri nikel sulfat, melakukan pembatasan pabrik nikel kelas 2, memanfaatkan hasil sisa pengolahan pabrik smelter dan HPAL, dan mampu dalam menguasai teknologi pengolahan dan pemurnian. Sejauh ini pabrik pengolahan nikel yang beroperasi di Indonesia terdapat 27 pabrik pirometalurgi dengan sistem produksi berupa *Rotary Kiln Electric Furnace* (RKEF) dan *Blast Furnace* (BF). Pabrik-pabrik tersebut mengolah bijih nikel yang nantinya akan menjadi NPI, FeNi, dan nikel matte. Dua pabrik hidrometalurgi yang nantinya akan menghasilkan *Mixed Hydroxide Precipitate* (MHP). Pemerintah Indonesia berencana untuk menambah 33 pabrik pirometalurgi dan sembilan pabrik hidrometalurgi untuk dapat meningkatkan optimalisasi pemanfaatan bijih nikel terutama nikel limonite.

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid, hal 80.

¹²⁷ Ibid, hal 83.

Ketiga, pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).¹²⁸ Hal ini dilakukan oleh pemerintah dikarenakan nikel dengan kategori NPI dan FeNi rata-rata diekspor ke luar negeri. Latar belakang tersebut terjadi karena adanya surplus produksi NPI dan FeNi namun tidak sebanding dengan kemampuan industri baja tahan karat dalam negeri untuk menyerapnya. Terdapat empat pabrik yang menyerap hasil produksi NPI dan FeNi kemudian diolah menjadi baja tahan karat seri-300 dan nihil perusahaan yang memproduksi menjadi baja tahan karat seri-200. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut upaya yang direkomendasikan oleh Ditjen Minerba adalah:

- a) Substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan domestik *stainless steel*.
- b) Pengembangan industri katoda berbahan baku nikel.
- c) Pengembangan industri sel baterai berbahan baku nikel untuk kendaraan listrik.
- d) dan, pengembangan industri nikel untuk *superalloy*.¹²⁹

Keempat, optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan penancangan sistem daur ulang.¹³⁰ Tujuan hal tersebut dilakukan untuk mengurangi defisit neraca perdagangan dan menyukseskan hilirisasi industri nasional. Untuk rencana pembangunan sistem daur ulang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan akan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pemerintah menargetkan pada 2026 telah ada sistem pengumpulan baterai bekas yang mengandung nikel dan 2031

¹²⁸ Ibid, hal 90.

¹²⁹ Ibid, hal 91–96.

¹³⁰ Ibid, hal 97.

ditargetkan memiliki fasilitas *sorting* serta pemrosesan baterai bekas dengan kapasitas 15 ribu ton.

Rencana Kementerian ESDM tersebut tentunya tidak dapat dilakukan swa-manajemen oleh Kementerian ESDM. Rencana dan usulan tersebut perlu dikolaborasikan dan diintegrasikan bersama kementerian lainnya untuk mendapat hasil yang lebih baik. Kerjasama lintas kementerian dilakukan bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi/BKPM.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VI

ANALISIS PADA LEVEL SISTEM INTERNASIONAL DALAM KEBIJAKAN LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL

Analisis pada level sistem internasional mengikuti Marijke Breuning dapat dilakukan untuk mengetahui respon terhadap kebijakan luar negeri dan faktor yang memengaruhi. Analisis ini dilakukan setingkat dengan indikator *outcomes* dalam memahami perumusan kebijakan luar negeri. Pada penelitian ini, untuk memahami faktor-faktor pada level sistem internasional yang memengaruhi kebijakan larangan ekspor bijih nikel, maka dibutuhkan pemahaman mengenai respon internasional atas kebijakan larangan ekspor nikel. Tujuannya adalah untuk memahami intensi negara-negara tersebut merespon kebijakan larangan ekspor bijih nikel dan mengapa mereka melakukannya.

A. Respon Internasional atas Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia menimbulkan reaksi dari banyak negara termasuk harga di pasar logam dan mineral internasional. Menurut Kepala Sub Bidang Mineral dan Batubara Sekretariat Kabinet RI negara-negara yang merespon larangan ekspor bijih nikel Indonesia yakni Uni Eropa, Tiongkok, Kanada, Rusia, India, Ukraina, Jepang, Amerika Serikat, Turki, Taiwan, Britania Raya, Singapura, Brazil, dan Uni Emirat

Arab.¹³¹ Setelah ditelisik lebih lanjut, negara-negara tersebut menjadi pihak ketiga dalam panel gugatan Uni Eropa terkait nikel Indonesia di *World Trade Organization* (WTO). Respon negara-negara dalam merespon kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia dibagi menjadi empat tipologi, di antaranya respon Uni Eropa hingga menggugat Indonesia ke WTO, naiknya harga nikel internasional, respon negara Asia Timur, dan respon negara sesama produsen nikel.

Uni Eropa merespon larangan ekspor bijih nikel ini hingga berbuntut panjang dan menuntut Indonesia ke *World Trade Organization* (WTO). Gugatan Uni Eropa ini didaftarkan pada 22 November 2019 dengan ketentuan bahwa Indonesia melanggar Pasal X ayat 1 dan XI ayat 1 dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1994) serta melanggar ketentuan Pasal 3.1 (b) dalam *Subsidies and Countervailing Measures* (SCM).¹³² Andy Home, seorang kolumnis senior Reuters dengan spesialisasi bahasan tentang barang mineral tambang, memberikan alasan implisit lainnya yang membuat Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO. Alasan tersebut adalah semakin banyaknya produksi baja tahan karat murah yang membuat resah Uni Eropa dan akhirnya memberlakukan bea masuk atas produk tersebut.¹³³ Tentu Indonesia sebagai negara berdaulat dan negara anggota WTO perlu untuk merespon segala bentuk gugatan yang dilayangkan Uni

¹³¹ Jawaban kuisisioner yang diisi oleh Sukono, S.H., M.H. tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Pemerintah Indonesia Setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik (29 Juni 2022).

¹³² World Trade Organization (WTO). 20 Februari 2021. *DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*. Dipetik April 18, 22, dari www.wto.org: https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm

¹³³ Home, A. (2021, Juni 3). *COLUMN-Indonesia's nickel boom is a win for resource nationalism: Andy Home*. (K. Donovan, Editor) Dipetik Januari 27, 2022, dari reuters.com: <https://www.reuters.com/article/metals-nickel-ahome-idINL5N2NL3U0>

Eropa maupun negara lain. Bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini selaras dengan kepentingan nasional Indonesia. Namun, keberatan Uni Eropa dapat dibenarkan juga jika mengacu pada GATT, di mana Indonesia telah meratifikasinya menjadi undang-undang.

Uni Eropa sendiri memiliki ketergantungan pada nikel, di mana terdapat 600.000 tenaga kerja pada 2004 yang bekerja pada industri pengolahan nikel dan produk turunannya.¹³⁴ Pada tahun 2021, empat perusahaan Uni Eropa yang melakukan produksi industri baja tahan karat (merupakan produk turunan nikel) telah mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 1000 orang secara permanen. Demikian pula omset dari industri tersebut mencapai €20 miliar dan nilai investasi sebesar €420 juta per tahun. Data terbaru menunjukkan bahwa 30.000 pekerja yang bekerja secara langsung di sektor industri nikel. Selain itu, terdapat sekitar 200.000 pekerja yang bekerja pada sektor pengolahan nikel dan produk turunannya yang menyebabkan Uni Eropa bergantung pada industri nikel.¹³⁵ Duta Besar Indonesia untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno memaparkan, “Dari data yang kami himpun, pada tahun 2008, Uni Eropa hanya membeli 2,3 persen dari Indonesia. Tahun 2009-2013 rata-rata hanya 5%, Tahun 2014, bahkan 0,31 persen. Tahun 2015, 2016, 2017 malah tidak pernah beli dari Indonesia. Jadi mengapa sekarang mempermasalahkannya?”¹³⁶

¹³⁴ Nickel Institute, Nickel In The European Union.

¹³⁵ European Commission. (2021, Januari 14). *EU files WTO panel request against illegal export restrictions by Indonesia on raw materials for stainless steel*. Dipetik Januari 27, 2022, dari ec.europa.eu: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_105

¹³⁶ Purwaningsih, A. (2021, Februari 13). *Konsultasi di WTO: Eropa dan Indonesia Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel*. Diambil kembali dari www.dw.com: <https://www.dw.com/id/di-balik-kekisruhan-larangan-ekspor-bijih-nikel/a-56521023>

Walau demikian, Uni Eropa menggugat Indonesia ke WTO atas beberapa tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip perdagangan bebas. Uni Eropa mengklaim Indonesia bertindak secara unilateral dan melanggar beberapa pasal dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994. Uni Eropa mempermasalahkan beberapa hal dalam gugatannya di WTO di antaranya pembatasan ekspor secara kuantitatif. Pembatasan ekspor kuantitatif yang dikeluarkan oleh Uni Eropa adalah perihal larangan ekspor bijih nikel. Larangan tersebut sebenarnya telah berlaku sejak 2014, namun pada 2017 pemerintah Indonesia melakukan relaksasi ekspor dengan syarat tertentu pada bijih nikel dengan kadar $< 1,7\%$. Uni Eropa juga menyoroti perihal inkonsistensi relaksasi izin ekspor yang tidak diberikan bagi izin ekspor bijih nikel dengan kadar $> 1,7\%$.

Syarat-syarat izin ekspor oleh pemerintah Indonesia yang termasuk dalam gugatan Uni Eropa perihal kewajiban pengolahan atau pemurnian di dalam negeri. Bahwa mineral yang tidak dilakukan pengolahan atau pemurnian di dalam negeri tidak dapat di ekspor berdasarkan undang-undang. Uni Eropa juga menyoroti kewajiban yang diregulasikan oleh Kementerian ESDM terkait jumlah dan jenis mineral dan batubara untuk memenuhi kebutuhan domestik. Setelah terpenuhinya kebutuhan domestik, maka ekspor mineral dan batubara baru dapat dilakukan. Uni Eropa menyebutkan bahwa terdapat skema subsidi terlarang terkait pembebasan bea masuk dalam regulasi yang dikeluarkan Kementerian Keuangan RI. Syarat tersebut dapat berlaku bagi perusahaan yang sedang melakukan pembangunan atau modernisasi pabrik. Lisensi ekspor juga menjadi gugatan Uni Eropa, bahwa untuk

melakukan izin ekspor mineral dan batubara serta produk turunannya perlu mendapatkan izin otoritas Indonesia.¹³⁷

Uni Eropa menjelaskan secara spesifik mengenai keluhannya tentang izin ekspor dalam dokumen permohonan konsultasi ke WTO tentang beberapa hal. Di antaranya bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%, limbah dan skrap logam, dan batubara dan kokas. Untuk mengekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7% hanya dapat dilakukan oleh perusahaan (IUP-Operasi Produksi) yang menyerap setidaknya 30% bijih nikel pada fasilitas pemurnian yang dimiliki. Pemegang IUP-OP juga dapat melakukan ekspor nikel dengan ketentuan sedang atau selesai membangun fasilitas pemurnian secara independen maupun bekerjasama dengan pihak lain.¹³⁸ Izin ekspor limbah dan skrap logam dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan RI, sehingga para eksportir perlu memenuhi syarat administrasi termasuk rekomendasi dari Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika di bawah Kementerian Perindustrian RI. Ekspor batubara dan kokas dapat dilakukan jika eksportir diakui oleh Kementerian Perdagangan RI dan mendapat rekomendasi dari Ditjen Minerba di bawah naungan Kementerian ESDM RI. Uni Eropa juga menyebutkan bahwa dalam regulasi yang dibuat tidak mencantumkan cara mendapatkan rekomendasi tersebut.¹³⁹

¹³⁷ World Trade Organization. “*WT/DS592/1 Indonesia – Measures Relating To Raw Materials: Request For Consultations By The European Union.*” 27 November 2019. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/592-1.pdf&Open=True> (diakses Juli 12, 2022).

¹³⁸ Ibid.

¹³⁹ Ibid.

Gugatan Uni Eropa kepada Indonesia di WTO merupakan kulminasi dari berbagai aspek yang dinilai Uni Eropa tidak *fair* seperti prinsip GATT. Untuk itu, Uni Eropa mengadukan Indonesia ke WTO karena tindakan yang inkonsistensi atas Pasal XI:1 GATT 1994. Indonesia dinilai telah melarang maupun membatasi ekspor bijih nikel, bijih besi, kromium, dan batubara dengan syarat dan ketentuan tertentu. Pada pasal tersebut disepakati bahwa tidak ada larangan atau pembatasan apapun kecuali bea, pajak, pungutan lain, kuota, maupun izin impor dan ekspor. Selanjutnya, Uni Eropa menggugat Indonesia menggunakan Pasal 3.1 b dari *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures* (ASCM). Pasal tersebut menjelaskan bahwa subsidi bergantung pada penggunaan barang dalam negeri atas barang impor.¹⁴⁰ Hal ini dikarenakan adanya pemberian bebas bea masuk khusus untuk tujuan pengembangan kawasan industri. Di mana pemerintah Indonesia memberikan bebas bea masuk pada perusahaan yang berusaha mendirikan atau memodernisasi pabrik dengan produk lokal. Baik berupa mesin, instalasi, peralatan, perkakas yang diberikan perpanjangan pembebasan bea tambahan.¹⁴¹

Uni Eropa juga menggugat Indonesia atas Pasal X:1 GATT 1994. Pasal tersebut berisi keharusan mempublikasikan segala bentuk regulasi yang berkaitan dengan bea, tarif, pajak, biaya lainnya yang ditentukan, persyaratan, pembatasan atau larangan ekspor-impor, maupun transaksi perdagangan lainnya.¹⁴² Uni Eropa menyebutkan Indonesia tidak segera mempublikasikan segala regulasi yang

¹⁴⁰ World Trade Organization. *"The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures."* n.d. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf (diakses Juli 12, 2022).

¹⁴¹ World Trade Organization. *"WT/DS592/1 Indonesia – Measures Relating To Raw Materials: Request For Consultations By The European Union."*

¹⁴² Ibid.

berkaitan dengan pembatasan atau larangan ekspor dan penerbitan izin ekspor. Segala bentuk gugatan Uni Eropa kepada Indonesia bahwa secara tersirat telah dirugikan atas pelarangan ekspor bahan mentah. Uni Eropa sepertinya membutuhkan ekspor bahan mentah terutama bijih nikel yang akan diproduksi menjadi baja tahan karat.

Sebelum gugatan Uni Eropa berlanjut, Uni Eropa telah berusaha melakukan konsultasi pada 22 November 2019 bersama Indonesia namun tidak menemui hasil. Jalan buntu tersebut menjadikan Uni Eropa untuk meminta pembentukan panel *Dispute Settlement Body* (DSB). Panel terbentuk pada 22 Februari 2021 dan menjadikan Brasil, Kanada, China, India, Jepang, Korea, Federasi Rusia, Arab Saudi, Singapura, China Taipei, Turki, Ukraina, Uni Emirat Arab, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai pihak ketiga. Pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa ini adalah negara anggota WTO yang memiliki kepentingan substansial dan bukan sebagai pengadu atau responden sengketa.¹⁴³ Setelah pengajuan permintaan Uni Eropa untuk menyusun panel, Direktur Jenderal menyusun dan menyetujui panel pada 29 April 2021. Bahwa laporan akhir dari konsultasi panel sengketa ini akan diterbitkan pada akhir kuartal 2022.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menghadapi gugatan Uni Eropa ke (WTO) dilakukan melalui lima langkah. Pertama, melakukan konsolidasi lintas kementerian yakni bersama Kementerian Luar Negeri,

¹⁴³ Manak, Inu. *Third Party Submissions at the WTO*. 2020. <https://www.tradelab.org/single-post/2018/03/02/third-party-submissions-at-the-wto#:~:text=What%20is%20a%20third%20party%3F,the%20parties%20to%20the%20dispute.> (diakses Juli 12, 2022).

Kementerian Perdagangan serta konsultasi hukum yang dikoordinasikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dalam menghadapi gugatan DS592 Uni Eropa. Kedua, menunjuk firma hukum terbaik yakni Baker McKenzie di Jenewa, Swiss dan Joseph Wira Koesnaldi (JWK) di Jakarta. Penunjukan tersebut guna mewakili pemerintah Indonesia dalam pertemuan sidang *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO dan merancang argumentasi untuk menjawab gugatan Uni Eropa.

Ketiga, menyusun *joint statement* untuk menjawab pertanyaan publik dan media terkait gugatan larangan ekspor nikel oleh Uni Eropa. Hal tersebut bertujuan harmonisasi pernyataan juru bicara pemerintah sejalan dengan pembelaan Indonesia. Keempat, Kementerian ESDM selaku pengampu kebijakan menyusun dan menyiapkan data/informasi yang berkaitan dengan gugatan. Pengampu kebijakan juga perlu melakukan analisa seluruh regulasi dalam rangka memperkuat pembelaan Indonesia di DSB WTO. Kelima, pemerintah Indonesia membentuk tim tenaga ahli untuk menyampaikan pledoi di sidang DSB WTO.^{144 145}

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

¹⁴⁴ Jawaban kuisisioner yang diisi oleh Sukono, S.H., M.H. tentang Larangan Ekspor Bijih Nikel Pemerintah Indonesia Setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik (29 Juni 2022).

¹⁴⁵ Syarif. *Lima Langkah ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel*. 23 Maret 2021. <https://nikel.co.id/lima-langkah-esdm-lawan-gugatan-eropa-soal-larangan-ekspor-nikel/> (diakses Juli 2, 2022).

Gambar 6. 1 Harga Nikel dari 1 Agustus 2019 - 29 Juli 2020



Sumber: London Metal Exchange

Kebijakan larangan ekspor nikel ini juga menyebabkan lonjakan harga nikel global. Pascapengumuman larangan ekspor nikel melalui Permen ESDM No.11 Tahun 2019 yang disahkan pada 30 Agustus 2019 harga nikel melonjak naik. Rekor harga nikel di *London Metal Exchange* (LME) pascapengumuman larangan ekspor menyentuh US\$ 18.600/ton.¹⁴⁶ Para ahli bahkan memprediksi jika lonjakan harga akan terus berlangsung hingga 2020 akibat pembatasan larangan ekspor oleh Indonesia. Namun, pandemic COVID-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 menyebabkan harga nikel menjadi *bullish* ke harga US\$ 13.000. Hal ini terjadi karena menurunnya permintaan nikel secara global akibat dari pembatasan aktivitas di masa COVID-19. Bahkan harga anjlok ke US\$ 11.050 pada 23 Maret 2020.

Larangan ekspor tersebut juga direspon oleh negara Asia Timur seperti Tiongkok dan Korea Selatan. Respon Tiongkok lebih kooperatif kepada Indonesia daripada Uni Eropa. Tiongkok telah mendirikan *smelter* (peleburan) dan pabrik

¹⁴⁶ London Metal Exchange. *LME Nickel: Latest nickel updates*. 2022. <https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Nickel#Price+graphs> (diakses Juli 13, 2022).

pengolahan nikel di Indonesia serta menggelontorkan investasi senilai US\$ 30 miliar. Perusahaan Tiongkok juga mendirikan pengolahan nikel di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) melalui PT Huayue NiCo, PT QMB New Energy Materials, dan Ningbo Lygend China bersama Grup Harita Indonesia dengan skema *joint venture*. Di lain sisi, Tiongkok memiliki kepentingan pada sektor kendaraan listrik selain sebagai produsen baja tahan karat. Tiongkok telah menjadi salah satu produsen baterai dan kendaraan listrik yang melakukan ekspansi ke Indonesia melalui Shenzhen Chengxin Lithium Group Co Ltd bersama Tsingshan Holding Group. Dua perusahaan tersebut mendirikan perusahaan dengan skema *joint venture* yang disebut PT ChengTok Lithium Indonesia bersama Stellar Investment Pte asal Singapura. Langkah Tiongkok lainnya dalam merespon larangan ekspor Indonesia yakni mencari alternatif impor nikel dari Filipina untuk memenuhi kebutuhan domestiknya.¹⁴⁷

Selain Tiongkok dan Uni Eropa yang merespon larangan ekspor bijih nikel Indonesia, Korea Selatan juga memanfaatkan larangan ekspor bijih nikel tersebut. Korea Selatan hadir di Indonesia melalui investasi yang besar pada sektor industri otomotif berbasis listrik. Hadirnya Korea Selatan tentunya dengan mempelajari segala regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, insentif yang diberikan, dan berbagai aspek lainnya. Korea Selatan melalui LG Energy Solutions (LGES) dan Hyundai Motor Group membangun pabrik baterai kendaraan listrik senilai US\$

¹⁴⁷ Huber, Isabelle. 2021. *Indonesia's Nickel Industrial Strategy*. 8 Desember. Diakses Februari 15, 2022. <https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel-industrial-strategy#:~:text=In%202014%2C%20the%20country%20even,value%20to%20its%20nickel%20production.&text=Indonesia's%20first%20plant%20to%20process,more%20projects%20in%20the%20pipeline.>

1,1 miliar.¹⁴⁸ Pendirian pabrik tersebut akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara dengan target estimasi produksi ditahap pertama akan mencapai 10 *giga watt per hour* (GWH). Hadirnya Hyundai dan LGES di Indonesia merupakan upaya kerjasama kedua negara dalam mengimplementasikan Perpres No. 55 tahun 2019.

Filipina merespon larangan ekspor bijih nikel Indonesia, di mana Filipina juga sebagai produsen nikel kedua terbesar setelah Indonesia. Filipina telah mengisi gap pasokan nikel global termasuk ke Tiongkok pascalarangan ekspor bijih nikel Indonesia berlaku. Perusahaan Nickel Asia merupakan produsen bijih nikel laterit terbesar di Filipina, diketahui telah meningkatkan penjualan nikel sebesar 1.4% pada Januari-Maret 2021 untuk memenuhi permintaan dari Tiongkok.¹⁴⁹ Meskipun dikatakan Filipina telah meningkatkan ekspor nikelnya, terdapat beberapa rintangan pada urusan domestik mereka. Problematika pada urusan internal mereka saat pandemi COVID-19 di mana pemberlakuan penguncian wilayah di Filipina.

Presiden Rodrigo Duterte mengizinkan sektor pertambangan tetap beroperasi sehingga menimbulkan pro dan kontra. Namun, pemerintah daerah mereka ingin menghentikan operasi tambang secara temporer dengan tujuan mengurangi penyebaran COVID-19. Selain itu, Filipina belum dapat memanfaatkan secara maksimal momentum larangan ekspor Indonesia. Hal tersebut terkendala oleh kebijakan lingkungan yang bergantung pada otonomi

¹⁴⁸ Reuters Staff. 2021. *Indonesia considers export tax for products with less than 70% nickel content*. Disunting oleh Pravin Char. 17 September. Diakses Februari 15, 2022. <https://www.reuters.com/article/indonesia-nickel-tax-idUSKBN2GD0U3>.

¹⁴⁹ Argus Media Editors. 2021. *Philippines' Nickel Asia lifts 1Q nickel ore sales*. Argus Media group. 2021 Mei. Diakses Februari 15, 2022. <https://www.argusmedia.com/en/news/2215023-philippines-nickel-asia-lifts-1q-nickel-ore-sales>.

daerah masing-masing. Otonomi khusus *Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao* (BARMM) di antaranya yang melakukan suspensi ekstraksi nikel di wilayahnya. Respon negara sesama produsen nikel dilakukan untuk memenuhi permintaan nikel global yang bertujuan menghindari kelangkaan nikel internasional akibat kebijakan larangan ekspor bijih nikel Indonesia. Filipina, Australia, Rusia, Kanada, Brazil, dan New Caledonia berusaha mengisi *gap* permintaan nikel global.

B. Faktor Permintaan Global terhadap Nikel

1. Pertumbuhan Permintaan dari Sektor Industri Kendaraan Listrik

Mulanya, nikel mayoritas diolah menjadi *stainless steel*, *plating*, *casting*, dan baterai. Namun, dalam satu dekade terakhir permintaan nikel untuk industri baterai melonjak pesat. Hal ini disebabkan oleh banyaknya komponen dalam baterai, kendaraan listrik, hingga sarana penunjang ekosistem kendaraan listrik yang memerlukan nikel. Kebutuhan nikel pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) membutuhkan setidaknya ± 600 kg nikel, baterai kendaraan hibrid membutuhkan nikel sebanyak 40-80kg, dan baterai kendaraan listrik membutuhkan 6-8kg nikel.¹⁵⁰ Melihat kebutuhan nikel dalam satu unit baterai, kendaraan listrik, dan stasiun pengisian tentu menyebabkan lonjakan permintaan nikel global.

Menurut *International Energy Agency* (IEA), nikel yang ditambang per tahun 2021 sekitar 2.700 kiloton (kt) dan akan terus meningkat hingga tahun 2030

¹⁵⁰ Nickel Search Limited. *Nickel: An Essential Metal*. 2021. <https://nickelsearch.com/nickel/> (diakses Agustus 19, 2022).

pada kisaran 4.200-5.000kt.¹⁵¹ Bahwa dengan asumsi tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan global tahun 2030 diperlukan sekitar 41 tambang baru dengan kapasitas produksi sebesar 38kt/tahun. Hal ini disebabkan karena dalam memproduksi baterai jenis Li-ion membutuhkan lebih banyak nikel dari pada komponen penyusun lainnya seperti lithium, kobalt, serta katoda dan anoda. Peningkatan ini juga terjadi pada beberapa mineral lainnya sebagai unsur pendukung dari komponen kendaraan listrik seperti lithium dan kobalt. Per tahun 2021 kobalt telah ditambang sebanyak 153kt dan proyeksi di tahun 2030 mencapai 298-390kt.¹⁵² Sedangkan mineral lithium ditambang sebanyak 80kt per tahun 2021 dan akan meningkat hingga 330-500kt di tahun 2030.¹⁵³ Tiga mineral tersebut merupakan komponen penyusun sel baterai.

Menurut Mary Bates, baterai terdiri dari tiga susunan utama, yakni dua terminal yang terbuat dari bahan kimia atau logam, katoda dan anoda, dan elektrolit.¹⁵⁴ Dengan peningkatan tren industri otomotif berbasis listrik yang membutuhkan baterai maka sudah pasti kebutuhan akan katoda dan anoda juga ikut naik. Produksi katoda dan anoda diproyeksikan oleh IEA pada tahun 2030 berurutan mencapai 3.300-5.200kt dan anoda sekitar 1.500-2.500kt.¹⁵⁵ Untuk dapat memproduksi baterai sebesar 1GWh membutuhkan sekitar 1,5kt katoda dan anoda sebanyak 0,9kt. Untuk itu kebutuhan akan baterai pada tahun 2030 mencapai 2.2-

¹⁵¹ International Energy Agency. *Global EV Outlook 2022: Securing supplies for an electric future*. International Energy Agency, 2022. Hal 175.

¹⁵² Ibid

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Bates, Mary. *How does a battery work?*. 1 Mei 2012.

<https://engineering.mit.edu/engage/ask-an-engineer/how-does-a-battery-work/> (diakses Agustus 19, 2022).

¹⁵⁵ International Energy Agency, hal 174.

3.5TWh (*terra watt hour*) dalam memenuhi permintaan industri kendaraan listrik.¹⁵⁶ Berdasarkan data tersebut, dibutuhkan setidaknya 52-90 *gigafactories* (pabrik baterai) di seluruh dunia untuk dapat memenuhi permintaan 30-48 juta kendaraan listrik.

Seperti yang dijelaskan oleh IEA, DBS Asian Insights menyatakan hal yang serupa bahwa pertumbuhan industri kendaraan listrik juga akan memengaruhi permintaan nikel. DBS memproyeksikan penjualan kendaraan listrik global di tahun 2030 mencapai 22,3 juta unit.¹⁵⁷ Peningkatan ini disebabkan oleh keterjangkauan biaya pembuatan baterai kendaraan listrik dan kebijakan pemerintah di seluruh dunia yang merespon positif tren kendaraan listrik. Nikel dipandang tetap memiliki prospek positif dengan pertumbuhan 4,1% di tahun 2025 dan 5% di tahun 2030.¹⁵⁸ Pertumbuhan ini terjadi pada nikel kelas I yang dapat diproduksi menjadi baterai dan nikel kelas II yang diproduksi menjadi *stainless steel*.

Fenomena pertumbuhan penjualan kendaraan listrik global terus mengalami kenaikan setiap tahunnya walau sempat terdampak pandemi COVID-19. China pada 2019 masih mendominasi penjualan kendaraan listrik sebesar 50% dari total penjualan kendaraan listrik global diikuti oleh UE, Amerika Serikat, Jepang, dan negara lainnya.¹⁵⁹ Peningkatan penjualan kendaraan listrik yang harusnya meningkat beriringan dengan permintaan baterai kendaraan listrik menjadi

¹⁵⁶ Ibid, hal 173.

¹⁵⁷ Young, LEE Eun. *Nickel and Battery: A Paradigm Shift*. 92. Disunting oleh Khairul bin Khalid dan Geraldine Tan. Asian Insights Office • DBS Group Research, 2020. Hal 4-5.

¹⁵⁸ Ibid.

¹⁵⁹ Ibid, hal 27.

melebihi ekspektasi pertumbuhan kendaraan listrik itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh efisiensi atas peningkatan kapasitas penyimpanan baterai sekitar 70kWh pada 2030 yang berpengaruh pada jangkauan yang dapat ditempuh kendaraan listrik. Tak hanya itu, peningkatan permintaan baterai juga akan merambah pada kendaraan listrik roda dua maupun kendaraan jasa seperti bus dan truk.

Dampak dari peningkatan baterai kendaraan listrik akan menggeser permintaan kebutuhan industri lainnya seperti penggunaan barang-barang elektronik, penyimpanan energi, dan kendaraan roda dua. Permintaan baterai kendaraan listrik akan membuat perusahaan baterai akan meningkatkan kapasitas produksinya hingga 2TWh pada 2029 dari 390GWh pada 2018.¹⁶⁰ Perusahaan baterai dunia seperti Farasis, Tesla, SK Innovation, dan LG Chem akan semakin agresif untuk memenuhi kebutuhan permintaan baterai kendaraan listrik.

Tabel 6. 1 Kontribusi Kendaraan Listrik untuk Baterai Isi Ulang Realisasi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2030

Jenis	2019	2030
Kendaraan Listrik	41%	77%
Barang elektronik	35%	8%
Penyimpanan energi	8%	7%
Kendaraan roda dua	16%	8%

Sumber: IEA dan DBS Bank dalam Young, LEE Eun. *Nickel and Battery: A Paradigm Shift*. 92. Disunting oleh Khairul bin Khalid dan Geraldine Tan. Asian Insights Office • DBS Group Research, 2020. Hal 32.

Tentu saja, kebutuhan nikel akan semakin prominen sebagai bahan penyusun baterai. Proyeksi permintaan nikel dari sektor baterai akan meningkat

¹⁶⁰ Ibid, hal 33.

hingga 36% pada 2030 seperti yang diindikasikan oleh Roskill's.¹⁶¹ DBS Asian Insight juga memproyeksikan bahwa berbagai jenis kandungan nikel untuk baterai akan meningkat seperti *Lithium Ion Posphate (LFP)*, *Lithium Manganese Oxide (LMO)*, *Nickel Cobalt Aluminium (NCA)*, *Nickel-Metal Hybride (NiMH)*, NMC111, NMC532, NMC622, dan NMC811.¹⁶² Namun, NMC811 yang digunakan sebagai kandungan baterai kendaraan listrik yang umum saat ini membutuhkan masing-masing 0.13kg/kWh kobalt dan nikel sebanyak 0.8kg/kWh. Permintaan akan NMC811 akan meningkat menjadi 25% pada 2025 dan 41% pada 2030.

Jika penggunaan NMC8111 masih lumrah digunakan hingga 2030 maka setidaknya dibutuhkan sekitar 56kg nikel untuk 70kWh baterai kendaraan listrik (setelah mengalami efisiensi penyimpanan baterai dan jarak tempuh kendaraan listrik). Mengacu pada data DBS Asian Insights yang menyebutkan pada 2030 penjualan kendaraan listrik akan meningkat menjadi 22,3 juta unit, maka kebutuhan akan nikel terus melonjak setiap tahunnya. Setidaknya dibutuhkan 1249kt nikel hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan baterai kendaraan listrik.¹⁶³ Tentu saja permintaan nikel global akan meningkat signifikan namun tidak menggoyahkan permintaan industri *stainless steel* sebagai penyerap utama nikel global hingga 2030.

¹⁶¹ Fraser, Jake, et al. *Study on future demand and supply security of nickel for electric vehicle batteries*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021. Hal 1.

¹⁶² Young, *Nickel and Battery: A Paradigm Shift*. hal 34.

¹⁶³ Asumsi hitungan tersebut berdasarkan pada kandungan nikel sebesar 56kg untuk 70kWh baterai kendaraan listrik yang dikalikan dengan proyeksi data DBS Asian Insights terkait penjualan kendaraan listrik pada 2030.

$$N = nc \times bc \times EVP$$

$$N = 0.8 \times 70 \times 22.300.000$$

$$N = 1.248.800.000\text{kg}$$

N = Proyeksi kebutuhan nikel hingga 2030
 nc = (*Nickel content*) Kandungan nikel dalam satuan (kg/kWh)
 bc = (*Battery capacity*) kapasitas baterai kendaraan listrik dalam satuan kWh
 EVP = Proyeksi penjualan kendaraan listrik tahun 2030 oleh DBS Insight

Mengingat hal tersebut, langkah strategis pemerintah Indonesia dalam melakukan larangan ekspor bijih nikel adalah memaksimalkan nilai tambah dari nikel. Di mana nikel kelas I dapat diproduksi menjadi baterai akan memiliki peluang ekonomi yang besar. Sejauh ini, pemerintah Indonesia telah menggandeng perusahaan otomotif asal Korea Selatan, Hyundai, untuk membangun pabrik mobil listrik di Indonesia. nantinya pada 2024, seluruh kendaraan listrik Hyundai akan menggunakan komponen yang dibuat di dalam negeri seperti baterai dan komponen lainnya.¹⁶⁴ Hyundai juga menggandeng LG Energy Solutions dalam skema *joint venture* untuk membangun pabrik baterai kendaraan listrik yang memiliki kapasitas 10GWh. Pabrik kendaraan listrik Hyundai dibangun di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, sedangkan pabrik baterai LG Energy Solutions dibangun di Batang, Jawa Tengah. Pembangunan pabrik baterai di Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang nantinya akan terintegrasi dengan berbagai pabrik ekosistem kendaraan listrik lainnya.

¹⁶⁴ Nangoy, Fransiska. *Hyundai launches plant to produce Indonesia's first electric car*. Disunting oleh Martin Petty. 17 Maret 2022. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/hyundai-launches-plant-produce-indonesias-first-electric-car-2022-03-16/#:~:text=By%202024%2C%20all%20EVs%20produced,later%20expanded%20to%20250%2C000%20annually>. (diakses September 12, 2022).

2. Pertumbuhan Permintaan Industri Produk Turunan Nikel Global

Pembangunan global akan terus berkembang, dimana setiap pembangunan akan beriringan dengan pertumbuhan permintaan industri yang akan menopang pembangunan. Industri besi, baja, semen, dan *stainless steel* akan mengalami pertumbuhan yang pesat untuk memenuhi permintaan pembangunan. Roskill memformulasikan pertumbuhan permintaan global terhadap *stainless steel* akan menyesuaikan dengan pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Products*) dan urusan makroekonomi.¹⁶⁵ Dengan demikian, *stainless steel* sebagai bagian dari produk turunan nikel akan turut menambah permintaan nikel global jika pertumbuhan GDP terus meningkat (*vice versa*).

Stainless steel sendiri merupakan hasil olahan *nickel pig iron* (NPI) dan ferronickel yang sama-sama termasuk dalam kategori nikel kelas 2. Nikel kelas 2 diprediksi akan tumbuh 2.7% per tahun pada tahun 2025 mengikuti pertumbuhan produksi *stainless steel* global.¹⁶⁶ Permintaan atas nikel untuk *stainless steel* akan tetap tumbuh namun melambat. Perlambatan ini menyebabkan ketergantungan global terhadap *stainless steel* akan menurun dari 70% pada 2019 menjadi 52% pada 2030.¹⁶⁷ Hal ini disebabkan oleh diversifikasi permintaan nikel global untuk industri baterai. Namun, Tiongkok dan Indonesia akan tetap melakukan ekspansi untuk meningkatkan produksi tahunan *stainless steel*.

¹⁶⁵ Fraser, Jake, et al. *Study on future demand and supply security of nickel for electric vehicle batteries*.

¹⁶⁶ Young, *Nickel and Battery: A Paradigm Shift*, hal 5.

¹⁶⁷ *Ibid*, hal 6.

Peningkatan permintaan atas nikel dan produk turunannya disebabkan oleh kesadaran akan penggunaan barang yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, standar hidup yang tinggi dan higienis, serta urbanisasi yang tinggi. Nantinya, alat-alat kebutuhan rumah tangga, medis, otomotif, dan infrastruktur akan menggunakan nikel dan produk turunannya karena tahan terhadap korosi. Mengetahui hal tersebut, permintaan nikel global akan semakin ter-diversifikasi. Menurut *International Energy Agency (IEA)*, Nikel akan dimanfaatkan tak hanya untuk baterai dan kendaraan listrik, melainkan juga pembangkit listrik rendah karbon, hidrogen, teknologi energi bersih, dan sektor lainnya.¹⁶⁸

IEA membagi proyeksi permintaan nikel global untuk sektor energi terbarukan ke dalam dua skenario, yakni *Stated Policies Scenario (STEPS)* dan *Sustainable Development Scenario (SDS)*.^{169 170} Nikel sebagai mineral yang dapat mendukung program energi bersih global akan sangat memengaruhi permintaan nikel dalam satu dekade mendatang. Pada tahun 2020, nikel mayoritas masih diolah di sektor *mainstream industry* seperti *stainless steel* dengan porsi sekitar 2.144kt termasuk sekitar 8% untuk teknologi bersih. Di tahun yang sama, penyerapan nikel di sektor kendaraan listrik dan baterai mencapai 81kt serta pembangkit rendah

¹⁶⁸ IEA. *Total nickel demand by sector and scenario, 2020-2040*. 24 Januari 2022. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/total-nickel-demand-by-sector-and-scenario-2020-2040> (diakses September 13, 2022).

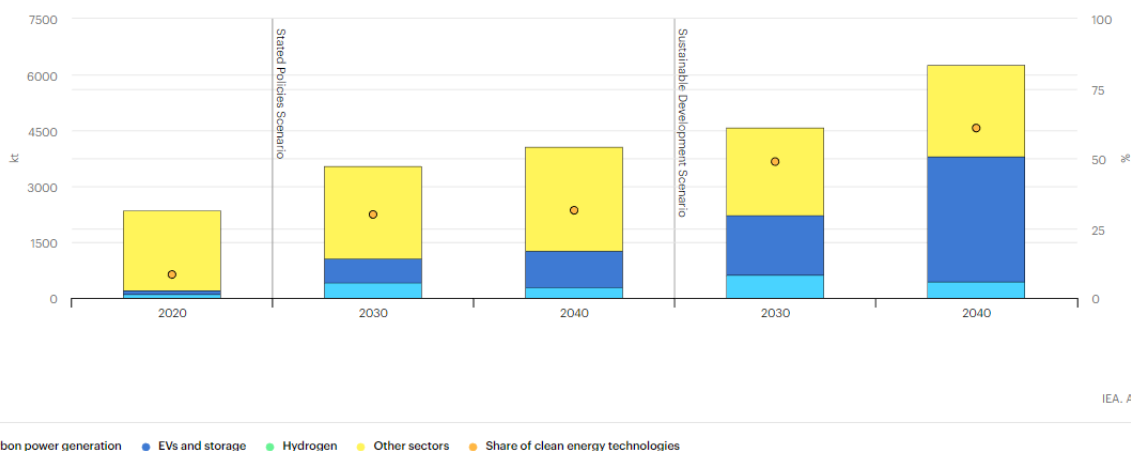
¹⁶⁹ *Stated Policies Scenario (STEPS)* adalah skenario untuk memperhitungkan kebijakan dan langkah-langkah penerapan yang ditentukan secara nasional di bawah Perjanjian Paris. STEPS meliputi penetapan harga, standar, dan skema efisiensi suatu program elektrifikasi maupun infrastruktur tertentu.

¹⁷⁰ *Sustainable Development Scenario (SDS)* adalah skenario kebijakan energi bersih dan investasi yang menempatkan sistem energi bersih ke dalam koridor yang tepat sesuai dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. SDS juga merupakan salah satu cara dalam mengimplementasikan dan menargetkan sesuai dengan Perjanjian Paris.

karbon menyerap nikel sekitar 81kt. STEPS memperkirakan bahwa permintaan nikel untuk *mainstream industry* akan meningkat menjadi 2.491kt pada 2030 dan pada 2040 sekitar 2.780kt. Sektor *mainstream industry* turut menyerap nikel untuk teknologi bersih sekitar 30% pada 2030 dan 31% pada 2040. Kendaraan listrik dan baterai akan menyerap sekitar 658kt nikel pada 2030 dan sekitar 987kt pada 2040. Pembangkit rendah karbon diproyeksikan mengalami peningkatan pada 2030 menjadi 404kt dan mengalami penurunan pada 2040 menjadi 285kt nikel.

SDS memproyeksikan lebih tinggi ekspektasi akan permintaan nikel global baik di sektor *mainstream industry* maupun sektor energi terbarukan. Pada sektor *mainstream industry* akan terjadi peningkatan permintaan nikel global sebesar 2.341kt pada 2030 dan 2.453kt pada 2040 dengan porsi untuk teknologi bersih masing-masing sekitar 49% dan 61%. Peningkatan sebesar dua kali lipat atas penyerapan nikel pada sektor kendaraan listrik dan baterai menjadi 1.592kt pada 2030 dan menjadi 3.352kt pada 2040. Pembangkit rendah karbon meningkat menjadi 634kt pada 2030 dan menurun menjadi 445kt pada 2040. SDS memiliki skenario atas sektor hidrogen yang menyerap nikel. Proyeksi IEA hidrogen akan menyerap nikel sekitar 7kt pada 2030 dan meningkat dua kali lipat pada 2040 menjadi 15kt.

Gambar 6. 2 Total Permintaan Nikel Menurut Sektor dan Skenario Tahun 2020-2040



IEA. All Rights Reserved

Sumber: IEA, *Total nickel demand by sector and scenario, 2020-2040*, IEA, Paris <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/total-nickel-demand-by-sector-and-scenario-2020-2040>

Goldman Sachs menyebutkan bahwa Tiongkok dan Indonesia akan menjadi produsen utama *stainless steel* yakni sekitar 85% secara global.¹⁷¹ Pascaketerbukaan ekonomi Tiongkok, Tiongkok telah menjadi konsumen utama berbagai mineral global. Tiongkok telah melakukan pemurnian sekitar 68% nikel global, 40% tembaga, 57% lithium, dan 73% kobalt.¹⁷² Tiongkok sebagai *global player* mineral global diakibatkan pembangunan dan permintaan industri di dalam negeri Tiongkok. Dalam satu dekade terakhir, industrialisasi dan pembangunan yang masif di Tiongkok menyebabkan kebutuhannya atas komoditas nikel begitu besar. Tiongkok telah menyerap konsumsi nikel global sebesar 20% dan sangat memengaruhi harga nikel global. Ketersediaan stok nikel di Tiongkok menjadi

¹⁷¹ Snowdon, Nicholas, Aditi Rai, Annalisa Schiavon, Daniel Sharp, dan Jeffrey Currie. *Green Metals: Nickel's class divide*. Laporan Penelitian Komoditas, London: Goldman Sachs, 2022. Hal 11.

¹⁷² Castillo, Rodrigo, dan Caitlin Purdy. *China's Role in Supplying Critical Minerals for the Global Energy Transition: What Could the Future Hold?* Washington, D.C: LTRC by the Brookings Institution, 2022. Hal 6.

salah satu faktor penentu naik atau turunnya harga nikel global. Industri hilir nikel Tiongkok seperti baja tahan karat dan baterai akan sangat bergantung pada permintaan Tiongkok.¹⁷³

Tabel 6. 2 Konsumsi Olahan Nikel Tiongkok Tahun 2010-2021

Tahun	Konsumsi Nikel (dalam juta metrik ton)
2010	0.49
2011	0.7
2012	0.8
2013	0.91
2014	0.65
2015	0.84
2016	0.9
2017	0.98
2018	1.1
2019	1.3
2020	1.42
2021	1.65

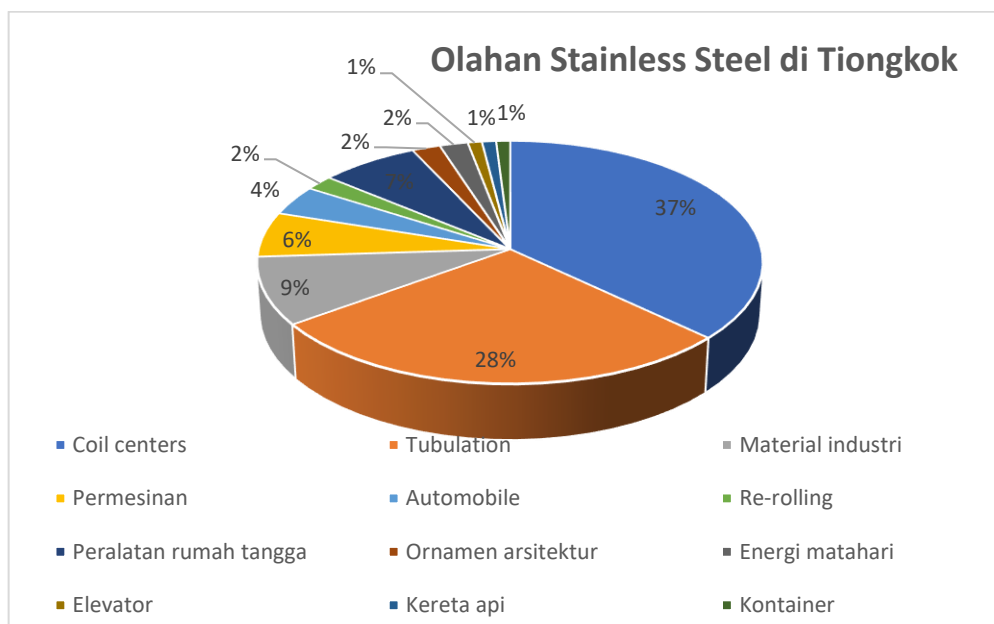
Sumber: Garside, M. *Consumption volume of refined nickel in China from 2010 to 2021*. 21 Juni 2022. <https://www.statista.com/statistics/1131720/china-refined-nickel-consumption-volume/> (diakses Juli 13, 2022).

Tiongkok dengan konsumsi nikel terbesar di dunia, mayoritas mengolah nikel menjadi *stainless steel*. Penggunaan akhir (*end-use*) *stainless steel* Tiongkok diolah menjadi berbagai jenis produk seperti material industri, *coil centers*, mesin, *re-rolling*, elevator, *tubulation*, dan alat rumah tangga. Konsumsi nikel per kapita di Tiongkok telah mencapai 15kg dari kurun waktu 2010-2019.¹⁷⁴ Faktor urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi negara berkembang yang meningkat menyebabkan permintaan atas *stainless steel* meningkat.

¹⁷³ Pines, Lawrence. *Nickel in 2022: Learn About This In-Demand Industrial Commodity*. 4 April 2022. <https://commodity.com/precious-metals/nickel/> (diakses Juli 13, 2022).

¹⁷⁴ Young, *Nickel and Battery: A Paradigm Shift*, hal 17.

Gambar 6. 3 Olahan Stainles Steel Tiongkok



Sumber: Young, LEE Eun. *Nickel and Battery: A Paradigm Shift*. 92. Disunting oleh Khairul bin Khalid dan Geraldine Tan. Asian Insights Office • DBS Group Research, 2020. Hal 17.

Langkah Tiongkok dalam memenuhi kebutuhan nikel maupun permintaan mineral di dalam negerinya dilakukan dengan melakukan ekspansi perusahaan Tiongkok ke luar negeri. Ekspansi tersebut dilakukan dengan mekanisme investasi, *joint venture*, dan perjanjian kerja sama strategis.¹⁷⁵ Mekanisme tersebut juga berlaku bagi kehadiran perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia yang melakukan aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel. Langkah Tiongkok dengan melakukan ekspansi perusahaan-perusahaannya di Indonesia, menyiratkan strategi mereka untuk mengamankan mineral mentah. Hal tersebut terjadi dikarenakan pasokan mineral yang terbatas ditengah semakin tingginya permintaan mineral global.

¹⁷⁵ Catillo, *China's Role in Supplying Critical Minerals for the Global Energy Transition: What Could the Future Hold?*, hal 6.

Tiongkok menjadi sponsor utama dalam beberapa aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel di Indonesia melalui beberapa perusahaan besarnya. Menurut SSEK Indonesian Legal Consultants, setidaknya terdapat delapan perusahaan di Indonesia yang disponsori oleh Tiongkok.¹⁷⁶ China Tsinghan Holding Group menjadi sponsor dari PT Vale Indonesia yang berlokasi di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. PT Vale Indonesia memiliki kapasitas smelter sekitar 8 juta ton nikel yang akan diolah menjadi NPI. BUMN Indonesia yakni PT Aneka Tambang Tbk juga disponsori oleh perusahaan asal Tiongkok yang bernama Zhejiang Huayou Cobalt dan Shandong Xinhai yang berlokasi di Kalimantan Barat. PT Antam sendiri memiliki kapasitas smelter sekitar 2,7 juta ton nikel dimana luaran smelter tersebut akan berupa ferronickel. China National Machinery Import memberikan sponsor kepada PT Indoferro yang berlokasi di Cilegon, Banten. PT Indoferro memiliki kapasitas smelter sekitar 800 ribu ton dengan luaran berupa NPI. PT Wanxiang Nickel Indonesia yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah disponsori oleh China Wanxiang. PT Wanxiang Nickel Indonesia memiliki luaran berupa ferronickel dan NPI dengan kapasitas smelter sekitar 8,9 juta ton.

PT Bintang Smelter Indonesia disponsori oleh Fujian Pan-Chinese Mining Co. Ltd yang berlokasi di Konawe, Sulawesi Tenggara. PT Bintang Smelter Indonesia memiliki luaran smelter berupa NPI dengan kapasitas sekitar 992 ribu ton. Jiangsu Delong Nickel Ind. Co. Ltd mensponsori PT Virtue Dragon Industry

¹⁷⁶ Carl, Michael S. “*Chinese Investment in the Indonesian Mining Industry.*” SSEK Indonesian Legal Consultant. 2019.
https://www.ssek.com/images/Chinese_Investment_in_the_Indonesian_Mining_Industry_China_Mining_2019_SSEK_Legal_Consultants.pdf (diakses September 14, 2022).

yang berlokasi di Konawe, Sulawesi Tenggara. PT Virtue Dragon Industry memiliki kapasitas smelter sekitar 4,56 juta ton nikel dengan luaran berupa ferronickel. PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia disponsori oleh China Huadi Nickel-Alloy yang berlokasi di Bataeng, Sulawesi Selatan. Smelter yang dimiliki oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia memiliki kapasitas sekitar 530 ribu ton dengan luaran berupa NPI. Tak hanya mensponsori PT Vale Indonesia, Tsinghan Holding Group juga mensponsori PT Sulawesi Mining Investment yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Kapasitas smelter yang dimiliki oleh PT Sulawesi Mining Investment sekitar 1,6 juta ton dengan hasil akhir berupa NPI.

Tak hanya melakukan ekspansi perusahaannya di Indonesia, Tiongkok juga menjadi mitra dagang terbesar Indonesia. Tiongkok merupakan pasar dengan potensi besar untuk dapat mengekspor nikel Indonesia. Ekspor nikel Indonesia dengan adanya program Hilirisasi Industri nikel dapat mengekspor produk nikel kategori *semi-finished goods* (setengah jadi) maupun *finished goods* (barang jadi). Ekspor nikel dan produk turunan nikel Indonesia ke Tiongkok dipastikan meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Ekspor bijih nikel Indonesia ke Tiongkok sebelum diberlakukannya larangan ekspor bijih nikel senilai US\$1,05 miliar. Ketika larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020, tidak ada lagi ekspor bijih nikel ke Tiongkok maupun ke seluruh negara mitra dagang Indonesia.

Ekspor produk turunan nikel seperti *ferro alloy nickel* ke Tiongkok terus meningkat signifikan setiap tahunnya. Pada 2019, ekspor *ferro alloy nickel* Indonesia ke Tiongkok senilai US\$2,2 miliar sebelum larangan ekspor diberlakukan. Namun, setelah larangan ekspor diberlakukan ekspor *ferro alloy*

nickel Indonesia ke Tiongkok meningkat 104% menjadi US\$4,5 miliar. Pada tahun 2021, *ferro alloy nickel* Indonesia diekspor ke Tiongkok senilai US\$6,2 miliar meningkat 37% dari tahun sebelumnya. Tak hanya itu, pada tahun 2021 terjadi peningkatan ekspor yang signifikan untuk kategori “*Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy*” senilai US\$311 juta di mana pada tahun sebelumnya tidak ada ekspor produk tersebut.

Tabel 6. 3 Jumlah Ekspor Nikel Indonesia ke Tiongkok Tahun 2019-2021

Nikel	Tahun		
	2019	2020	2021
	dalam US\$		
Nickel Ores	1,051,604,330	-	-
Ferro Alloy Nickel	2,225,645,761	4,545,382,788	6,233,820,740
Copper wire, of copper alloys of copper-nickel base alloys (cupro-nickel)/copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)	25	-	-
Other copper tubes and pipes	17,561	0,50	105
Nickel waste and scrap	-	-	183,275
Nickel plates, sheets, strip & foil of nickel, not alloyed	262	-	-
Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy	-	-	311,454,401
Wire of nickel alloys	22,780	-	-
Nickel plates, sheets, strip & foil of nickel, not alloyed	-	2,153	-
Other articles of nickel	2,556	-	-
Nickel-cadmium accumulators of a kind used for not aircraft	-	593	1,021

Statuetes and other ornamen of nickel	269	-	-
Jumlah	3,227,293,544	4,545,385,534.5	6,545,459,542

Sumber: BPS. *Tabel Dinamis Ekspor-Impor*. 2022. <https://www.bps.go.id/exim/> (diakses September 14, 2022). Diolah oleh penulis.

Neraca ekspor Indonesia ke Tiongkok yang setiap tahunnya meningkat maka ini juga berpengaruh positif bagi neraca perdagangan Indonesia secara umum. Indonesia dalam neraca perdagangannya pada tahun 2019 telah mengekspor nikel dan produk turunannya senilai US\$ 4.5 milyar. Pascalarangan ekspor bijih nikel diberlakukan, Indonesia telah mengekspor nikel dan produk turunannya senilai US\$ 5.5 milyar pada tahun 2020 dan US\$ 8.3 milyar pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ekspor bijih nikel dan program Hilirisasi Industri Nikel nasional telah memberikan efek positif bagi neraca ekspor Indonesia.

Grafik 6. 1 Ekspor Nikel dan Produk Turunan Nikel Indonesia Tahun 2019-2021



Sumber: BPS. *Tabel Dinamis Ekspor-Impor*. 2022. <https://www.bps.go.id/exim/> (diakses September 14, 2022). Diolah oleh penulis.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia memberikan efek positif bagi neraca perdagangan nikel. Terjadi

peningkatan nilai transaksi ekspor nikel Indonesia, terutama ke Tiongkok. Dalam tiga tahun (2019-2021) terjadi peningkatan kuantitas ekspor *ferro alloy nickel* ke Tiongkok dan beberapa negara. Produk dengan kategori *Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy*” meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi US\$311 juta. Dengan demikian, larangan ekspor bijih memberikan nilai tambah ekspor kepada *ferro alloy nickel* dan *Nickel oxide sinters and other intermediate products of nickel metallurgy*. Sedangkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel oleh Pemerintah Indonesia masih belum menunjukkan peningkatan signifikan pada nilai tambah untuk sektor kendaraan listrik dan baterai.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terdapat tiga faktor penyebab kebijakan larangan ekspor bijih nikel diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia, yakni **faktor individu Presiden Jokowi**, **faktor upaya-upaya pemanfaatan nikel oleh Pemerintah Indonesia**, dan **faktor permintaan nikel global**. *Pertama*, **faktor personalitas Presiden Jokowi**. Presiden Jokowi sebagai *decision maker* kebijakan larangan ekspor bijih nikel menjadikan sejarah kelam eksploitasi SDA di masa penjajahan sebagai latar belakang kebijakan (*scheme*). Eksploitasi SDA pada masa VOC yang dikirim ke luar negeri di mana Indonesia tidak memperoleh manfaat apa pun. Atas dasar *scheme* tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan setidaknya 35 kali di hadapan publik maupun forum politik terkait suatu keharusan dalam melakukan larangan ekspor *raw material*, terutama nikel (*ore*), dan meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut. Perhatian besar Presiden Jokowi terhadap isu larangan ekspor bijih nikel ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dan merasa puas atas hal tersebut. Berdasarkan dua poin tersebut, **Presiden Jokowi memiliki *presidential character* yang aktif-positif**.

Presiden Jokowi memandang bahwa kerja sama dengan berbagai negara akan mengurangi dampak dari larangan ekspor bijih nikel. Namun, sikap tegas Presiden Jokowi untuk tetap melakukan larangan ekspor bijih nikel walaupun ada hambatan berupa gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia. Tujuan

dilakukannya larangan ekspor bijih nikel adalah meningkatkan nilai tambah dari nikel sendiri. Mengingat tren industri otomotif berbasis listrik yang meningkat, Presiden Jokowi nampaknya berusaha meningkatkan daya saing Indonesia sebagai kepemilikan nikel terbesar di dunia dengan meningkatkan nilai tambah nikel menjadi baterai dan kendaraan listrik yang akan dibangun di Indonesia. Presiden Jokowi dalam merealisasikan hal tersebut tetap bertindak dengan penuh perhitungan, diplomasi, negosiasi, walaupun tidak menutup kemungkinan untuk bertindak lebih konfliktual seperti menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO. Poin-poin tersebut merupakan kode operasional dalam memahami keyakinan fundamental dan filosofis Presiden Jokowi dalam mengeluarkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

Pada aspek *leadership trait analysis*, Presiden Jokowi memegang kendali dan yakin penuh bahwa kebijakan larangan ekspor bijih nikel dapat memiliki nilai manfaat terutama bagi perekonomian Indonesia. Berdasarkan *power* yang dimiliki, yakni kepemilikan Indonesia atas potensi nikel terbesar di dunia, Presiden Jokowi tidak gentar dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO. Hal lain juga menggambarkan perbedaan cara pandang Presiden Jokowi dengan pemimpin dunia lainnya terkait *global supply chains* yang mungkin berujung pada Indonesia harus mengekspor *raw materials* Kembali. Presiden Jokowi keras menolak dan enggan menandatangani kesepakatan terkait *global supply chains*, tetap berpegang teguh pada upaya kebijakan larangan ekspor bahan mentah.

Implementasi kebijakan larangan ekspor bijih nikel pada tingkat sistem politik di Indonesia bermula dalam pembahasan di Sidang Kabinet. Teori

rasionalitas normatif akan mengetahui bahwa sebuah kebijakan dimulai dari adanya situasi yang membutuhkan kebijakan (latar belakang). Latar belakang kebijakan larangan ekspor bijih nikel secara pasti berakar pada aspek hukum yang mengharuskan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Presiden Jokowi selaku *decision maker* mengetahui bahwa kepemilikan cadangan nikel terbesar di dunia tidak akan selamanya *sustainable*. Dengan kata lain, Presiden Jokowi mengetahui bahwa cadangan nikel memiliki keterbatasan ketahanan umur untuk terus ditambah. Dua latar belakang tersebut mengantarkan kepada opsi-opsi kebijakan untuk memastikan nikel tetap dapat memberikan nilai tambah walaupun tidak akan terus *sustainable*. Opsi kebijakan terkait larangan ekspor dan hilirisasi nikel muncul dalam Sidang Kabinet. Hingga dua kebijakan tersebut diadopsi secara bersama-sama untuk memaksimalkan potensi nikel Indonesia sehingga tujuan dari larangan ekspor bijih nikel nantinya akan menjadi program hilirisasi nikel.

Segala bentuk perhitungan Presiden Jokowi untuk mengantisipasi dampak buruk dari kebijakan larangan ekspor bijih nikel dilakukan seperti *cost and benefit analysis*, *SWOT analysis*, model *Input-Output (IO)*, *regulatory impact assessment*, dan *PESTLE analysis*. Berbagai pertimbangan tersebut akan diterima Presiden Jokowi melalui mekanisme Sidang Kabinet. Dalam perumusan kebijakan, tidak menutup kemungkinan terdapat lingkaran kecil di sekitar presiden yang dapat memengaruhi pengambilan kebijakan. Di dalam lingkaran Presiden Jokowi terdapat menteri-menteri yang diandalkan dalam pengambilan kebijakan. Setidaknya terdapat tiga menteri yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan luar negeri Indonesia di masa Presiden Jokowi periode kedua, yakni Menteri Luar

Negeri Retno Marsudi dan Menko Marves Luhut Panjaitan menjalankan diplomasi ekonomi, serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjalankan diplomasi pertahanan. Menteri Luhut selalu dipercaya Presiden Jokowi dalam setiap pengambilan kebijakan, masukan, jabatan atas badan atau lembaga, dan sebagai utusan presiden ke luar negeri, termasuk dalam urusan kebijakan larangan ekspor bijih nikel.

*Kedua, faktor upaya pemanfaatan nikel oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi pemanfaatan **potensi nikel yang melimpah, program hilirisasi industri nikel nasional, serta rencana Kementerian ESDM untuk meningkatkan nilai tambah nikel. Potensi nikel Indonesia** yang disebut sebagai pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Potensi cadangan nikel yang besar ini juga berpengaruh jika dieksploitasi besar-besaran. Potensi ini perlu dimanfaatkan sebaik mungkin agar memiliki nilai tambah dari nikel dan produk turunan nikel.*

Hilirisasi industri nasional bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah suatu barang mentah menjadi *semi-finished goods* dan *finished goods*. Larangan ekspor bijih nikel dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pasokan industri nasional dalam rangka merealisasikan hilirisasi industri pada sektor barang tambang mineral. Hilirisasi nikel ini akan berdampak pada peningkatan nilai tambah produk seperti *Nickel Pig Iron* (NPI), ferronickel, dan nickel matte. Namun, sejak larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada 2020 nilai tambah ferronickel atau *stainless steel* menjadi yang paling unggul. Adanya larangan ekspor bijih nikel ini, diiringi upaya pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan Kawasan Industri Terintegrasi

untuk kendaraan listrik. Di mana produk turunan nikel kelas I dapat dimanfaatkan sebagai komponen utama baterai, yakni katoda.

Rencana Strategis Kementerian ESDM untuk meningkatkan nilai tambah nikel, meliputi: upaya meningkatkan ketahanan cadangan dan mengoptimalkan produksi bahan baku industri; peningkatan, optimalisasi, dan efisiensi industri pengolahan dan pemurnian; pengembangan Industri Fabrikasi, Manufaktur, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pencanangan sistem daur ulang. Rencana Kementerian ESDM tersebut tentunya tidak dapat dilakukan swa-manajemen oleh Kementerian ESDM. Rencana dan usulan tersebut perlu dikolaborasikan dan diintegrasikan bersama kementerian lainnya untuk mendapat hasil yang lebih baik. Kerjasama lintas kementerian dilakukan bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Investasi/BKPM.

Faktor permintaan nikel global ini dipengaruhi oleh **pertumbuhan permintaan dari sektor industri otomotif berbasis listrik** dan **pertumbuhan permintaan dari sektor industri produk turunan nikel**. *Pertama*, **pertumbuhan permintaan nikel untuk industri kendaraan listrik akan terus meningkat hingga 2030**. Pertumbuhan kendaraan listrik hingga 2030 akan diproyeksikan mencapai 22,3 juta unit dengan berbagai jenis seperti kendaraan listrik roda dua dan kendaraan jasa. Dengan berbagai inovasi dan efisiensi baterai kendaraan listrik yang mampu mencapai 70kWh maka dibutuhkan setidaknya 56kg nikel per unit

kendaraan listrik. Dengan demikian, setidaknya hingga tahun 2030 dibutuhkan sekitar 1249kt nikel untuk 22,3 juta kendaraan listrik.

Kedua, pertumbuhan permintaan dari sektor industri produk turunan nikel seperti stainless steel. Stainless steel akan banyak diserap oleh industri alat kebutuhan rumah tangga, medis, otomotif, dan infrastruktur karena sifatnya yang tahan terhadap korosi. Permintaan atas *stainless steel* ini diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara, kesadaran akan penggunaan barang yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, standar hidup yang tinggi dan higienis, serta urbanisasi yang tinggi. Tiongkok sebagai negara yang memproduksi dan menyerap *stainless steel* terbesar di dunia perlu melakukan strategi untuk mengamankan nikel maupun mineral lainnya. Strategi Tiongkok untuk mengamankan mineral adalah dengan melakukan ekspansi perusahaannya ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Mekanisme ekspansi perusahaan Tiongkok ini dilakukan dengan membentuk perjanjian strategis dan *join venture* dengan perusahaan lokal. Posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia juga memiliki kontribusi dalam menyerap hasil ekspor nikel dan produk turunan nikel Indonesia. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya perusahaan Tiongkok yang melakukan *join venture* dengan perusahaan lokal. Tak bisa dilupakan bahwa, kebutuhan nikel Tiongkok untuk *ferro alloy nickel* juga begitu besar dan meningkat setiap tahunnya sejak 2019 hingga 2021. Secara umum, transaksi ekspor Indonesia dengan Tiongkok berkontribusi positif pada neraca perdagangan Indonesia secara umum. Kebijakan

larangan ekspor bijih nikel yang berlaku sejak 2020 telah meningkatkan nilai tambah ekspor nikel Indonesia.

Kebijakan larangan ekspor bijih nikel ini direspon oleh berbagai negara termasuk meningkatnya harga nikel global. **Respon negara-negara terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel bervariasi, seperti negara Asia Timur (Tiongkok dan Korea Selatan) yang lebih kooperatif, Uni Eropa yang konfrontatif hingga menggugat Indonesia ke WTO, hingga Filipina sebagai sesama negara produsen nikel berusaha mengisi *gap* permintaan nikel global.** Uni Eropa menggugat Indonesia dengan klaim telah melanggar Pasal X ayat 1 dan XI ayat 1 dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT 1994) serta melanggar ketentuan Pasal 3.1 (b) dalam *Subsidies and Countervailing Measures* (SCM). **Tak hanya itu, Pascapengumuman larangan ekspor nikel melalui Permen ESDM No.11 Tahun 2019 yang disahkan pada 30 Agustus 2019 harga nikel melonjak naik.** Rekor harga nikel di *London Metal Exchange* (LME) pascapengumuman larangan ekspor menyentuh US\$ 18.600/ton.

B. Saran

Mengingat ketidaksempurnaan laporan penelitian ini, maka peneliti menyadari hal-hal yang nantinya dapat diperbaiki melalui penelitian-penelitian selanjutnya. Keterbatasan pengetahuan/keilmuan peneliti untuk menganalisa psikologi pemimpin dalam hal ini adalah Presiden Jokowi. Analisis wacana Presiden Jokowi dalam setiap pidato maupun sambutannya yang terkait dengan kebijakan larangan ekspor bijih nikel serta penafsiran-penafsirannya. Maka, penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis psikologi pemimpin dan analisis

wacana terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Tak hanya itu, penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis terhadap dampak dari kebijakan larangan ekspor nikel secara lebih komprehensif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakry, Umar Suryadi. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bland, Ben. *Man of contradictions: Joko Widodo and the struggle to remake Indonesia*. Pertama. Australia: Penguin Random House Australia, 2021.
- Breuning, Marijke. *Foreign Policy Analysis: A Comparative Introduction*. 1st. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Castillo, Rodrigo, dan Caitlin Purdy. *China's Role in Supplying Critical Minerals for the Global Energy Transition: What Could the Future Hold?* Washington, D.C: LTRC by the Brookings Institution, 2022.
- Cresswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication, Inc, 2013.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. "Grand Strategy Mineral dan Batubara: Arah Pembangunan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara menuju Indonesia Maju." 2021.
<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-grand-strategy-komoditas-minerba.pdf> (diakses Juli 2022, 1).
- Fraser, Jake, et al. *Study on future demand and supply security of nickel for electric vehicle batteries*. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021.
- International Energy Agency. *Global EV Outlook 2022: Securing supplies for an electric future*. International Energy Agency, 2022.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. "Booklet Tambang Nikel 2020: Peluang Investasi Nikel di Indonesia." *esdm.go.id*. 2020.
<https://www.esdm.go.id/id/booklet/booklet-tambang-nikel-2020> (diakses Maret 8, 2022).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Laporan Keuangan Kementerian Keuangan TA 2019." 2020.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/15865/laporan-keuangan-2019.pdf> (diakses Maret 13, 2022).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022: Batang Tubuh dan Lampiran I*. Jakarta, 2021.
- Kim, Jeonghoi. *Recent Trends in Export Restrictions*. OECD Trade Policy Papers No. 101, Paris: OECD Publishing, 2010.
- Lelono, Eko Budi. "Masa Depan Hilirisasi Nikel Indonesia." Badan Geologi, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. *Potensi Nikel Indonesia*. Bandung, 2020.

- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mas'oed, Mohtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, 1990.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya, 1990.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Evaluation Methods*. London: Sage Publications, 1986.
- Prasetyo, Bambang Edi, et al. *Dampak Pembangunan Smelter di Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tenggara*. 1. Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2015.
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian ESDM. *Dampak Pembatasan Ekspor Bijih Besi Terhadap Penerimaan Sektor ESDM dan Perekonomian Nasional*. Pertama. Jakarta: Pusat Data dan teknologi Informasi ESDM, 2015.
- Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perindustrian RI. *Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035*. Jakarta: Kementerian Perindustrian RI, 2015.
- Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. "Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Indonesia Tahun 2021." Disunting oleh Koordinator Mineral, Koordinator Batubara dan Koordinator Panas Bumi. Januari 2022.
<http://psdg.geologi.esdm.go.id/images/stories/2022/Buku%20Neraca%202021%2007-04-2022.pdf> (diakses Mei 27, 2022).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subroto, Edi. *Pengantar Metode Penelitian Linguistik Struktural*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret Press, 1992.
- Todd, Jennifer, Jess Chen, dan Frankie Clogston. *Creating the Clean Energy Economy: Analysis of the Electric Vehicle Industry*. Analysis, Rockefeller Brothers Fund, Washington, DC: International Economic Development Council, 2013.
- Toledano, Perrine, dan Nicolas Maennling. "Indonesia: Downstream Linkages." *www.iisd.org*. IISD. 2018.
<https://www.iisd.org/sites/default/files/publications/case-study-indonesia-downstream-linkages.pdf> (diakses April 18, 2021).
- U.S. Geological Survey. *Mineral Commodity Summaries*. Commodity Statistics and Information, National Minerals Information Center, Virginia: U.S. Geological Survey, 2022, 202.

- Wikarya, Uka, Moh. Herman Sulistiyo, M. Dian Revindo, dan Lili Yunita. *Analisis Biaya Manfaat Pelarangan Ekspor Bahan Mentah Minerba dan Dampaknya Terhadap Sektor Industri: Studi Kasus Nikel & Tembaga*. Jakarta: Biro Perencanaan Kementerian Perindustrian, 2012.
- Young, LEE Eun. *Nickeland Battery: A Paradigm Shift*. 92. Disunting oleh Khairul bin Khalid dan Geraldine Tan. Asian Insights Office • DBS Group Research, 2020. Diakses pada 19 Agustus 2022 melalui https://www.dbs.id/id/personal/aics/templatedata/article/generic/data/en/GR/102020/201021_insights_nickel_battery.xml#
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Artikel Jurnal**
- Aziz, Mochammad, Yosua Marcellino, Intan Agnita Rizki, Sri Anwar Ikhwanuddin, dan Joni Welman Simatupang. “Studi Analisis Perkembangan Teknologi dan Dukungan Pemerintah Indonesia Terkait Mobil Listrik.” *TESLA: Jurnal Teknik Elektro* 22, no. 1 (Maret 2020): 45-55. doi:10.24912/tesla.v22i1.7898
- Lim, Byungkwon, Hyeon Sook Kim, dan Jaehwan Par. “Implicit Interpretation of Indonesian Export Bans on LME Nickel Prices: Evidence from the Announcement Effect.” Disunting oleh Mogens Steffensen. *Risks* (MDPI) 9 (Mei 2021): 93. doi:<https://doi.org/10.3390/risks9050093>
- Pandyaswargo, Andante Hadi, Alan Dwi Wibowo, Meilinda Fitriani Nur Maghfiroh, Arlavinda Rezqita, dan Hiroshi Onoda. “The Emerging Electric Vehicle and Battery Industry in Indonesia: Actions around the Nickel Ore Export Ban and a SWOT Analysis.” Disunting oleh Pascal Venet. *Batteries* (MDPI) 7 (November 2021): 1-22. doi:<https://doi.org/10.3390/batteries7040080>
- Putra, Diska Resha, Donny Yoesgiantoro, dan Suyono Thamrin. “Kebijakan Ketahanan Energi berbasis Energi Listrik Pada Bidang Transportasi Guna Mendukung Pertahanan Negara Di Indonesia: Sebuah Kerangka Konseptual.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* (UM-Tapsel Press) 7, no. 3 (2020): 658-672. Doi: 10.31604/jips.v7i3.2020.658-672
- Revindo, Mohamad D., dan Aditya Alta. “TRADE AND INDUSTRY BRIEF.” *SERI ANALISIS EKONOMI*, Januari 2020: 1-8.
- Ruma, Nikolaus Baptista, Ratu Tasya Adawiyah, Rivaldi Rizqianda, Bernicia Angelica, dan Moh. Rifli Mubarak. *Gugatan Uni Eropa Terhadap Larangan Ekspor Konsentrat Nikel Oleh Indonesia Pada Dispute Settlement Body World Trade Organization*. Doctrinal Research, Fakultas Hukum, Universitas Gajah Mada, D.I. Yogyakarta: ALSA Indonesia National Chapter Indonesia, 2021, 1-55. Diakses melalui https://issuu.com/alsaindonesia/docs/9._aisrt_maret_2021_gugatan_uni_eropa_terkait_pela

Sidabutar, Victor Tulus Pangapoi. “Kajian Pengembangan Kendaraan Listrik di Indonesia: Prospek dan Hambatannya.” *Jurnal Paradigma Ekonomika* 15, no. 1 (2020): 21-38. Diakses melalui <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/9217/10136>

Snowdon, Nicholas, Aditi Rai, Annalisa Schiavon, Daniel Sharp, dan Jeffrey Currie. *Green Metals: Nickel's class divide*. Laporan Penelitian Komoditas, London: Goldman Sachs, 2022. Diakses pada 14 September 2022 melalui <https://www.goldmansachs.com/insights/pages/gs-research/nickels-class-divide/report.pdf>

Artikel Surat Kabar atau Majalah

Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perindustrian. “Laporan Utama: Mewujudkan Hilirisasi Industri Berbasis SDA.” Dalam *Mewujudkan Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam*, 7. Jakarta: Kementerian Perindustrian, 2016.

Suska. *Dukungan Pemerintah untuk Kendaraan Rendah Emisi Berbasis Listrik*. Analisis, Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal - Kementerian Keuangan RI, 2019.

Tesis atau Disertasi

Shiddiq, Ash. *Kebijakan Luar Negeri Pemerintah Indonesia Dalam Merespon Protes Pemerintah Jepang*. Skripsi, Hubungan Internasional, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015.

Website

Arbar, Thea Fathanah. *Cerita Misi Menko Luhut ke AS: Ketemu Trump, Bawa Rp 10,5 T*. 19 November 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201119121112-4-203013/cerita-misi-menko-luhut-ke-as-ketemu-trump-bawa-rp-105-t> (diakses Juli 11, 2022).

Argus Media Editors. *Philippines' Nickel Asia lifts 1Q nickel ore sales*. Argus Media group. 2021 Mei 2021. <https://www.argusmedia.com/en/news/2215023-philippines-nickel-asia-lifts-1q-nickel-ore-sales> (diakses Februari 15, 2022).

BPS. *Tabel Dinamis Ekspor-Import*. 2022. <https://www.bps.go.id/exim/> (diakses September 14, 2022).

Carl, Michael S. “Chinese Investment in the Indonesian Mining Industry.” SSEK Indonesian Legal Consultant. 2019. https://www.ssek.com/images/Chinese_Investment_in_the_Indonesian_Mining_Industry_China_Mining_2019_SSEK_Legal_Consultants.pdf (diakses September 14, 2022).

Citradi, Tirta. *Masih Mau Bukti Kalau RI Raja Nikel Dunia, Cek Data Ini!* 21 Januari 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210121131607->

17-217775/masih-mau-bukti-kalau-ri-raja-nikel-dunia-cek-data-ini (diakses April 18, 2021).

- CNN Indonesia . *Potensi Investasi Baterai Mobil Listrik Tembus Rp242,3 T. 1* Februari 2021. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210201171515-85-600969/potensi-investasi-baterai-mobil-listrik-tembus-rp2423-t>.
- CNN Indonesia. *Faisal Basri Kritik Penguasa Buta soal Investasi Nikel dan TKA China*. 23 Februari 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220223043414-85-762702/faisal-basri-kritik-penguasa-buta-soal-investasi-nikel-dan-tka-china> (diakses Juli 2, 2022).
- . *Luhut Klaim Tesla Teken Kontrak Pembelian Nikel RI Senilai Rp74,5 T. 8* Agustus 2022. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220808141017-92-831731/luhut-klaim-tesla-teken-kontrak-pembelian-nikel-ri-senilai-rp745-t> (diakses September 12, 2022).
- Enderwati, Oktiani. *Simak! Ambisi RI Jadi Raja Industri Baterai Mobil Listrik Dunia*. 1 Februari 2021. <https://ekbis.sindonews.com/read/321116/34/simak-ambisi-ri-jadi-raja-industri-batera>.
- European Commission. *EU files WTO panel request against illegal export restrictions by Indonesia on raw materials for stainless steel*. 14 Januari 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_105 (diakses Januari 27, 2022).
- European Union. “Indonesia - Measures Relating to Raw Materials (DS592) Request for the establishment of a panel by the European Union.” *trade.ec.europa.eu*. 14 Januari 2021. https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/january/tradoc_159271.pdf.
- Fajrian, Happy. *Bea Keluar Nikel Melonjak Tajam Setelah Larangan Ekspor Dipercepat*. 2019 November 2019. <https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a4c5648cc1/bea-keluar-nikel-melonjak-tajam-setelah-larangan-ekspor-dipercepat> (diakses Maret 13, 2022).
- Garside, M. *Consumption volume of refined nickel in China from 2010 to 2021*. 21 Juni 2022. <https://www.statista.com/statistics/1131720/china-refined-nickel-consumption-volume/> (diakses Juli 13, 2022).
- . “Mine production of nickel in Indonesia from 2006 to 2020.” *www.statista.com*. 16 Februari 2021. <https://www.statista.com/statistics/260757/indonesian-mine-production-of-nickel-since-2006/> (diakses April 18, 2021).
- . *Nickel Production in Major Countries 2020*. 17 Januari 2022. <https://www.statista.com/statistics/264642/nickel-mine-production-by-country/> (diakses Februari 14, 2022).

- , “Nickel reserves worldwide by country 2020.” *www.statista.com*. 18 Februari 2021. <https://www.statista.com/statistics/273634/nickel-reserves-worldwide-by-country/> (diakses Maret 18, 2021).
- Hariyadi, Didit. *32 Proyek Smelter Serap 28 Ribu Tenaga Kerja*. Disunting oleh Dewi Rina Cahyani. 3 Maret 2017. <https://bisnis.tempo.co/read/852091/32-proyek-smelter-serap-28-ribu-tenaga-kerja> (diakses Juli 19, 2022).
- Home, Andy. *COLUMN-Indonesia's nickel boom is a win for resource nationalism: Andy Home*. Disunting oleh Kirsten Donovan. 3 Juni 2021. <https://www.reuters.com/article/metals-nickel-ahome-idINL5N2NL3U0> (diakses Januari 27, 2022).
- Huber, Isabelle. *Indonesia's Nickel Industrial Strategy*. 8 Desember 2021. <https://www.csis.org/analysis/indonesias-nickel-industrial-strategy#:~:text=In%202014%2C%20the%20country%20even,value%20o%20its%20nickel%20production.&text=Indonesia's%20first%20plant%20to%20process,more%20projects%20in%20the%20pipeline>. (diakses Februari 15, 2022).
- Humas Sekretariat Kabinet RI. *Groundbreaking Pabrik Industri Baterai Kendaraan Listrik PT. HKML Battery Indonesia, 15 September 2021, di Karawang New Industrial City, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat*. 15 September 2021. <https://setkab.go.id/groundbreaking-pabrik-industri-baterai-kendaraan-listrik-pt-hkml-battery-indonesia-15-september-2021-di-karawang-new-industrial-city-kabupaten-karawang-provinsi-jawa-barat/> (diakses Agustus 15, 2022).
- , *Kompas100 CEO Forum 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, 18 November 2021*. 18 November 2021. <https://setkab.go.id/kompas100-ceo-forum-2021-dari-istana-negara-provinsi-dki-jakarta-18-november-2021/> (diakses Agustus 12, 2022).
- , *Pembukaan Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2022, di Mabes TNI Cilangkap, Provinsi DKI Jakarta, 1 Maret 2022*. 1 Maret 2022. <https://setkab.go.id/pembukaan- Rapat-pimpinan-tni-dan-polri-tahun-2022-di-mabes-tni-cilangkap-provinsi-dki-jakarta-1-maret-2022/> (diakses Agustus 9, 2022).
- , *Pembukaan Silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022, di Sentul International Conference Center, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, 5 Agustus 2022*. 5 Agustus 2022. <https://setkab.go.id/pembukaan-silaturahmi-nasional-persatuan-purnawirawan-tni-ad-ppad-tahun-2022-di-sentul-international-conference-center-kabupaten-bogor-provinsi-jawa-barat-5-agustus-2022/> (diakses Agustus 12, 2022).
- , *Pengantar Presiden pada Rapat Terbatas mengenai Evaluasi Implementasi Hilirisasi Pertambangan Mineral dan Batubara, di Kantor Presiden, Jakarta, 22 Maret 2017*. 22 Maret 2017. <https://setkab.go.id/pengantar->

presiden-pada-rapat-terbatas-mengenai-evaluasi-implementasi-hilirisasi-pertambangan-mineral-dan-batubara-di-kantor-presiden-jakarta-22-maret-2017/ (diakses Juli 8, 2022).

- . *Peresmian Pembukaan Kompas 100 CEO Forum Tahun 2019, 28 November 2019, di Grand Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Kuningan, Provinsi DKI Jakarta.* 2019 November 2019. <https://setkab.go.id/peresmian-pembukaan-kompas-100-ceo-forum-tahun-2019-28-november-2019-di-grand-ballroom-hotel-ritz-carlton-kuningan-provinsi-dki-jakarta/> (diakses Agustus 12, 2022).
 - . *Peringatan HUT Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tahun 2021, di the Ballroom Djakarta Theater Building, Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 2021.* 22 Desember 2021. <https://setkab.go.id/peringatan-hut-partai-solidaritas-indonesia-psi-tahun-2021-di-the-ballroom-djakarta-theater-building-provinsi-dki-jakarta-22-desember-2021/> (diakses Agustus 15, 2022).
 - . *Peringatan HUT Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tahun 2021, di the Ballroom Djakarta Theater Building, Provinsi DKI Jakarta, 22 Desember 2021.* 22 Desember 2021. <https://setkab.go.id/peringatan-hut-partai-solidaritas-indonesia-psi-tahun-2021-di-the-ballroom-djakarta-theater-building-provinsi-dki-jakarta-22-desember-2021/> (diakses September 9, 2022).
 - . *Pertemuan Tahunan Bank Indonesia Tahun 2021, di Grand Ballroom Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, 24 November 2021.* 24 November 2021. <https://setkab.go.id/pertemuan-tahunan-bank-indonesia-tahun-2021-di-grand-ballroom-hotel-fairmont-jakarta-pusat-24-november-2021/> (diakses Agustus 15, 2022).
 - . *Rapat Terbatas mengenai Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, 31 Oktober 2019, di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta.* 31 Oktober 2019. <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-mengenai-penyampaian-program-dan-kegiatan-di-bidang-pembangunan-manusia-dan-kebudayaan-31-oktober-2019-di-kantor-presiden-provinsi-dki-jakarta/> (diakses Agustus 14, 2022).
 - . *Rapat Terbatas tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, 10 Januari 2017, di Kantor Presiden.* 10 Januari 2017. <https://setkab.go.id/rapat-terbatas-tentang-pelaksanaan-kegiatan-usaha-mineral-dan-batubara-10-januari-2016-di-kantor-presiden/> (diakses Juli 8, 2022).
- Hyundai Motor Group. *EV A to Z Encyclopedia - 1: Understanding EV Components.* 25 Maret 2020. <https://news.hyundaimotorgroup.com/Article/Understanding-EV-Components> (diakses Februari 15, 2022).

- IEA. *Total nickel demand by sector and scenario, 2020-2040*. 24 Januari 2022. <https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/total-nickel-demand-by-sector-and-scenario-2020-2040> (diakses September 13, 2022).
- Iskana, Febrina Ratna. *Bertemu Xi Jinping, Luhut Minta Tiongkok Hapus Bea Masuk Produk Baja*. 6 November 2019. <https://katadata.co.id/febrinaiskana/berita/5e9a4e555be93/bertemu-xi-jinping-luhut-minta-tiongkok-hapus-bea-masuk-produk-baja> (diakses Juli 11, 2022).
- Iswara, Made Anthony. *Luhut defends nickel export ban amid EU complaints*. 18 Desember 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/18/luhut-defends-nickel-export-ban-amid-eu-complaints.html> (diakses September 12, 2022).
- Jones, Chris, dan Sandy Fitzpatrick. *Global Electric Vehicle Sales up 160% in H1 Despite Supply Constraints*. 30 Agustus 2021. <https://www.canalys.com/newsroom/global-electric-vehicle-sales-up-160-in-h1-2021-despite-supply-constraints>.
- Karunia, Ade Miranti. *Cerita Menteri Bahlil Saat Larangan Ekspor Nikel Diberlakukan: Pak Erick Rugi, Saya Rugi...* Disunting oleh Aprillia Ika. 18 Mei 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/05/18/154923126/cerita-menteri-bahlil-saat-larangan-ekspor-nikel-diberlakukan-pak-erick-rugi?page=all> (diakses Juli 8, 2022).
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.010/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/Pmk.010/2017 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar." 23 Oktober 2020. <https://api.insw.go.id/assets/upload/intr/1641461179363.pdf> (diakses Maret 13, 2022).
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. *Industri Manufaktur Indonesia Semakin Ekspansif*. 10 Februari 2022. [https://kemenperin.go.id/artikel/23125/Industri-Manufaktur-Indonesia-Semakin-Ekspansif#:~:text=Sejak%202010%2C%20sektor%20industri%20terus,Rp2.760%2C43%20Triliun](https://kemenperin.go.id/artikel/23125/Industri-Manufaktur-Indonesia-Semakin-Ekspansif#:~:text=Sejak%202010%2C%20sektor%20industri%20terus,Rp2.760%2C43%20Triliun.). (diakses Agustus 2, 2022).
- . *Selain Kontributor Terbesar PDB, Industri Jadi Penyector Pajak Tertinggi*. 29 Oktober 2017. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/18341/Selain-Kontributor-Terbesar-PDB,-Industri-Jadi-Penyector-Pajak-Tertinggi> (diakses Agustus 1, 2022).
- Komisi VI DPR RI. *Potensi Nikel Nasional Harus Diamankan*. 22 April 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32709> (diakses Juli 2, 2022).
- Komisi VII DPR RI. *Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan*. 30 November 2020. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30911> (diakses Juli 2, 2022).

- . *Legislator Dorong Optimalisasi Penambangan Nikel Untuk Kesejahteraan*. 3 Maret 2021. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32012> (diakses Juli 2, 2022).
- London Metal Exchange. *LME Nickel: Latest nickel updates*. 2022. <https://www.lme.com/en/Metals/Non-ferrous/LME-Nickel#Price+graphs> (diakses Juli 13, 2022).
- Limanseto, Haryo. Menko Airlangga Dukung Produksi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Akselerasi Net Zero Emission. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. 8 Agustus 2022. <https://ekon.go.id/publikasi/detail/4431/menko-airlangga-dukung-produksi-kendaraan-bermotor-listrik-berbasis-baterai-untuk-akselerasi-net-zero-emission> (diakses Oktober 12, 2022).
- Maesaroh. *Batu Bara Sampai Rotan Pernah Bernasib Sama Kayak Sawit...* 25 April 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220425150550-4-334617/batu-bara-sampai-rotan-pernah-bernasib-sama-kayak-sawit> (diakses Juli 2, 2022).
- Makris, Joanna. *Investment Opportunity Breakdown: Electric Vehicle Stocks*. 10 November 2021. <https://investorplace.com/understanding-investment-opportunity-electric-vehicle-ev-stocks/> (diakses Februari 15, 2022).
- Manak, Inu. *Third Party Submissions at the WTO*. 2020. <https://www.tradelab.org/single-post/2018/03/02/third-party-submissions-at-the-wto#:~:text=What%20is%20a%20third%20party%3F,the%20parties%20to%20the%20dispute.> (diakses Juli 12, 2022).
- Manurung, Hendra. *Indonesia – EU Nickel Dispute*. 18 Januari 2021. <https://www.kike.or.id/2021/01/18/indonesia-eu-nickel-dispute/>.
- Markets and Markets. *Electric Vehicle Market by Component, Vehicle (Passenger Cars, CV), Propulsion (BEV, PHEV, FCEV), Vehicle Drive Type (FWD, RWD, AWD), Vehicle Top Speed (<125 mph, >125 mph), Charging Point, Vehicle Class, V2G, Region-Global Forecast 2030*. Mei 2021. <https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/electric-vehicle-market-209371461.html> (diakses Januari 22, 2022).
- Mudassir, Rayful. *Penambang Keluhkan Harga Beli Nikel di Smelter Masih Rendah*. Disunting oleh Amanda Kusumawardhani. 11 November 2021. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211111/44/1464855/penambang-keluhkan-harga-beli-nikel-di-smelter-masih-rendah> (diakses Juli 2, 2022).
- Nangoy, Fransiska. *Hyundai launches plant to produce Indonesia's first electric car*. Disunting oleh Martin Petty. 17 Maret 2022. <https://www.reuters.com/business/autos-transportation/hyundai-launches-plant-produce-indonesias-first-electric-car-2022-03-16/#:~:text=By%202024%2C%20all%20EVs%20produced,later%20expanded%20to%2025%2C000%20annually.> (diakses September 12, 2022).

- Nickel Institute. *History of Nickel*. t.thn. <https://nickelinstitute.org/about-nickel-and-its-applications/history-of-nickel/> (diakses Januari 28, 2022).
- Nickel Institute. *Nickel In The European Union*. Nickel Institute, t.thn.
- Nickel Search Limited. *Nickel: An Essential Metal*. 2021. <https://nickelsearch.com/nickel/> (diakses Agustus 19, 2022).
- “Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Persiapan, Pelaksanaan, dan Tindak Lanjut Hasil Sidang Kabinet.” 23 Januari 2018. <https://rb.setkab.go.id/upload/rules/Perseskab-No-1-Tahun-2018.pdf> (diakses Juli 6, 2022).
- Pines, Lawrence. *Nickel in 2022: Learn About This In-Demand Industrial Commodity*. 4 April 2022. <https://commodity.com/precious-metals/nickel/> (diakses Juli 13, 2022).
- Purwaningsih, Ayu. *Konsultasi di WTO: Eropa dan Indonesia Gagal Capai Titik Temu Soal Larangan Ekspor Bijih Nikel*. 13 Februari 2021. <https://www.dw.com/id/di-balik-kekisruhan-larangan-ekspor-bijih-nikel/a-56521023>.
- Reuters Staff. *Indonesia considers export tax for products with less than 70% nickel content*. Disunting oleh Pravin Char. 17 September 2021. <https://www.reuters.com/article/indonesia-nickel-tax-idUSKBN2GD0U3> (diakses Februari 15, 2022).
- Royal Society of Chemistry. *Nickel*. t.thn. <https://www.rsc.org/periodic-table/element/28/nickel> (diakses Januari 28, 2022).
- Sangadji, A., Ngoyo, M. F., & Ginting, P. (2020). *Nikel Baterai Kendaraan Listrik: Ketidakadilan Ekologi di Kawasan Asal Sumber Daya. Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat*. Dipetik Januari 28, 2022, dari <https://aeer.info/nikel-baterai-kendaraan-listrik-ketidakadilan-ekologi-di-kawasan-asal-sumber-daya/>
- Subagyo. *Anggota DPR: Percepatan larangan ekspor nikel respons pasar domestik*. Disunting oleh Ahmad Buchori. 3 Oktober 2019. <https://www.antaranews.com/berita/1095188/anggota-dpr-percepatan-larangan-ekspor-nikel-respons-pasar-domestik> (diakses Juli 1, 2022).
- Suoneto, Noto. *How Prabowo Subianto Has Helped Shape Indonesia's Foreign Policy*. 10 Desember 2021. <https://thediplomat.com/2021/12/how-prabowo-subianto-has-helped-shape-indonesias-foreign-policy/> (diakses September 12, 2022).
- Syahputra, Eqqy. *Hah? 90% Nilai Tambah Pemurnian Nikel RI Lari Ke China*. 30 Desember 2021. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20211230094916-4-303186/hah-90-nilai-tambah-pemurnian-nikel-ri-lari-ke-china> (diakses Juli 2, 2022).
- Syarif. *Anggota Komisi VII DPR RI Desak Pemerintah Periksa Kualifikasi TKA Yang Bekerja di Pertambangan Nikel*. 17 Juni 2021.

- <https://nikel.co.id/anggota-komisi-vii-dpr-ri-desak-pemerintah-periksa-kualifikasi-tka-yang-bekerja-di-pertambangan-nikel/> (diakses Juli 2, 2022).
- . *Lima Langkah ESDM Lawan Gugatan Eropa Soal Larangan Ekspor Nikel*. 23 Maret 2021. <https://nikel.co.id/lima-langkah-esdm-lawan-gugatan-eropa-soal-larangan-ekspor-nikel/> (diakses Juli 2, 2022).
- Tiammar, Arif S. *Tentang Nikel 70% dan Hilirisasi yang Terintegrasi*. Disunting oleh Gora Kunjana. 30 September 2021. [https://investor.id/opinion/265395/tentang-nikel-70-dan-hilirisasi-yang-terintegrasi#:~:text=Saat%20ini%20ada%20beberapa%20jenis,tahan%20karat%20\(stainless%20steel\)](https://investor.id/opinion/265395/tentang-nikel-70-dan-hilirisasi-yang-terintegrasi#:~:text=Saat%20ini%20ada%20beberapa%20jenis,tahan%20karat%20(stainless%20steel).). (diakses Maret 8, 2022).
- “Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.” 2009. [https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.htm#:~:text=1.,dan%20penjualan%2C%20serta%20kegiatan%20pascatambang](https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2009/4TAHUN2009UU.htm#:~:text=1.,dan%20penjualan%2C%20serta%20kegiatan%20pascatambang.). (diakses April 18, 2021).
- VOI Editorial Team. *European Union Sues Indonesia Regarding WTO Nickel, Trade Minister Lutfi: "No, It Can't Be"*. 27 Januari 2021. <https://voi.id/en/news/29149/european-union-sues-indonesia-regarding-wto-nickel-trade-minister-lutfi-no-it-can-t-be> (diakses Januari 27, 2022).
- Wibisono, Gunawan. *Sangat Dipercaya, Luhut Pandjaitan Pegang 14 Jabatan Selama Era Jokowi*. Disunting oleh Ilham Safutra. 9 April 2022. <https://www.jawapos.com/nasional/politik/09/04/2022/sangat-dipercaya-luhut-pandjaitan-pegang-14-jabatan-selama-era-jokowi/> (diakses Juli 10, 2022).
- World Trade Organization. “The General Agreement on Tariffs and Trade.” *wto.org*. 1994. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47.pdf (diakses Maret 12, 2022).
- . “DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials.” *www.wto.org*. 15 Januari 2021. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm.
- . *DS592: Indonesia — Measures Relating to Raw Materials*. 20 Februari 2021. https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds592_e.htm (diakses April 18, 22).
- . “The Agreement on Subsidies and Countervailing Measures.” *t.thn*. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf (diakses Juli 12, 2022).
- . “WT/DS592/1 Indonesia – Measures Relating To Raw Materials: Request For Consultations By The European Union.” 27 November 2019. <https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/DS/592-1.pdf&Open=True> (diakses Juli 12, 2022).

Writer, Content. *Bamsoet: Kementerian ESDM Tak Perlu Percepat Larangan Ekspor Nikel*. 3 September 2019.
<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/03/bamsoet-kementerian-esdm-tak-perlu-percepat-larangan-ekspor-nikel> (diakses Juli 1, 2022).

Wawancara, Sinar, dan FGD

Anung, Pramono, wawancara oleh Putri Tanjung. *Eksklusif! Pramono Anung Bongkar Rahasia Kabinet Presiden Jokowi | Podkabs Ep. 1* Jakarta: Sekretariat Kabinet, (4 Februari 2022).

Panjaitan, Luhut B., wawancara oleh Deddy Corbuzier. *JOKOWI 3 PERIODE!?! GIMANA KOMEN KALIAN?.. Luhut Binsar Pandjaitan - Deddy Corbuzier Podcast* (11 Maret 2022).

Sukono, kuisisioner oleh M. Roehman Zainur Riedho. *Larangan Ekspor Nikel Pemerintah Indonesia Setelah Meningkatnya Tren Industri Otomotif Berbasis Listrik* (29 Juni 2022).

Wardani, Wisnu, Iko Desy Anggraeni, Muhammad Anis, dan Esti Rahayu, FGD bersama Penulis. *Larangan Ekspor Biji Nikel Oleh Pemerintah Indonesia* (22 Agustus 2022).



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A